

**DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP TINGKAT KESENJANGAN WILAYAH  
DI INDONESIA**

**(ANALISIS DATA PANEL PROPINSI TAHUN 1994-2006)**



**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan  
studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Universitas Indonesia

Oleh:

**Nunik Yunarti**  
NPM: 0606012573

MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA  
**2008**

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Nunik Yunarti  
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 20 Juni 1973  
NPM : 0606012573  
Judul Tesis : Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal  
terhadap Tingkat Kesenjangan Wilayah di  
Indonesia (Analisis Data Panel Propinsi  
Tahun 1994-2006)


Depok, 31 Juli 2008

Menyetujui :  
Pembimbing,

  
(Dr. Mohamad Ikhsan)

Mengetahui :  
Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ketua,

  
( **Dr. B. RAKSAKA MAHI** )  
NIP. 131.923.199

## ABSTRAK

### Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap tingkat Kesenjangan Wilayah di Indonesia

Nunik Yunarti  
0606012573

Salah satu manfaat yang diharapkan dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah. Saat ini ada dua teori yang saling bertolak belakang terkait dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan wilayah. Teori konvensional menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan *meningkatkan* kesenjangan sebagai akibat dari menurunnya peran pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan distribusi pendapatan antar daerah. Sementara itu penelitian terbaru menyatakan bahwa desentralisasi fiskal justru akan *mengurangi* tingkat kesenjangan wilayah, dikarenakan kendala anggaran yang dihadapi pemerintah daerah sebagai akibat dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal, pada akhirnya justru dapat menimbulkan insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan usahanya sendiri, sehingga tercapai pemerataan antar wilayah.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di dalam propinsi (*within province inequality*), dengan menggunakan data panel seluruh propinsi di Indonesia selama kurun waktu 1994-2006. Model yang digunakan mengacu pada model Nobuo Akai, dan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel *Fixed Effect*.

Dalam tesis ini kebijakan desentralisasi fiskal direpresentasikan dengan empat indikator, yang memberikan hasil sebagai berikut: a). Kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi *rasio PAD* cenderung meningkatkan kesenjangan wilayah, disebabkan rendahnya rasio PAD terhadap total penerimaan (rata-rata 14,8%) dan timpangnya rasio PAD antar propinsi. Rendahnya rasio PAD disebabkan oleh relatif rendah dan terbatasnya basis pajak dan retribusi daerah, rendahnya kemampuan administrasi pemungutan di daerah, serta adanya kebocoran di daerah. Timpangnya rasio PAD disebabkan oleh timpangnya kemampuan daerah yang relatif maju dengan daerah yang relatif tertinggal dalam memobilisasi/menggali sumber-sumber penerimaan bagi daerahnya; b). Kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi *total penerimaan daerah* cenderung menurunkan kesenjangan wilayah. Hal ini berarti bahwa kebijakan dana perimbangan, khususnya dari komponen DAU, cukup berhasil menurunkan kesenjangan wilayah; c). Kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi *total pengeluaran daerah* cenderung menurunkan kesenjangan wilayah; (d). Kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi *rasio belanja pembangunan* cenderung meningkatkan kesenjangan wilayah. Hal ini disebabkan telah terjadinya misalokasi dari penggunaan belanja pembangunan. Jika dihubungkan dengan hasil estimasi dari rasio total pengeluaran daerah yang justru berdampak dalam menurunkan tingkat kesenjangan, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil menurunkan kesenjangan wilayah, karena pada intinya keberhasilan desentralisasi fiskal direpresentasikan oleh kemandirian fiskal yang berarti bahwa pemerintah daerah bertumpu pada Pendapatan Asli Daerahnya dalam membiayai pembangunan di daerahnya

## KATA PENGANTAR

**Alhamdulillahirabbil'alamin.** Puji dan Syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan kuliah di MPKP yang ditandai dengan selesainya penulisan tesis ini sebagai tugas akhir pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP).

Selama masa perkuliahan serta dalam proses penyusunan tesis, telah banyak pihak yang membantu. Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalasnya, kecuali hanya ucapan terimakasih semata. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada berbagai pihak berikut:

1. Bp. Dr. Mohamad Ikhsan selaku pembimbing yang selalu menyediakan waktunya untuk berkonsultasi
2. Bp. Dr. Raksaka Mahi selaku Ketua Program MPKP-FEUI dan Ibu Hera Susanti, SE, M.Sc selaku sekretaris Program MPKP-FEUI yang juga membantu penulis dalam mematangkan proposal tesis
3. Bp. Iman Rozani SE dan Bp. Dr Widiono selaku tim dosen penguji dalam sidang serta Bp. Dr. Andi Fahmi selaku dosen pembahas dalam seminar tesis
4. Mbak Sri Wahyu Wijayanti, atas semua masukan serta kesediaannya untuk meluangkan waktu bagi penulis.
5. Semua teman-teman dari Angkatan XV B malam: M'Tres and Cia sebagai "temen gaul"; mbak Suci; Noor dan Mbak Nuring sebagai "temen seperjuangan"; Wita; Mba Utami; dan mbak-mbak dari BI: Mbak Rita, mbak Titi, mbak Sari dan mbak Titi; khusus buat Mbak Rita, *makasih banget ya mbak atas segala bantuan datanya, moga-moga ga bosen digangguin terus*; dan tentu saja mbak Titi, atas semua masukan-masukannya. Buat bapak-bapaknya: P'Hasbullah, P'Sakrul, Raja, Setiawan, P'Boy, P'Max dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
6. Teman-teman di *World Bank*, terutama Lina, Dian dan Fitria, *thanks a lot* atas semua bantuannya, terutama atas *supply* data-datanya
7. Mas Dedi, Mbak Keke dan Mas Haris atas segala bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di MPKP. Dan tentu saja Mbak Siti atas segala bantuan dan *keramahatannya* dalam memberikan informasi
8. Dan tentu saja, *My lovely family: my mom* dengan bantuan doanya, tanpa doa mama, tidak mungkin saya dapat menyelesaikan ini semua dengan baik; *my lovely husband*, uda iyai dengan segala dukungan dan kesabarannya; *my lovely daughter* dengan segala keceriaannya....dan tentu saja *my brother*, dwi permadi, dengan segala perhatiannya. *Thanks a lot and I love you all*
9. Semua pihak yang telah membantu, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu... *Jazakumullahu Khairan Katsiraa.....*

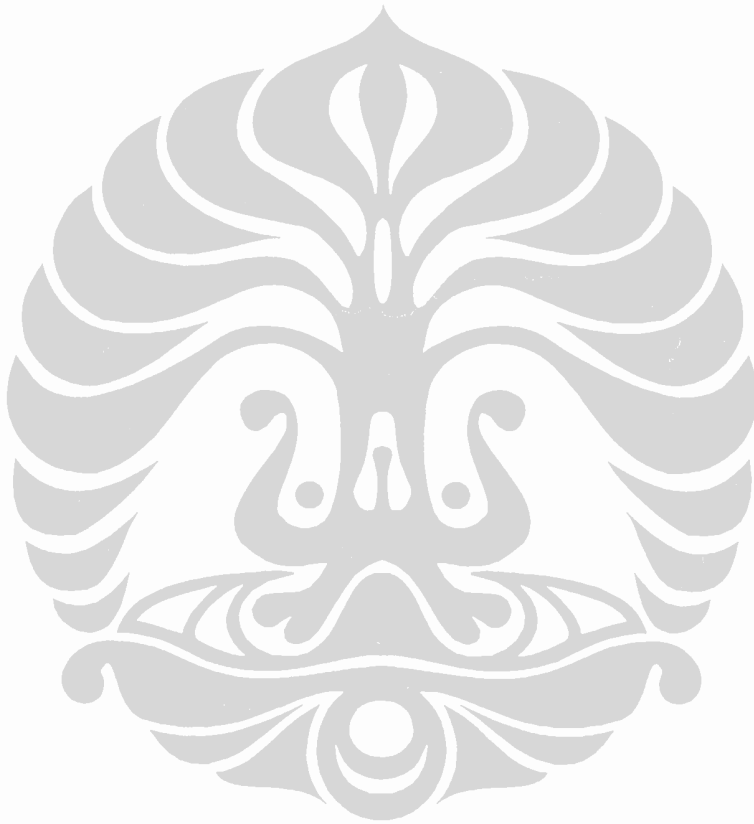
Tak ada gading yang tak retak. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat menyadari akan adanya keterbatasan dalam penulisan tesis ini. Oleh karenanya, segala masukan baik berupa saran maupun kritikan akan dengan senang hati kami terima.

Jakarta, Juli 2008  
Penulis

**Nunik Yunarti**

Karya ini kupersembahkan bagi buah hatiku tersayang

.....*Ananda Salma Salsabila Az-Zahra*



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Hipotesis.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN LITERATUR</b>	
2.1 Kesenjangan Ekonomi Wilayah	
2.1.1 Teori dan Konsep Kesenjangan Ekonomi Wilayah.....	8
2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Ekonomi Wilayah.....	10
2.1.3 Pengukuran Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah.....	13
2.1.3.1 Indeks Williamson.....	14
2.1.3.2 Indeks Theil.....	14
2.1.3.3 Kurva Lorenz.....	15
2.1.3.4 Koefisien Gini.....	16
2.1.4 Kesenjangan Ekonomi Wilayah: Studi Terdahulu.....	16
2.2 Desentralisasi Fiskal.....	18
2.2.1 Teori dan Konsep Desentralisasi Fiskal.....	19
2.2.2 Konsep dan Kondisi Desentralisasi Fiskal di Indonesia.....	22
2.3 Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan Ekonomi Wilayah..	33
2.3.1 Studi Terdahulu di Manca Negara.....	35
2.3.2 Studi Terdahulu di Indonesia .....	37
<b>BAB III</b>	
<b>PROFIL KESENJANGAN WILAYAH DI TIAP PROPINSI</b>	
3.1 Periode Sebelum Desentralisasi Fiskal (1994-2000) .....	39
3.2 Periode Setelah Desentralisasi Fiskal (2001-2006) .....	41
<b>BAB IV</b>	
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
4.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	45
4.2 Spesifikasi Model .....	46
4.3 Sumber dan Jenis Data .....	51
4.4 Metode Analisis .....	52
4.4.1 Penghitungan Kesenjangan Ekonomi Regional.....	52
4.4.2 Penghitungan Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan Ekonomi Regional.....	53
4.4.3 Uji Statistik Model .....	55
4.4.3.1 Uji Kesesuaian Model .....	55
4.4.3.2 Uji Asumsi OLS .....	57

## BAB V

### DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESENJANGAN WILAYAH

5.1	Hasil Estimasi .....	61
5.2	Analisis Hasil Estimasi .....	65
5.2.1	Model 1: Variabel <i>Autonomy Indicator</i> (PAD).....	65
5.2.2	Model 2: Variabel <i>Revenue Indicator</i> .....	71
5.2.3	Model 3: Variabel <i>Production Indicator</i> .....	73
5.2.4	Model 4a: Variabel <i>Development Expenditure</i> .....	74
5.2.5	Model 4b: Variabel lag <i>Development Expenditure</i> .....	76
5.2.6	Variabel PDRB Perkapita .....	79
5.2.7	Variabel <i>Share</i> Sektor Manufaktur .....	79
5.2.8	Variabel Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah.....	79
5.2.9	Variabel Derajat Keterbukaan ( <i>Openness</i> ) .....	80
5.2.10	Variabel Investasi.....	80
5.2.11	Variabel Persentase Penduduk Perkotaan ( <i>Urban</i> ) .....	80
5.2.12	Variabel <i>Dummy</i> Kebijakan .....	81
5.2.13	Variabel <i>Dummy</i> Pemekaran.....	81

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1	Kesimpulan .....	82
6.2	Rekomendasi Kebijakan .....	83
6.3	Keterbatasan studi .....	84
6.4	Usulan Studi Lanjutan.....	85

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

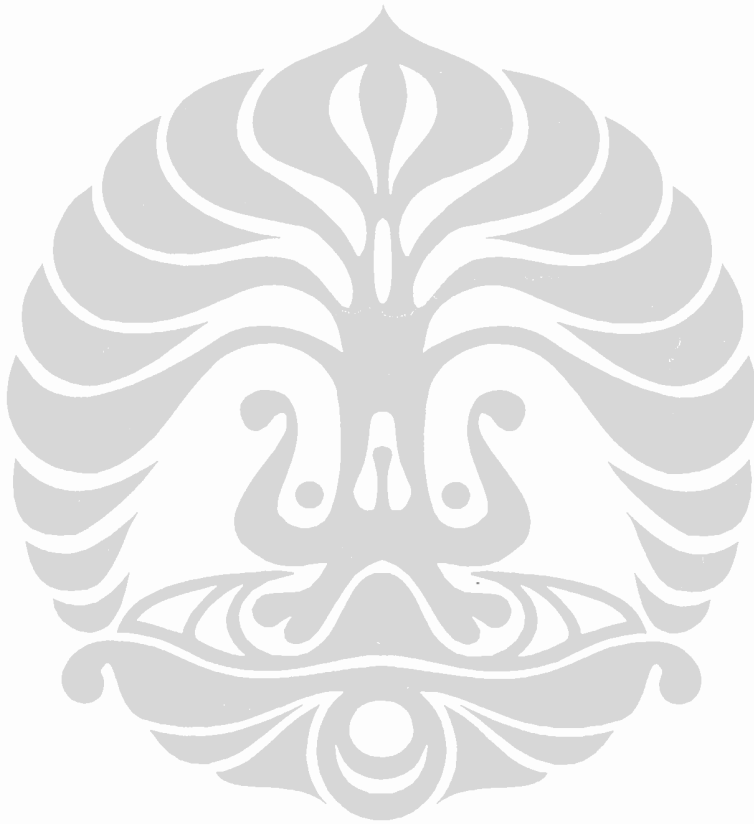
Tabel 2.1	Variabel yang mempengaruhi Kesenjangan Wilayah di Indonesia .....	13
Tabel 2.2	Hasil Penelitian tentang Dampak Desentralisasi Fiskal (DF) terhadap Kesenjangan Wilayah di Indonesia .....	38
Tabel 3.1	Statistik Deskriptif dari Indeks Williamson periode 1994-2000 .....	40
Tabel 3.2	Indeks Williamson (Iw) tiap Propinsi di Indonesia periode 1994-2000 .....	41
Tabel 3.3	Statistik Deskriptif dari Indeks Williamson periode 2001-2006 .....	42
Tabel 3.4	Indeks Williamson (Iw) tiap Propinsi di Indonesia periode 2001-2006 .....	43
Tabel 3.5	Perbandingan kondisi kesenjangan pada periode Sebelum dan Setelah Kebijakan Desentralisasi Fiskal .....	44
Tabel 4.1	Sumber dan Jenis Data .....	52
Tabel 5.1	Hasil Estimasi Regresi (6 variabel kontrol) .....	62
Tabel 5.2	Hasil Estimasi Regresi (5 variabel kontrol) .....	64





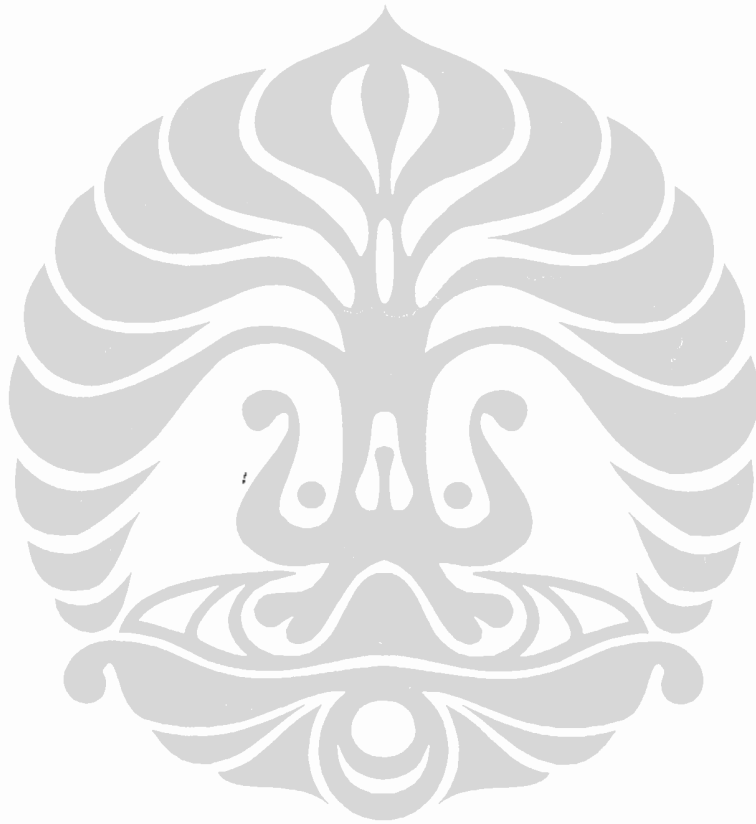
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva Lorenz .....	20
Gambar 3.1	Rata-rata Indeks Williamson tahun 1994-2006 .....	41
Gambar 3.2	Standar Deviasi Indeks Williamson tahun 1994-2006 .....	42
Gambar 4.1	Propinsi dengan Rata-rata Rasio PAD diatas Rata-rata Seluruh Propinsi .....	69
Gambar 4.2	Propinsi dengan Rata-rata Rasio PAD kurang dari 10% .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Metode Penghitungan Kesenjangan Wilayah
- Lampiran 2 Hasil Uji *Chow Test* dan *Hausman Test*
- Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data (Regresi Data Panel)
- Lampiran 4 Data
- Lampiran 5 Statistik Deskriptif dari Data



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia memasuki era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah. Implementasi pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan adanya perubahan struktur pemerintahan yang menjadi lebih terdesentralisasi. Secara teoritis terdapat empat tipe desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi ekonomi, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal (Sidik:2002). Penerapan sistem desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan secara bersamaan dengan penerapan sistem otonomi daerah yang ditandai dengan diterapkannya Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah* yang mengatur pelimpahan wewenang di bidang fiskal (desentralisasi fiskal). Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 33/2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Desentralisasi Fiskal dapat didefinisikan sebagai penyerahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Berdasarkan definisi ini maka daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dengan dukungan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau menganut prinsip *Money follows function*. Hal ini berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Desentralisasi fiskal menjadi penting untuk diterapkan karena beberapa alasan. *Pertama*, semakin langkanya sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan

publik dan pembangunan. *Kedua*, mengurangi ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan. *Ketiga*, banyak sumber penerimaan daerah yang besar dikelola oleh pemerintah tingkat propinsi, bahkan pungutan pada level pemerintahan propinsi lebih besar daripada subsidi yang diberikan kepada kabupaten dan kota (Ermaya dalam Makmun: 2004).

Dengan demikian, maka pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan menghasilkan manfaat seperti: a). Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan; b). Mendorong *pemerataan hasil pembangunan (keadilan)* di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Pemerataan hasil pembangunan, yang ditunjukkan oleh makin meratanya distribusi pendapatan ataupun berkurangnya tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah, menjadi penting dikaji karena merupakan salah satu masalah pokok pembangunan, selain masalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Arsyad : 2004). Disamping itu juga, kesenjangan antar wilayah juga dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti kecemburuan antarwilayah serta berbagai masalah kependudukan seperti migrasi, urbanisasi, pengangguran, dan lain-lain. Pada gilirannya, masalah-masalah tersebut akan berpengaruh pada stabilitas nasional.

Dalam kenyataannya, terdapat dua macam pandangan yang sangat berbeda mengenai pengaruh atau dampak dari penerapan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan wilayah. Pandangan yang pertama, yang lebih dikenal dengan pandangan konvensional menyatakan bahwa desentralisasi fiskal kemungkinan besar dapat meningkatkan kesenjangan wilayah. Pandangan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dengan diterapkannya desentralisasi fiskal, maka wewenang pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan distribusi pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil, sehingga menyebabkan makin meningkatnya kesenjangan wilayah. Namun, belakangan ini timbul kontroversi terhadap pandangan tersebut, yang menyatakan bahwa penerapan desentralisasi fiskal justru dapat

mendorong terjadinya pemerataan atau mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Pandangan kedua ini didasari pemikiran bahwa dengan diterapkannya desentralisasi, maka pemerintah daerah akan menghadapi kendala dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya. Hal ini mendorong pihak pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan usahanya sendiri, sehingga kesenjangan yang terjadi antar daerah menjadi semakin berkurang.

Dalam prakteknya di Indonesia, keberhasilan proses desentralisasi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi/pendapatan antar daerah tersebut masih menjadi pertanyaan. Dalam hal ini telah dilakukan beberapa studi di tingkat propinsi di Indonesia, namun hasilnya bervariasi dalam artian ada yang mendukung pandangan pertama (konvensional) maupun pandangan kedua. Pandangan konvensional diperkuat oleh beberapa hasil studi dari Shovie (2004), Wijayanti (2006), Astuti (2007) dan Antonius (2007). Berdasarkan temuan dari Astuti dan Wijayanti, ada hubungan positif antara desentralisasi dengan pendekatan Penerimaan (Pendapatan Asli Daerah/PAD maupun total penerimaan) dengan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Hal ini berarti bahwa desentralisasi fiskal makin melebarkan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Sedangkan pandangan kedua, juga diperkuat oleh beberapa studi seperti hasil studi dari Suhartono (2005), Wijayanti (2006) dan Widhiyanto (2006). Suhartono (2005) menyatakan bahwa penerapan desentralisasi fiskal, yang diukur dengan indikator transfer fiskal, telah memberikan efek berkurangnya kesenjangan ekonomi antar daerah (Suhartono dalam Wijayanti: 2006). Selain itu, Wijayanti (2006) dalam tesisnya juga menemukan bahwa ada hubungan negatif antara desentralisasi dengan pendekatan pengeluaran (total *expenditure* maupun total *expenditure* dan *revenue*) dengan kesenjangan ekonomi antar daerah. Hal ini berarti bahwa upaya pemerintah untuk membantu daerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah. Studi terbaru yang mendukung pandangan kedua ini dilakukan oleh Widhiyanto dalam tesisnya, dengan

menggunakan rasio antara pendapatan dengan pengeluaran pemerintah daerah sebagai indikator desentralisasi fiskal.

Dari segi ruang lingkup waktu, pada umumnya studi-studi yang telah dilakukan tersebut hanya mengkaji kesenjangan antar wilayah pada saat kebijakan desentralisasi fiskal telah diberlakukan. Padahal untuk mendapatkan gambaran yang cukup lengkap, perlu juga dikaji bagaimana kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah baik sebelum maupun setelah kebijakan desentralisasi fiskal tersebut telah diberlakukan. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan desentralisasi fiskal, seperti halnya studi evaluasi terhadap dampak dari suatu kebijakan yang biasa dilakukan, perlu dilakukan analisa kondisi pada saat sebelum (*pra*) dan sesudah (*post*) kebijakan tersebut diterapkan.

Dari segi indikator desentralisasi fiskal, dalam studi-studi terdahulu sudah tercakup pendekatan baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran. Namun belum ada studi yang mencoba melihat desentralisasi fiskal dari sisi alokasi penggunaan dana oleh pemerintah daerah itu sendiri, yang merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Dalam tesis ini akan ditambahkan indikator tersebut.

Berdasarkan uraian diatas serta untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah propinsi di Indonesia, menjadikan studi ini menarik untuk dibahas. Apakah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal berhasil menurunkan atau justru makin meningkatkan kesenjangan wilayah di tiap propinsi di Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana profil kesenjangan ekonomi di tiap-tiap wilayah propinsi di Indonesia dalam era *sebelum* (tahun 1994-2000) dan

setelah (tahun 2001-2006) kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan

- 2) Bagaimana dampak/pengaruh desentralisasi fiskal, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran, terhadap kesenjangan ekonomi antar wilayah di tiap propinsi di Indonesia

### 1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui profil kesenjangan ekonomi/penerimaan di tiap-tiap wilayah propinsi di Indonesia dalam era sebelum (1994-2000) dan setelah (2001-2006) desentralisasi fiskal
- 2) Mengetahui dampak/pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesenjangan ekonomi di tiap wilayah propinsi di Indonesia

### 1.4. Hipotesis.

Berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam studi ini:

- 1) Secara teoretis, tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Berdasarkan hal ini, maka *patut diduga* bahwa kesenjangan wilayah akan menurun setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal.
- 2) Dengan mulai diterapkannya desentralisasi fiskal, ada kecenderungan dari Pemerintah Daerah untuk tidak membelanjakan (seluruh) dana APBDnya. Sebagian dana APBD tersebut, terutama untuk belanja pembangunan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif serta kepentingan/pelayanan publik, justru diinvestasikan dengan cara "diendapkan" dalam bentuk SBI (Hadi: 2007)<sup>1</sup>. Dengan kondisi seperti ini, maka *patut diduga* bahwa desentralisasi fiskal justru berpengaruh dalam *meningkatkan* kesenjangan ekonomi di tiap wilayah propinsi di

---

<sup>1</sup> Berdasarkan data pada tahun 2006, ada sekitar Rp40 triliun dana DAU yang disimpan dalam bentuk SBI (Hadi, 2007)

Indonesia, dengan menggunakan pendekatan *total pengeluaran daerah*.

- 3) Secara konsep, kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan antar daerah. Transfer fiskal dilakukan dengan menggunakan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), yaitu kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan fiskal dan potensi fiskalnya (LPEM UI:2002). Dengan konsep ini diharapkan agar kesenjangan ekonomi antar daerah dapat dikurangi. Oleh karena itu, *patut diduga* bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh dalam *mengurangi* kesenjangan ekonomi di tiap wilayah propinsi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan *total penerimaan daerah*.

#### **1.5. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu kebijakan publik, pengambil kebijakan serta peminat masalah-masalah perekonomian daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang desentralisasi fiskal dan kesenjangan ekonomi regional
- 2) Sebagai bahan referensi penelitian lainnya yang berkaitan dengan bidang desentralisasi fiskal dan kesenjangan ekonomi regional di Indonesia

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah:

**Bab I *Pendahuluan***, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan



**Bab II Kajian Literatur**, berisikan tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kesenjangan ekonomi regional, baik yang bersifat teori maupun studi empirik. Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang teori serta konsep dari desentralisasi fiskal dan kesenjangan ekonomi wilayah, serta hubungan antara keduanya

**Bab III Profil Kesenjangan Ekonomi Wilayah di tiap Propinsi**, berisikan deskripsi kondisi kesenjangan ekonomi wilayah yang terjadi antar Kabupaten/Kota di dalam tiap propinsi di Indonesia selama tahun 1994-2006, dengan metoda *Indeks Williamson*

**Bab IV Metodologi Penelitian**, berisikan detail metoda yang digunakan dalam studi ini. Mulai dari jenis dan sumber data, ruang lingkup penelitian, metoda pengukuran kesenjangan regional, model ekonometri secara detail (beserta uji statistik yang akan dilakukan)

**Bab V Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan Wilayah**, berisikan hasil estimasi regresi serta analisa hubungan keterkaitan antara kesenjangan ekonomi wilayah, indikator fiskal dan variabel kontrol

**Bab VI Kesimpulan dan saran**, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta rekomendasi kebijakan, dan keterbatasan studi beserta saran untuk studi lanjutan

**Bagian penutup** berupa Daftar Kepustakaan beserta Lampiran. Daftar Kepustakaan berisikan referensi atau publikasi/buku yang dipergunakan sebagai acuan dan rujukan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan Lampiran terdiri dari lampiran tabel statistik dan hasil perhitungan parameter indeks, beserta penjelasan teknis yang dianggap penting untuk ditampilkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN LITERATUR**

Kajian literatur dalam bab ini meliputi teori/konsep, pengukuran, studi terdahulu serta kondisi kesenjangan ekonomi wilayah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Disamping itu juga akan diuraikan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli ekonomi regional sebelumnya, baik di Indonesia maupun di manca negara, terkait dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan perekonomian suatu wilayah.

#### **2.1 Kesenjangan Ekonomi Wilayah**

Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang terutama dihadapi oleh negara berkembang, disamping pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Arsyad:2004). Ada berbagai macam kesenjangan seperti kesenjangan kota dan desa, kesenjangan interpersonal, kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi, dan kesenjangan regional/ wilayah (Kuncoro: 2003). Dalam bab ini kajian akan dibatasi pada kesenjangan wilayah.

##### **2.1.1 Teori dan Konsep Kesenjangan Ekonomi Wilayah**

Menurut Gunar Myrdal (Roudo:2004) kesenjangan antar wilayah terutama disebabkan oleh sistem kapitalis yang mengutamakan perolehan keuntungan/laba. Akibatnya, pembangunan akan cenderung terpusat di wilayah tertentu yang diperkirakan akan memberikan laba yang lebih tinggi. Sehingga, wilayah yang tidak menjanjikan laba tinggi akan mengalami stagnasi atau bahkan terbelakang. Selain itu, Field (1984) juga menyebutkan bahwa terjadinya kesenjangan antar wilayah disebabkan karena setiap daerah memiliki kapasitas perekonomian (sumber daya) dan kondisi geografis yang berbeda. Kesenjangan itu sendiri bersifat dinamis, yaitu dapat semakin

membesar sebagai akibat dari terjadinya *backwash effect*<sup>1</sup> dan juga dapat semakin mengecil sebagai akibat terjadinya *spread effect*<sup>2</sup>.

Ada dua teori/pandangan yang saling bertolak belakang menyangkut pola perkembangan atau dinamika dari kesenjangan antar wilayah. Pandangan pertama, yang merupakan pandangan pesimis, dijelaskan oleh teori *Polarization Effect* atau proses pengkutuban, menyebutkan bahwa kesenjangan akan cenderung semakin besar sebagai akibat dari adanya aliran faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah yang lebih maju. Teori ini didukung oleh Myrdal (Lay:1993) yang menyatakan bahwa *Backwash effect* akan selalu lebih besar daripada *spread effect*. Sedangkan pandangan kedua, yang merupakan pandangan optimis, dijelaskan oleh teori *Trickle Down Effect* menyebutkan sebaliknya, yaitu kesenjangan akan cenderung semakin mengecil karena kondisi perekonomian di wilayah maju sudah tidak efisien lagi sehingga terjadi perpindahan sumber daya (terutama modal) ke wilayah terbelakang. Pandangan kedua ini juga didukung oleh teori *Disequilibria* dari Streen (1976) yang menyatakan bahwa kesenjangan akan semakin mengecil karena adanya proses *trickle down effect* dari sektor unggulan ke sektor non unggulan. Hal ini juga dijelaskan lebih jauh oleh Perroux (1964) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tak mungkin terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah akan menyebabkan adanya wilayah dengan pertumbuhan yang lebih tinggi (dikenal dengan istilah "pusat pertumbuhan" *growth pole*). Dari wilayah yang pertumbuhannya tinggi ini kemudian akan terjadi *trickle down effect*, yaitu menyebar ke wilayah lainnya. Dalam proses yang memakan waktu cukup lama ini, campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru serta untuk mencegah perpindahan faktor produksi ke pusat pertumbuhan. Dengan demikian maka diharapkan polarisasi antar wilayah dapat diperkecil, sehingga daerah pinggiran bisa lebih diuntungkan.

---

<sup>1</sup> *Backwash Effect* adalah semua perubahan yang timbul pada daerah yang dirugikan karena adanya ekspansi ekonomi dari suatu daerah (Myrdal dalam Arsyad)

<sup>2</sup> *Spread Effect* adalah pengaruh yang menguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya

Pandangan optimis juga dikemukakan oleh Hirschman yang mengemukakan bahwa *trickle down effect* akan bekerja lebih kuat dari pada *polarization effect*, sehingga menyebabkan semakin berkurangnya kesenjangan antar wilayah.

Pendapat lain yang juga mendukung pandangan optimis dikemukakan juga oleh Williamson (1965) yang menemukan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, kesenjangan dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah maju. Selanjutnya, pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, konvergensi serta kesenjangan distribusi pendapatan antar wilayah akan mengalami penurunan. Hal senada juga dikemukakan oleh Kuznet yang dikenal dengan "hipotesa U terbalik"-nya. Menurut Kuznet pada tahap awal pembangunan, kesenjangan distribusi pendapatan antar wilayah akan tinggi. Namun, pada saat kondisi perekonomian sudah mencapai tahap *maturity*, maka laju pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pada akhirnya, dengan adanya dua pandangan yang saling bertolak belakang tersebut, maka kecenderungan semakin membesarnya kesenjangan (divergensi) atau sebaliknya (konvergensi) masih menjadi bahan kajian yang menarik.

### **2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Ekonomi Wilayah**

Kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat terjadi karena berbagai faktor. Menurut Williamson (Hera dkk: 2000), kesenjangan pendapatan antar daerah dan antar negara secara umum dipengaruhi:

1. Migrasi Tenaga Kerja. Di negara berkembang, terjadi perpindahan tenaga kerja dalam usia produktif dan berpendidikan relatif tinggi dari wilayah tertinggal ke wilayah maju, sehingga kesenjangan antara wilayah tertinggal dan wilayah maju semakin besar. Hal ini tidak terjadi di negara maju karena ketersediaan fasilitas di setiap wilayahnya relatif sama.
2. Migrasi Kapital. Di negara maju umumnya kapital lari ke wilayah yang relatif miskin karena *rate of return*-nya lebih tinggi daripada wilayah yang relatif kaya. Sebaliknya di negara berkembang,

karena keterbatasan ketersediaan sarana/prasarana, maka investasi yang dilakukan di daerah yang relatif miskin justru akan menjadi lebih mahal dibandingkan daerah yang relatif kaya.

3. Keterkaitan antar wilayah. Keterkaitan antar wilayah di negara maju sangat tinggi karena arus informasi dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya di negara yang sedang berkembang, karena keterbatasan infrastruktur menyebabkan arus informasi tidak berjalan dengan baik, akibatnya keterkaitan antar wilayah menjadi tidak terlalu erat.
4. Kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat di negara maju relatif lebih mementingkan masalah pemerataan karena tingkat pendapatan perkapitanya telah mencukupi. Sebaliknya di negara berkembang, karena pendapatan perkapitanya masih rendah, maka pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas.

Selain itu, menurut Irma Adelman & Cynthia Moris (1973) secara khusus kesenjangan pendapatan di negara berkembang terutama disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini (Arsyad:2004):

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat besar dalam proyek-proyek padat modal (*capital intensive*) menyebabkan meningkatnya pengangguran
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam perdagangan dengan negara maju, akibat ketidak elastisan permintaan terhadap barang ekspor NSB
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat

Beberapa pakar juga menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan perekonomian antar wilayah di Indonesia.

Menurut Sumodiningrat (1998), penyebab kesenjangan antar wilayah di Indonesia adalah perbedaan potensi sumber daya alam (SDA) di tiap wilayah, prasarana dan sarana yg dibangun, perbedaan ketersediaan modal, serta kemampuan sumber daya manusia (SDM). Sedangkan menurut Alisjahbana (2006), penyebab kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah kepemilikan SDA yang tidak merata, sumber daya manusia, serta disparitas gender dalam pendidikan. Secara lebih spesifik, Tambunan (2001) mengemukakan faktor penyebab kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Kesenjangan akan semakin membesar diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi wilayah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi.
2. Alokasi investasi yang tidak seimbang. Alokasi investasi di Jawa (66%) besarnya adalah (hampir) dua kali lipat dari investasi di luar Jawa (34%). Sesuai dengan teori *Harrod Domar* yang menyebutkan adanya korelasi positif antara investasi dan pertumbuhan, menyebabkan kesenjangan antara kedua wilayah semakin lebar.
3. Rendahnya tingkat mobilitas faktor produksi (seperti tenaga kerja dan modal). Hal ini sesuai dengan teori *Arthur Lewis "Unlimited Supply of Labor"* yang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi yang optimal di seluruh wilayah dapat terjadi jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan.
4. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki tiap wilayah.
5. Perbedaan demografis antar wilayah. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar dengan kualitas tenaga kerja yang cukup memadai akan memiliki pertumbuhan tinggi dan berlaku sebaliknya.
6. Arus perdagangan/komunikasi antar wilayah kurang lancar, karena minimnya sarana infrastruktur dan kondisi geografis wilayah

Dari uraian diatas, ternyata ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Hal ini antara lain juga ditunjukkan oleh bervariasinya variabel kontrol yang digunakan oleh para peneliti dalam studinya. Yang dimaksud dengan variabel kontrol adalah variabel yang diduga

Mempengaruhi kesenjangan ekonomi di Indonesia selain indikator utama yang diteliti.

**Tabel 2.1 Variabel yang mempengaruhi Kesenjangan Wilayah di Indonesia**

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Kontrol	Hubungan*
Esther Sri Astuti & Joko Tri Haryanto	Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Daerah di Indonesia	Investasi	Negatif
		Ketersediaan Jalan	Positif
		Ketersediaan Listrik	Negatif
		Keterbukaan (net ekspor)	Negatif
		PDRB per kapita	Negatif
		Jumlah Penduduk	Negatif
Sri Wahyu Wijayanti	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap tingkat Kesenjangan Regional di Indonesia	Ketersediaan Jalan	Positif
		Keterbukaan (net ekspor)	Negatif
		PDRB per kapita	Positif
		Jumlah Penduduk	Positif
		Tingkat Pendidikan	Negatif
Antonius Sriandwi Nugrahanto	<i>Fiscal Decentralization and Regional Inequality In Indonesia 2001-2004;</i>	PDRB perkapita	Positif
		Investasi	Positif
		Jumlah Penduduk	Positif
Iman Widhiyanto	<i>The Role of Fiscal Decentralization Policy Toward Regional Development and Regional Income Disparity in Indonesia 1994-2004</i>	Indeks Pembangunan Manusia	Negatif
		Kepadatan Penduduk	Positif

Keterangan:

\* Hubungan **positif** berarti variabel kontrol berbanding lurus dengan kesenjangan, artinya, semakin besar/tinggi variabel kontrol yang bersangkutan maka akan semakin meningkatkan kesenjangan. Hubungan **negatif** berarti sebaliknya

### 2.1.3 Pengukuran Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah

Tidak ada satupun metoda pengukuran kesenjangan ekonomi yang bisa menangkap seluruh dimensi kesenjangan tersebut. Namun demikian, ada beberapa metode yang biasa digunakan seperti *Weighted Coefficient Variation (CVw)* atau koefisien variasi tertimbang yang lebih dikenal dengan sebutan Indeks Williamson, dispersi entropy Indeks Theil, Kurva Lorenz dan Indeks Gini.

### 2.1.3.1 Indeks Williamson

Cara yang paling sering digunakan untuk mengukur kesenjangan antar wilayah adalah Koefisien Variasi Tertimbang (*Weighted Coefficient of Variation* disingkat CVw). Metode ini diperkenalkan oleh *Jeffrey Williamson*, sehingga lebih dikenal dengan sebutan *Indeks Williamson*. Pada prinsipnya, indeks ini mengukur dispersi tingkat pendapatan perkapita daerah relatif terhadap rata-rata nasional. Dengan metode ini Williamson mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara dengan *proksi* Produk Domestik Bruto (PDB)<sup>3</sup> untuk tingkat negara dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)<sup>4</sup> untuk wilayah di dalam tiap-tiap negara, dengan temuan:

1. Pada tahap awal, pembangunan terkonsentrasi pada daerah tertentu sehingga kesenjangan wilayah/regional lebih besar
2. Pada tahap *maturnity* (tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang), terjadi keseimbangan antar wilayah sehingga kesenjangan berkurang secara signifikan
3. Kesenjangan antar wilayah di negara sedang berkembang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kesenjangan antar wilayah di negara maju

Keunggulan utama dari Indeks Williamson ini adalah relatif mudah dan praktis untuk melihat tingkat kesenjangan. Sedangkan kelemahannya bersifat agregat, sehingga tidak dapat diketahui daerah mana saja yang bisa memberikan kontribusi terhadap disparitas.

### 2.1.3.2 Indeks Theil

Metode pengukuran kesenjangan yang pertama kali dikembangkan oleh ahli ekonometrika Henry Theil ini (1967) memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan metode lainnya, antara lain:

---

<sup>3</sup> Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya tahunan. PDB merupakan ukuran di tingkat nasional (Indonesia).

<sup>4</sup> PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) memiliki pengertian yang sama dengan PDB, namun PDRB merupakan ukuran di tingkat regional, dalam hal ini propinsi atau kabupaten/kota



1. Koefisien Theil dapat didekomposisi sehingga pengaruh di dalam (*within*) dan diantara (*between*) kelompok dapat dilihat dengan jelas. Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih detail mengenai kesenjangan spasial pada sub unit geografis yang lebih kecil
2. Koefisien dekomposisi dapat juga digunakan untuk melihat perbedaan skala geografis secara simultan.
3. Memenuhi beberapa sifat sebagai ukuran ketidakmerataan dalam kesejahteraan
4. Tidak terpengaruh nilai ekstrim dan bebas terhadap banyaknya wilayah, sehingga sering digunakan untuk membandingkan ketidakmerataan dari perbedaan sistem wilayah

Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah (Adelman dan Levy):

1. Indeks Theil bersifat agregat, sehingga tidak dapat diketahui daerah mana saja yang memberikan kontribusi terhadap kesenjangan
2. Dekomposisi Indeks Theil tidak dapat menjelaskan penyebab ketimpangan yang diakibatkan oleh korelasi prinsip-prinsip dekomposisi. Awalnya dinyatakan bahwa ketimpangan total dipengaruhi oleh ketimpangan antar (*between*) wilayah, namun selanjutnya dinyatakan justru ketimpangan di dalam (*within*) wilayah lah yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketimpangan total
3. Dekomposisi Indeks Theil tidak dapat menjelaskan kontribusi faktor lain terhadap ketimpangan secara keseluruhan, seperti faktor pendidikan, ras.

### **2.1.3.3 Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz merupakan metode untuk menghitung ketimpangan wilayah dengan cara menggambarkannya ke dalam bentuk suatu kurva. Metode ini pertama kali ditemukan oleh Conrad Lorenz, seorang ahli statistika dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Lorenz menggambarkan hubungan antara kelompok penduduk dengan pangsa

(*share*) pendapatan mereka. Untuk menggambarkan kurva ini dibutuhkan dua macam data, yaitu data jumlah penduduk serta besarnya pendapatan.

#### **2.1.3.4 Koefisien Gini**

Koefisien Gini adalah metode pengukuran kesenjangan yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara sebagai indikator ketidakmerataan. Pada prinsipnya, ide dasar perhitungan koefisien Gini berasal dari Kurva Lorenz. Kelemahan dari metode Indeks Gini adalah sebagai berikut: i). Sangat sensitif terhadap perubahan distribusi pendapatan kelas menengah; ii). Kurang memenuhi prinsip transfer; iii) sulit untuk dilakukan dekomposisi dan sulit untuk diinterpretasikan. Cara/formulasi perhitungan ke-empat metode tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

#### **2.1.4 Kesenjangan Ekonomi Wilayah: Studi Terdahulu**

Berdasarkan perkembangan terakhir, kesenjangan yang terjadi di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi 3 dimensi, yaitu kesenjangan etnis, tingkat kemodernan dan regional/wilayah (Astuti:2007). Dari segi etnis kesenjangan terjadi antara pribumi dan non pribumi. Sedangkan dari tingkat kemodernan terdapat kesenjangan antara sektor modern yang tercakup dalam sektor industri dan umumnya berada di perkotaan, dengan sektor tradisional yang tercakup dalam sektor tradisional dan umumnya berada di perdesaan. Sementara itu kesenjangan regional/ wilayah terjadi antara Kawasan Indonesia Timur (KTI) dan Kawasan Indonesia Barat (KBI).

Kesenjangan ekonomi regional/wilayah telah sejak lama menjadi kajian para pakar ekonomi regional. Studi tentang kesenjangan regional di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Hendra Esmara pada tahun 1975. Dalam studi tersebut Esmara menggunakan data tahun *time series* selama tahun 1950-1960, dan dengan mengeluarkan sektor migas dari perhitungan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia tergolong sebagai negara dengan

kesenjangan yang rendah. Setelah itu cukup banyak peneliti baik lokal maupun asing, yang mendalami kesenjangan wilayah di Indonesia. Salah satu studi kesenjangan antar wilayah di Indonesia yang cukup komprehensif dilakukan oleh Akita dan Lukman pada tahun 1994 dengan menggunakan data *time series* selama tahun 1975-1992. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan mengeluarkan sektor migas, indeks kesenjangan wilayah di Indonesia selama tahun 1983-1992 sangat stabil dengan kisaran indeks sebesar 0,53-0,55. Akan tetapi jika memperhitungkan sektor migas ternyata terjadi kecenderungan penurunan Indeks kesenjangan, sebab terjadi penurunan peran sektor migas dalam perekonomian. Studi selanjutnya yang dilakukan oleh Ardani (1996) ternyata menghasilkan temuan yang hampir sama dengan Akita Lukman, yaitu kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia selama tahun 1983-1990 cenderung stabil. Ardani menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antar wilayah di Indonesia selama tahun 1968-1993 dan 1983-1993 dengan metode Indeks Williamson. Selain sejalan dengan temuan Akita Lukman, kesimpulan dari penelitian Ardani ternyata juga mendukung hipotesis Williamson yaitu pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan antar wilayah, namun pada tahap berikutnya kesenjangan tersebut semakin mengecil.

Sementara itu penelitian mengenai kesenjangan ekonomi antar negara juga telah banyak dilakukan oleh para ahli. Salah satunya dilakukan Shankar dan Shah pada tahun 2000 dengan metode *Weighted Coefficient Variation* (CVw). Hasilnya, secara umum kesenjangan ekonomi antar negara tersebut cenderung mengalami penurunan. Namun, ada beberapa negara yang mengalami peningkatan kesenjangan yaitu Indonesia, Philipina, Vietnam, Cina, India, Brasil, Rumania dan Rusia. Peningkatan kesenjangan tersebut umumnya diikuti oleh peningkatan intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerahnya, juga berlaku sebaliknya untuk negara yang mengalami penurunan tingkat kesenjangan. Rentang waktu yang diteliti untuk Indonesia adalah tahun 1993-1998.

## 2.2 Desentralisasi Fiskal

Secara umum desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai pendelegasian otoritas fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan desentralisasi fiskal secara lebih lengkap. Oates (1993) mendefinisikan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu pelimpahan wewenang (devolusi) suatu tanggung jawab fiskal kepada tingkatan pemerintah yang lebih rendah dengan tujuan utama mencapai peran pemerintah yang lebih baik. Qiao (2000) menambahkan bahwa selain selain mengandung pengertian devolusi, desentralisasi juga mengandung pengertian insentif fiskal kepada pemerintah daerah. Tahun 2001, Vazquez dan McNab juga mendefinisikan desentralisasi fiskal yang sejalan dengan definisi Oates, yaitu desentralisasi dipandang sebagai suatu cara untuk membagi kekuasaan pusat dengan memberikan sebagian kewenangan fiskalnya kepada pemerintah dibawahnya. Definisi yang paling komprehensif dinyatakan oleh Bird dan Vaillancourt (1998), bahwa desentralisasi fiskal dapat dibedakan menjadi:

1. *Dekonsentrasi*, merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah
2. *Delegasi*, merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasi pelayanan tertentu, dengan pengawasan secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah daerah merupakan agen dari pemerintah pusat dalam mengimplementasi fungsi pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepadanya.
3. *Devolusi*, merupakan pelimpahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bidang keuangan (tugas pemerintahan). Pemerintah daerah tidak hanya mengimplementasi fungsi dari pemerintah pusat saja, tetapi juga memiliki kewenangan penuh untuk memberikan pelayanan kepada publik serta mengatur penggunaan anggarannya. Tipe inilah yang diterapkan di Indonesia.

### **2.2.1 Teori dan Konsep Desentralisasi Fiskal**

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, serta stabilisasi. Fungsi alokasi dimaksudkan untuk menjamin agar penggunaan sumber ekonomi (baik barang maupun jasa) dapat sejalan dengan preferensi masyarakat. Fungsi distribusi dimaksudkan untuk menjaga distribusi pendapatan agar tetap merata. Sedangkan fungsi stabilisasi dimaksudkan agar fluktuasi kegiatan ekonomi yang terjadi tidak terlalu besar.

Terkait dengan ketiga fungsi tersebut, ada dua pendekatan yang seringkali dijadikan rujukan, yaitu pendekatan Musgrave dan Neoklasik (Simanjuntak:1998). Musgrave menyatakan bahwa sektor publik berfungsi untuk menjalankan beberapa fungsi politik. Dalam pendekatan tersebut pertanyaannya adalah: (i). Tingkat pemerintah mana yang paling tepat untuk menjalankan fungsi tersebut; (ii) Apakah sistem desentralisasi atau sentralisasi yang tepat untuk dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, caranya adalah dengan mendasarkan fungsi pada dua kriteria yaitu eksternalitas dan kepekaan preferensi. Atas dasar kedua kriteria tersebut, maka fungsi yang desentralisasikan sebaiknya adalah fungsi stabilisasi, sedangkan fungsi alokasi serta fungsi distribusi lebih tepat atau efisien jika didesentralisasikan. Sedangkan pendekatan kedua, yaitu neoklasik yang merupakan pendekatan ekonomi politik, dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apakah pemerintah daerah dapat dianggap sebagaimana layaknya individu. Asumsi yang mendasari pendekatan neoklasik ini adalah anggapan bahwa masyarakat lokal memiliki preferensi yang relatif homogen seperti individu. Kesimpulan yang bisa diambil dari pendekatan ini adalah bahwa pilihan pemda ternyata lebih mendekati/sesuai dengan pilihan individual, dibandingkan dengan pilihan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, maka keputusan yang terdesentralisasi akan dapat bekerja lebih baik apabila preferensi tersebut bersifat homogen.

Sebagian besar ahli sependapat dengan pendekatan Musgrave, khususnya mengenai pandangan bahwa salah satu keuntungan dari penerapan desentralisasi fiskal adalah bertambahnya efisiensi ekonomi dalam hal alokasi sumber daya di sektor publik. Tiebout (1956) menyatakan bahwa dalam negara yang menganut sistem desentralisasi, terjadinya mobilitas penduduk serta persaingan antara pemerintah lokal/daerah akan berpengaruh pada makin sesuainya penyediaan jasa layanan umum dengan preferensi penduduk, sehingga dapat tercipta suatu efisiensi ekonomi. Oates dengan *Oates Decentralization theorem*-nya (1993) juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi, disebabkan oleh posisi pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat lokal jika dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah akan lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan preferensi lokal. Bahkan dengan terjadinya efisiensi ekonomi tersebut, akan menarik masyarakat di wilayah lain untuk pindah dan tinggal di wilayah tersebut. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Canaletta (2002), bahwa kompetisi yang terjadi antar wilayah dalam menyediakan barang publik akan menarik pendatang baru. Sehingga tiap wilayah akan mendapatkan insentif karena adanya pendatang baru menjadikan penggunaan sumber daya lebih efisien, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Namun demikian sejumlah ahli ada yang berpendapat sebaliknya, yaitu penerapan desentralisasi justru akan menyebabkan inefisiensi. Rosen (1995) mengemukakan penyebab sistem desentralisasi yang mengakibatkan alokasi sumber daya tidak efisien:

1. Jika masyarakat lokal hanya mementingkan barang publik miliknya sendiri, maka akan timbul eksternalitas dari barang publik tersebut sehingga alokasi sumber daya menjadi tidak efisien
2. Skala ekonomis penyediaan barang publik menjadi tidak efisien. Apabila beberapa wilayah berkoordinasi dalam menyediakan barang publik, maka biaya produksi per unit dapat ditekan

3. Sistem perpajakan menjadi tidak efisien. Sistem yang efisien mensyaratkan permintaan yang inelastis atau barang yang ditawarkan harus dipajaki relatif tinggi, berlaku sebaliknya

4. Skala ekonomis dalam pengumpulan pajak menjadi tidak efisien

Dalam sistem desentralisasi, pemungutan pajak adalah sumber utama dari pendapatan daerah. Selain diberi kewenangan untuk memungut pajak, pemerintah daerah juga mendapatkan transfer dari pemerintah pusat. Faktor yang mendasari terjadinya transfer tersebut:

1. Ketimpangan fiskal vertikal (*Vertical Fiscal Imbalance*), yaitu ketimpangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah
2. Ketimpangan fiskal horisontal (*Horizontal Fiscal Imbalance*), yaitu perbedaan dari kapasitas fiskal (*Fiscal Capacity*) dan kebutuhan fiskal (*Fiscal Need*) daerah
3. Efek menyebar/merembes antar daerah (*Inter-jurisdictional spill-over effects*)
4. Untuk mencapai standar pelayanan

Berdasarkan jenisnya, transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terbagi menjadi:

1. Bantuan Umum (*Block Grants*), yaitu merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan formula tertentu dimaksudkan agar bisa membiayai wilayahnya secara layak.
2. Bantuan Khusus (*Specific Grants*), terdiri dari:
  - a. Bantuan Khusus Murni (*Non matching Specific Grants*)
  - b. Bantuan Khusus Pendamping (*Matching Specific Grants*), terdiri dari *open ended* dan *close ended*. Bantuan jenis ini merupakan transfer yang mensyaratkan adanya porsi khusus berupa penyertaan modal dari sumber lain

Terkait dengan penggunaan "bantuan" (*Grant*) oleh pemerintah daerah, Feld dan Dede (2005) menyatakan bahwa *grant* dapat mencapai tujuannya apabila digunakan untuk melakukan investasi (seperti investasi infrastruktur dan SDM) sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Namun, jika pihak pemerintah daerah menggunakan dana tersebut lebih pada tujuan konsumsi

ataupun pengembangan industri lokal yang tidak kompetitif, *grant* tidak akan terlihat manfaatnya.

Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal akan dapat terlaksana dengan baik jika pemerintah pusat mampu melakukan pengawasan serta *enforcement*, dan pemerintah daerah memiliki keseimbangan dalam melaksanakan kewenangannya serta akuntabilitasnya. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara berkembang pada umumnya belum berjalan dengan baik. Penyebab utamanya adalah lemahnya kapasitas pemerintah daerah (Tanzi:1996), yang antara lain ditunjukkan oleh ketidakmampuan dalam memformulasikan dan menerapkan program secara efektif, tidak transparan, terjadinya kelebihan jumlah Pegawai Negeri Sipil, dan lain sebagainya.

### **2.2.2 Konsep dan Kondisi Desentralisasi Fiskal di Indonesia**

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia pada awalnya disebabkan oleh kurang jelasnya pengelolaan dana yang berasal dari pusat yang dialokasikan untuk daerah. Akibatnya, timbul berbagai permasalahan yang meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Dari segi perencanaan permasalahan ditimbulkan oleh terlalu dominannya pemerintah pusat dalam menyusun prioritas pembangunan di daerah. Dari segi pelaksanaan, pemerintah daerah diharuskan tunduk kepada berbagai arahan baik berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Sedangkan dari segi pengawasan, masalah yang timbul terutama disebabkan oleh terlalu banyaknya institusi pengawasan fungsional sehingga sering terjadi tumpang tindih (Budiono:2002).

Timbulnya berbagai permasalahan tersebut kemudian diakomodasi oleh pemerintah pusat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas diikuti dengan desentralisasi fiskal, dengan kabupaten dan kota sebagai ujung tombaknya. Hal ini ditandai dengan dengan ditetapkannya Undang-undang (selanjutnya di singkat UU) No.



22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (desentralisasi) administrasi dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara formal, UU No.32 tersebut merupakan upaya pelaksanaan otonomi daerah yang kesekian kalinya di Indonesia. Walaupun upaya otonomi daerah telah dimulai sejak jaman kolonialisme Belanda, namun pada prakteknya pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001. Hal ini ditandai dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan diikuti oleh desentralisasi di bidang keuangan (desentralisasi fiskal) yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Dalam UU No.33 Tahun 2004 tersebut, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didefinisikan sebagai *sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dan dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi, kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya*. Selanjutnya, dalam pasal 2 undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi<sup>5</sup> dan Tugas Pembantuan<sup>6</sup>.

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali

---

<sup>5</sup> Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Penugasan pemerintah pusat yang dilimpahkan melalui dekonsentrasi misalnya fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam wilayah kerjanya, penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, dan lain-lain

<sup>6</sup> Tugas Pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas Pembantuan diamanatkan dalam PP 106/2000

dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing (Sidik:2002). Sesuai dengan asas desentralisasi, sumber penerimaan bagi daerah tersebut meliputi: (i).Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii).Dana Perimbangan, serta (iii).Lain-Lain Pendapatan. Berikut penjelasannya.

### **1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

PAD didefinisikan sebagai *pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*, meliputi: a). Pajak daerah, b). Retribusi daerah, c).Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta d). Lain-lain pendapatan yang sah. Tujuan pemungutan PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

**a). Pajak Daerah** diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan peraturan pelaksanaannya dalam PP No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah memiliki beberapa ciri yaitu: (i). Merupakan iuran wajib yang dikenakan pada orang pribadi maupun badan; (ii).Ditetapkan berdasarkan Undang-undang; (iii).Tanpa imbalan (kontraprestasi) langsung yang seimbang; (iv).Dapat dipaksakan sesuai dengan aturan; (v). Hasilnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Walaupun memiliki ciri yang sama, namun ada perbedaan antara jenis-jenis pajak yang dipungut di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Pajak yang dipungut di tingkat propinsi bersifat limitatif, artinya pemerintah propinsi tidak diperbolehkan untuk memungut pajak selain yang ditetapkan, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBN-KB & KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT & AP). Menurut Sidik (2000), sifat limitatif ini disebabkan oleh terbatasnya kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dalam bidang

pemerintahan. Besarnya tarif untuk tiap pajak propinsi tersebut seragam untuk seluruh Indonesia, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2001. Dalam prakteknya, apabila hasil dari keempat pajak yang ditetapkan tersebut kurang memadai maka pemerintah propinsi diperbolehkan untuk tidak memungutnya.

Berbeda dengan pajak propinsi, pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, yaitu pihak pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menggali potensi pajak, selain ketujuh jenis pajak berikut: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian C, serta Pajak Parkir. Dalam menggali potensi pajak (selain ketujuh jenis pajak tersebut), harus mematuhi beberapa aturan, yaitu: i). Bersifat pajak dan bukan retribusi; ii). Obyek pajak terdapat di wilayah kabupaten/kota bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; iii). Obyek/dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan; iv). Bersifat umum; v). Bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat; vi). Potensinya memadai; vii). Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; viii). Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan ix). Menjaga kelestarian lingkungan

Seperti halnya pajak propinsi, besarnya tarif pajak yang dikenakan di tingkat kabupaten/kota juga tidak boleh melebihi dari tarif maksimum yang telah ditentukan oleh UU tersebut.

**b). Retribusi daerah** didefinisikan sebagai pembayaran atas jasa/ijin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi/badan. Retribusi daerah diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan peraturan pelaksanaannya dalam PP No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dalam PP tersebut retribusi daerah dibedakan atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. *Retribusi jasa umum* merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, yang terdiri dari retribusi: (i).Pelayanan kesehatan; (ii).Pelayanan kebersihan/ persampahan; (iii). Penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil; (iv).Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; (v).Pelayanan parkir di tepi jalan umum; (vi).Pelayanan pasar; (vii).Pengujian kendaraan bermotor; (viii).Pemeriksaan alat pemadam kebakaran; (ix).Penggantian biaya cetak peta; (x).Pengujian kapal perikanan. Sedangkan *Retribusi jasa usaha* adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, meliputi 13 jenis retribusi yaitu: (i).Pemakaian kekayaan daerah; (ii).Pasar grosir dan/atau pertokoan; (iii). Tempat pelelangan; (iv).Terminal; (v).Tempat parkir khusus; (vi).Tempat penginapan/pesanggrahan/villa; (vii).Penyedotan kakus; (viii).Rumah potong hewan; (ix).Pelayanan pelabuhan kapal; (x).Tempat rekreasi dan olahraga; (xi).Penyeberangan di atas air; (xii).Pengolahan limbah cair; (xiii).Penjualan produksi usaha daerah. Adapun *Retribusi perijinan tertentu* adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi/badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi jenis ini terdiri dari: (i).Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); (ii).Ijin tempat penjualan minuman beralkohol; (iii).Ijin gangguan;(iv).Ijin trayek.

**c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Yaitu terkait dengan hasil dari perusahaan milik daerah (BUMD). BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) didefinisikan sebagai *satu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, serta memupuk pendapatan.*

**d). Lain-lain pendapatan yang sah** meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga;

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; serta komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## **2. DANA PERIMBANGAN**

Merupakan dana yang bersumberkan dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **a. Dana Bagi Hasil (DBH)**

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang meliputi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam (SDA). Dana bagi hasil pajak berasal dari penerimaan: (i). Pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPODN) dan PPh pasal 21, dengan komposisi pemerintah pusat 20% dan pemda 80%; (ii). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan komposisi pemerintah pusat 10% dan pemda 90%; (iii). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan komposisi pemerintah pusat 20% dan pemda 80%. Sedangkan dana bagi hasil SDA berasal dari penerimaan: (i). Kehutanan, meliputi iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi; (ii). Pertambangan umum, meliputi iuran tetap (*landrent*) serta iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*); (iii). Perikanan, meliputi pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan; (iv). Pertambangan minyak dan gas bumi; (v). Pertambangan panas bumi. Dengan sistem bagi hasil seperti ini, maka disinyalir dapat berpotensi dalam mempertajam ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*), khususnya antara daerah penghasil dan non penghasil sumber daya. Penyebabnya adalah tidak meratanya kepemilikan sumber daya alam yang ditunjukkan dengan adanya beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar

seperti pertambangan, minyak bumi dan gas alam (migas) serta kehutanan. Selain itu juga potensi penerimaan daerah yang dibagi hasil-kan (seperti PBB, BPHTB dan PPH perorangan) secara signifikan juga hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja (Sidik:2002)

#### **b. Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan definisi tersebut jelas bahwa DAU ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan antar daerah (*horizontal imbalances*), agar dapat tercapai pemerataan kemampuan keuangan antar wilayah. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 UU No. 33 Tahun 2004, pengalokasian DAU mengikuti aturan:

- 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Adapun untuk penggunaannya, ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grant*).
- 2) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar Celah Fiskal (*Fiscal Gap*) dan alokasi dasar
- 3) Celah fiskal diperoleh dari selisih antara Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*) dengan Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*).
- 4) Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah

Dalam pengalokasian DAU juga mempertimbangkan adanya aturan tentang "dana penyesuaian", yaitu besarnya alokasi DAU untuk tiap-tiap daerah ditetapkan tidak lebih kecil dari tahun sebelumnya. Untuk daerah propinsi yang memperoleh DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya (*hold harmless*), akan dialokasikan Dana penyesuaian murni yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Efektivitas DAU sebagai alat untuk mengatasi masalah kesenjangan daerah, pernah diukur oleh Bambang W. Brodjonegoro dan Arlen T.Pakpahan dengan menggunakan metode Indeks Wiliamson.

Penghitungan dilakukan terhadap besarnya dana perimbangan yang diterima oleh tiap daerah per kapita, DAU per kapita, serta rasio antara kebutuhan dan kapasitas daerah pada tahun 2001. Hasilnya, ternyata alokasi DAU pada tahun 2001 telah berkontribusi dalam pemerataan kemampuan fiskal antar daerah terutama untuk tingkat kabupaten/kota sebesar 0,7, sedangkan propinsi sebesar 1,04. Menurut Samhadi (2005), besarnya indeks tersebut masih terlalu besar sehingga masih terlalu jauh dari kondisi pemerataan kemampuan fiskal yang diharapkan.

### ***c. Dana Alokasi Khusus (DAK)***

Adalah dana APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, meliputi:

- 1) Pendidikan, untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun
- 2) Kesehatan, untuk dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kabupaten/kota terutama kelompok kabupaten/kota dengan derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal
- 3) Infrastruktur, yaitu untuk meningkatkan tingkat pelayanan transportasi dan aksesibilitas, meningkatkan pelayanan jaringan irigasi untuk mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan pelayanan air bersih yang dikelola masyarakat
- 4) Kelautan dan perikanan, untuk meningkatkan prasarana dasar di bidang perikanan khususnya dalam menunjang pengembangan perikanan tangkap dan budidaya di daerah
- 5) Pertanian, untuk meningkatkan sarana/prasarana pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis
- 6) Prasarana pemerintahan daerah, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat dari pemekaran daerah
- 7) Lingkungan hidup, untuk mendukung kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup

Kegiatan yang menyangkut administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, serta perjalanan pegawai daerah, tidak dapat

dibiayai DAK. Ada tiga macam kriteria yang harus diikuti dalam mengalokasikan DAK, yaitu:

- 1) Kriteria Umum, yaitu DAK ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional mendapat alokasi DAK
- 2) Kriteria Khusus, meliputi:
  - Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yaitu otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua
  - Karakteristik wilayah, yaitu meliputi wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, tertinggal/terpencil, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan
  - Tambahan karakteristik wilayah sebagai hasil kesepakatan dari DPR dan Pemerintah yaitu: daerah rawan banjir/longsor, daerah penampung dan penerima pengungsi, daerah penerima transmigrasi, daerah pasca konflik, daerah rawan pangan/kekeringan, dan daerah yang memiliki pulau terluar.
  - Syarat lainnya bagi daerah penerima DAK adalah wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% dari DAK yang akan diterima
- 3) Kriteria Teknis, ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis yang dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana/prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan.

Dari segi jumlah perkembangan alokasi DAK dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan lima kali lipat, dari Rp2.269 juta (tahun 2003) menjadi Rp11.569 juta (tahun 2006)

### **3. LAIN-LAIN PENDAPATAN**

Berdasarkan Pasal 43 UU.No. 34/2004, lain-lain pendapatan meliputi pendapatan dari hibah dan dana darurat. Hibah didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk



devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Aturan mengenai dana hibah adalah sebagai berikut: (i). Dana hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat; (ii). Dana hibah yang berasal/bersumberkan dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah; (iii). Hibah dituangkan dalam naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah; (iv). Tata cara pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah baik yang bersumberkan dari dalam maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dana darurat didefinisikan sebagai dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis Solvabilitas yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Yang dimaksud dengan krisis Solvabilitas adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialami oleh daerah selama dua tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD.

Dari seluruh sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah tersebut diatas, secara umum konsep perimbangan keuangan pusat dan daerah terlihat dari semakin besarnya jumlah dana yang didaerahkan, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan makin besarnya porsi untuk daerah maka dapat diartikan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia lebih diutamakan pada aspek pengeluaran (*expenditure*). Hal ini didasari oleh beragamnya kondisi antar daerah yang terlihat dari jumlah dan kepadatan penduduk, kondisi geografis dan luas wilayah, kondisi serta potensi perekonomian wilayah, dan lain-lain. Dominasi *Dana Perimbangan* sebagai sumber APBD dari pemerintah daerah juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah menjadi kontra produktif. Seharusnya, sesuai dengan makna otonomi daerah yakni untuk mencapai kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, pihak pemerintah daerah juga diharapkan dapat mencapai kemandirian dalam hal pembiayaan (fiskal) yaitu dengan

bertumpu pada sumber-sumber pendapatan di daerahnya sendiri. Hal ini dapat dicapai apabila PAD menjadi sumber utama dalam penerimaan APBDnya. PAD yang saat ini didominasi oleh Pajak dan Retribusi Daerah belum dapat diandalkan secara optimal, karena adanya kendala dari segi peraturan perpajakan dan retribusi. Peraturan yang dimaksud adalah UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta undang-undang Perpajakan Nasional. Saat ini telah timbul pemikiran untuk merevisi peraturan-peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaan konsep perimbangan keuangan terdapat dua metode pokok yang digunakan sebagai dasarnya, yaitu:

1). *Expenditure Assignments*

Yaitu menghitung besarnya perkiraan pengeluaran yang harus ditangani oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi-fungsi yang telah didaerahkan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka Pemerintah Pusat hanya berwenang mengurus lima bidang saja, meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama dan bidang keuangan (fiskal dan moneter). Sedangkan bidang lainnya merupakan kewenangan serta tugas dari pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Walaupun fungsi yang harus ditangani oleh pemerintah daerah sudah cukup jelas, namun metode *expenditure assignments* ini belum bisa dilakukan secara optimal, sebab: 1). Belum jelasnya urusan minimal yang harus ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota untuk setiap bidang pelayanan; 2). Belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk setiap urusan mengakibatkan sulitnya untuk mengestimasi *Standard Spending Assessment*.

2). *Revenue Assignments*

Dengan metode ini diharapkan akan memberikan peningkatan kemampuan keuangan dari pemerintah daerah melalui alih sumber pembiayaan pusat ke daerah dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan. Metode ini dilakukan dengan berbagai

instrumen desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan seperti pajak daerah, bagi hasil, bantuan umum, bantuan khusus, dan lain-lain.

Dari uraian mengenai kedua metode diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan terhadap urusan minimal yang harus ditangani pemerintah kabupaten/kota serta disusunnya SPM merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar desentralisasi fiskal di Indonesia akan dapat berjalan dengan baik. Selain kedua faktor tersebut, dibutuhkan juga dukungan dari beberapa faktor berikut ini:

- 1) Pemerintah pusat mampu melaksanakan pengawasan serta *enforcement*
- 2) Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup kuat di dalam Pemerintah Daerah
- 3) Adanya keseimbangan serta kejelasan dalam hal pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pungutan pajak dan retribusi daerah

### **2.3 Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan Ekonomi Wilayah**

Terkait dengan isu desentralisasi fiskal, dalam beberapa tahun belakangan ini perhatian para pakar umumnya terfokus pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta efisiensi dari sistem desentralisasi fiskal. Namun demikian isu mengenai dampak dari desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan ekonomi wilayah juga sudah mulai banyak menarik perhatian para pakar. Ada dua argumen/pandangan yang saling bertolak belakang terkait dengan hal ini. *Pertama*, pandangan konvensional yang dimotori oleh Prud'homme (1995) menyatakan bahwa penerapan desentralisasi fiskal dapat *meningkatkan* kesenjangan antar wilayah. Hal ini bisa dijelaskan dengan alasan: 1).Terkait dengan penerapan pajak, apabila seluruh daerah baik kaya maupun miskin menerapkan tingkat pajak yang sama, sementara daerah kaya memiliki basis pajak yang lebih besar, daerah kaya otomatis akan mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih banyak, yang berakibat pada semakin meningkatnya

kesenjangan; 2). Untuk kualitas serta kuantitas pelayanan publik yang sama, daerah kaya otomatis akan menawarkan tingkat pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah miskin. Seperti halnya poin 1, hal ini akan menyebabkan para penanam modal akan lebih memilih daerah kaya untuk berinvestasi. Akibatnya, kesenjangan antar wilayah akan terus bertambah besar. Dengan demikian, sistem sentralisasi justru diperlukan untuk menghasilkan distribusi ekonomi wilayah yang lebih merata dengan cara menyalurkan sumber daya dari area yang relatif kaya ke area yang relatif miskin.

Pandangan yang kedua merupakan pandangan yang sedang berkembang saat ini, dikemukakan oleh beberapa pakar seperti Mc Kinnon (1995), Qian dan Weingast (1997), serta Akai dan Sakata (2005). Kebalikan dari pandangan yang pertama, pandangan ini justru menyatakan bahwa desentralisasi adalah sebagai *commitment device*, yang berarti bahwa desentralisasi fiskal bukan hanya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik akan tetapi juga dalam *mengurangi* tingkat kesenjangan antar wilayah. Menurut Akai dan Sakata, wilayah yang terdesentralisasi akan mempunyai *insentif* untuk makin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan usahanya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi, berarti jarak antara pemerintah dengan masyarakat menjadi semakin dekat. Kedekatan ini akan menjadikan pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan serta preferensi masyarakat setempat, sehingga penyediaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi lebih efisien. Disamping itu, pemerintah daerah juga dapat mengimplementasikan kebijakan ekonomi regional yang lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Kondisi inilah yang menyebabkan makin berkurangnya kesenjangan regional dalam sistem desentralisasi. Dilain pihak, redistribusi sumber daya dari wilayah yang relatif kaya kepada wilayah yang relatif miskin yang dilakukan dalam sistem sentralisasi justru

akan makin memperlemah kapasitas anggaran pemerintah serta makin mengurangi insentif yang akan diperoleh jika sistem desentralisasi diterapkan. Kedua pandangan yang saling bertolak belakang ini didukung oleh beberapa hasil penelitian baik di manca negara maupun di Indonesia.

### 2.3.1 Studi Terdahulu di Manca Negara

Penelitian mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan wilayah telah dilakukan beberapa pakar sejak tahun 2002. Berikut ini paparan penelitian dimanca negara yang hasilnya mendukung pandangan konvensional, yaitu penerapan desentralisasi fiskal *meningkatkan* kesenjangan wilayah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh *Kim, Hong* dan *Ha* pada tahun 2003 mengenai dampak dari kebijakan desentralisasi terhadap kesenjangan pendapatan wilayah di Korea dengan menggunakan data tahun 1971-1997. Desentralisasi diukur dengan proksi distribusi spasial dari pelayanan publik meliputi jaringan informasi, fasilitas transportasi dan ketersediaan air, lapangan pekerjaan serta pelayanan pendidikan. Kesenjangan pendapatan diukur dengan menggunakan metode *Indeks Gini*. Selain itu Kim dkk juga menggunakan beberapa variabel yang diduga berpengaruh pada kesenjangan pendapatan tersebut, atau yang disebut sebagai variabel kontrol, meliputi: PDB (Pendapatan Domestik Bruto), tingkat urbanisasi serta desentralisasi spasial. Kritik terhadap penelitian ini berkaitan dengan proksi yang digunakan dalam mengukur desentralisasi fiskal, yaitu distribusi spasial dari pelayanan publik, diduga belum mewakili esensi dari desentralisasi itu sendiri karena tidak dapat menangkap baik sisi pendapatan (*revenue*) maupun pengeluaran (*expenditure*).
2. Penelitian yang dilakukan oleh *Kanbur* dan *Zhang* pada tahun 2004 mengenai dampak dari desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan diantara propinsi di Cina dengan menggunakan data tahun 1952-1999. Desentralisasi diukur dengan cara menghitung rasio antara

pengeluaran (*expenditure*) pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah. Kesenjangan diukur dengan menggunakan dua metode yaitu metode *Indeks Gini* untuk mengukur kesenjangan secara keseluruhan, dan metode *dispersi entropy Indeks Theil* untuk mengukur kesenjangan antar wilayah desa-kota. Variabel kontrol yang digunakan meliputi: rasio industri berat dan rasio perdagangan/derajat keterbukaan (net ekspor).

Adapun penelitian yang hasilnya mendukung pandangan baru, yaitu penerapan desentralisasi fiskal justru *menurunkan* tingkat kesenjangan wilayah, meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh *Canaleta, Arzoz, Garate* dan *Orayen* pada tahun 2002 mengenai dampak dari desentralisasi fiskal dan desentralisasi politik terhadap kesenjangan ekonomi wilayah di 15 negara OECD. Untuk mengukur kesenjangan wilayah digunakan proksi PDB/pekerja, sedangkan desentralisasi fiskal diukur dengan 4 variabel, dan desentralisasi politik diukur dengan 5 variabel. Variabel desentralisasi politik meliputi federalisme, struktur konstitusi, Indeks Lijphart, institusi pluralisme dan institusi kendala. Federalisme merupakan variabel boneka (*dummy variable*), dimana dinyatakan dengan nilai 1 bagi negara federal dan nilai 0 bagi negara bukan federal. Sedangkan variabel desentralisasi fiskal meliputi kesulitan fiskal (*fiscal difficulty*), desentralisasi fiskal, sentralisasi fiskal dan otonomi finansial. Variabel kesulitan fiskal mengukur kapasitas dari pemerintah pusat dalam mempengaruhi kinerja ekonomi. Variabel desentralisasi fiskal mengukur rasio pendapatan pemerintah pusat terhadap total pendapatan selain dari luar negara dan pajak jaminan sosial. Sedangkan variabel otonomi finansial mengukur proporsi dari konsumsi akhir pemerintah lokal dan regional terhadap konsumsi akhir pemerintah secara umum. Adapun variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran sektor publik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh *Nobuo Akai* dan *Masayo Sakata* pada tahun 2005 mengenai keterkaitan antara desentralisasi fiskal

dengan kesenjangan antar negara bagian di Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang paling sistematis, efektif dan komprehensif, jika dibandingkan dengan penelitian lainnya yang sejenis. Hal ini dapat dilihat dari data *cross section* di tingkat negara bagian selama tahun 1993-2000 yang digunakan, dimana dalam data tersebut tidak ada perbedaan budaya dan histori yang substansial. Efektivitas pengukuran diperlihatkan dengan pemisahan pengukuran desentralisasi fiskal menjadi pendekatan pendapatan yang meliputi *autonomy indicator* dan *revenue indicator*, serta pendekatan pengeluaran yang meliputi *total expenditure indicator* dan *total expenditure revenue or production revenue indicator*. Sedangkan pengukuran kesenjangan wilayah dilakukan dengan menggunakan metode *Indeks Gini* dan *Indeks Williamson*. Variabel kontrol yang digunakanpun cukup komprehensif, yaitu meliputi: PDRB per kapita, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, rasio penduduk metropolitan, tingkat pendidikan, *share* sektor manufaktur terhadap PDRB, derajat keterbukaan efek politik, investasi, tingkat pengangguran, serta jumlah penduduk. Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, dengan pendekatan pengeluaran, tidak ada hubungan yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan kesenjangan wilayah. *Kedua*, dengan pendekatan pendapatan, terjadi korelasi negatif antara desentralisasi fiskal dengan kesenjangan wilayah, atau dengan kata lain desentralisasi fiskal berdampak menurunkan kesenjangan wilayah.

### **2.3.2 Studi Terdahulu di Indonesia**

Selain studi mancanegara, penelitian terhadap dampak penerapan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan ekonomi wilayah di Indonesia juga telah dilakukan, walaupun dari segi ruang lingkup waktu yang digunakan terbatas hanya pada masa setelah desentralisasi fiskal dilaksanakan (mulai tahun 2001). Hasil penelitian

di wilayah Indonesia pun sebagian ada yang mendukung pandangan konvensional dan sebaliknya.

**Tabel 2.2 Hasil Penelitian tentang Dampak Desentralisasi Fiskal (DF) terhadap Kesenjangan Wilayah di Indonesia**

Peneliti	Data	Variabel Desentralisasi Fiskal	Hasil
Esther Sri Astuti & Joko Tri Haryanto, (2007)	Data panel 30 propinsi di Indonesia tahun 2001-2004	<i>Autonomy Indicator (AI)</i> , yaitu <i>share</i> pendapatan pendapatan pemerintah daerah terhadap total pendapatan	DF <b>meningkatkan</b> kesenjangan
		<i>Revenue Indicator (RI)</i> , yaitu rasio pendapatan pemerintah daerah terhadap pendapatan pemerintah daerah dan pusat	DF <b>mengurangi</b> kesenjangan
		<i>Production Indicator (PI)</i> , yaitu rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah daerah dan pusat	DF <b>mengurangi</b> kesenjangan
Sri Wahyu Wijayanti (2006)	Data panel 30 propinsi di Indonesia tahun 2001-2004	<i>Autonomy Indicator (AI)</i> , yaitu rasio total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi (termasuk PAD kabupaten/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	DF <b>meningkatkan</b> kesenjangan
		<i>Revenue Indicator (RI)</i> , yaitu rasio total pendapatan setiap propinsi (termasuk pendapatan kabupaten/kota), terhadap seluruh total pendapatan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	DF <b>mengurangi</b> kesenjangan
		<i>Production Indicator (PI)</i> , yaitu rasio total pengeluaran setiap propinsi (termasuk pengeluaran kabupaten/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	DF <b>mengurangi</b> kesenjangan
		<i>Production &amp; Revenue Indicator (PRI)</i> , yaitu gabungan antara PI dan RI	DF <b>mengurangi</b> kesenjangan
Antonius Srandwi Nugrahanto (2007)	Data panel 30 propinsi di Indonesia tahun 2001-2004	<i>Expenditure Share</i> , yaitu rasio antara transfer terhadap total anggaran pemerintah daerah	DF <b>meningkatkan</b> kesenjangan
Iman Widhiyanto (2007)	Data panel 30 propinsi di Indonesia tahun 2001-2004	Rasio total pendapatan (termasuk transfer) terhadap total pengeluaran di tiap wilayah untuk tiap kabupaten/kota antar propinsi	DF <b>mengurangi</b> kesenjangan

Pada akhirnya, adanya dua pandangan yang saling bertolak belakang mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah yang disertai dengan berbagai penelitian pendukungnya, akan sangat tidak menguntungkan bagi para penyelenggara negara. Sebab, salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal adalah sebagai instrumen untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah, yang merupakan salah satu dari masalah utama pembangunan yang umumnya dihadapi oleh negara-negara di dunia.



### **BAB III**

#### **PROFIL KESENJANGAN WILAYAH DI TIAP PROPINSI**

Dalam bab ini akan diuraikan profil kesenjangan wilayah di tiap propinsi secara statistik deskriptif maupun tren/kecenderungannya pada periode sebelum (1994-2000) dan setelah (2001-2006) diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal. Pengukuran kesenjangan wilayah di tiap propinsi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *Indeks Williamson (Iw)* terhadap data PDRB perkapita tanpa migas di 26 (dua puluh enam) propinsi.

#### **3.1 Periode Sebelum Desentralisasi Fiskal (1994-2000)**

Jika dilihat dari nilainya secara keseluruhan, selama periode sebelum desentralisasi fiskal rata-rata Indeks Williamson di tiap propinsi di Indonesia adalah sebesar 0,466. Sedangkan nilai rata-rata pertahunnya dari mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 berkisar antara 0,448 sampai dengan 0,493. Selama periode tersebut dapat dilihat terjadinya kecenderungan peningkatan rata-rata kesenjangan wilayah di tiap propinsi tersebut. Hal ini juga sejalan dengan standar deviasi nilai *Iw* dari tahun 1994-2000 yang cenderung mengalami peningkatan dari 0,207 pada tahun 1994 menjadi 0,301 pada tahun 2000.

Dilihat dari intervalnya, nilai kesenjangan yang tertinggi (max) pada periode ini terdapat di Propinsi Papua, yaitu sebesar 1,65. Bila dirinci tiap tahun, maka nilai kesenjangan tertinggi (max) dari tahun 1994 – 1999 terdapat di Propinsi Jawa Timur, dan tahun 2000 di Propinsi Papua. Menurut aturan dari *Indeks Williamson*, nilai kesenjangan ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari batas atas yang ditentukan oleh Williamson (yaitu  $\geq 1$ ). Tingginya angka kesenjangan di Propinsi Papua terutama disebabkan oleh perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita yang sangat timpang antara Kabupaten Mimika dengan kabupaten lain yang ada di Papua. Kabupaten Mimika dengan kontribusi terbesar dari penambangan emas

*PT Freeport*, memiliki PDRB perkapita rata-rata empat belas kali lebih besar dari kabupaten lainnya di Papua. Sedangkan kesenjangan yang sangat tinggi di Propinsi Jawa Timur juga disebabkan oleh adanya perbedaan PDRB perkapita yang mencolok dari kota-kota yang relatif kaya dengan kabupaten/kota lainnya di propinsi tersebut. Kota-kota tersebut memiliki PDRB perkapita sangat besar, meliputi Kota Surabaya sebagai kota metropolitan, Kota Gresik dengan industrinya (terutama industri semen), serta Kota Kediri dengan industri rokoknya. Sedangkan tingkat kesenjangan wilayah terendah (minimum) pada tahun 1994-1996 terdapat di Propinsi Lampung dan pada tahun 1997-2000 terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.1 Statistik Deskriptif dari Indeks Williamson periode 1994-2000**

TAHUN	STATISTIK DESKRIPTIF			
	Mean	Minimum	Maximum	Standar Deviasi
1994-2000	0.466	0.16	1.65	0.237
1994	0.454	0.18	1.09	0.207
1995	0.448	0.17	1.09	0.222
1996	0.454	0.16	1.09	0.228
1997	0.469	0.18	1.14	0.225
1998	0.472	0.18	1.16	0.243
1999	0.470	0.17	1.20	0.248
2000	0.493	0.16	1.65	0.301

Sumber: hasil perhitungan

Sementara itu dari tabel 3.2 terlihat bahwa selama periode 1994-2000, dari seluruh propinsi yang dianalisa, terdapat 16 (enam belas) propinsi yang memiliki kecenderungan (tren) peningkatan kesenjangan, yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai *Iw*. Kecenderungan peningkatan tersebut berkisar antara 0,01 - 0,83. Peningkatan yang cukup besar (signifikan) dialami oleh Propinsi Papua (sebesar 0,83), Propinsi Jawa Barat (sebesar 0,17) dan Propinsi Lampung (0,16). Sedangkan 10 (sepuluh) propinsi lainnya memiliki kecenderungan (tren) penurunan kesenjangan, yang ditunjukkan oleh penurunan nilai *Iw* berkisar antara 0,01 - 0,27. Penurunan terbesar dialami oleh Propinsi Sumatera Barat (sebesar 0,27) dan Riau (sebesar 0,13).

**Tabel 3.2 Indeks Williamson (Iw) tiap Propinsi di Indonesia periode 1994-2000**

No.	Propinsi	TAHUN							
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
1	Prop. NAD	0.43	0.40	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	
2	Prop. Sumut	0.45	0.43	0.45	0.43	0.38	0.38	0.41	
3	Prop. Sumbar	0.66	0.65	0.62	0.61	0.41	0.41	0.39	
4	Prop. Riau	0.68	0.75	0.75	0.78	0.77	0.77	0.55	
5	Prop. Jambi*	0.27	0.26	0.26	0.26	0.30	0.31	0.31	
6	Prop. Sumsel*	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.45	
7	Prop. Bngkl*	0.32	0.31	0.33	0.33	0.34	0.35	0.33	
8	Prop. Lmpg*	0.18	0.17	0.16	0.34	0.35	0.36	0.34	
9	Prop. DKI*	0.39	0.40	0.42	0.43	0.49	0.50	0.44	
10	Prop. Jabar*	0.48	0.45	0.49	0.48	0.53	0.50	0.65	
11	Prop. Jateng*	0.71	0.71	0.72	0.72	0.78	0.74	0.75	
12	Prop. Yogya*	0.38	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.39	
13	Prop. Jatim*	1.09	1.09	1.09	1.14	1.16	1.20	1.12	
14	Prop. Kalbar	0.29	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.22	
15	Prop. Kalteng*	0.24	0.25	0.26	0.27	0.27	0.26	0.33	
16	Prop. Kalsel	0.45	0.33	0.31	0.36	0.36	0.37	0.40	
17	Prop. Kaltim	0.58	0.54	0.55	0.54	0.54	0.54	0.56	
18	Prop. Sulut*	0.38	0.39	0.41	0.60	0.43	0.44	0.42	
19	Prop. Sulteng	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	
20	Prop. Sulsel*	0.46	0.46	0.46	0.50	0.43	0.45	0.53	
21	Prop. Sultra*	0.30	0.34	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	
22	Prop. Bali	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.34	
23	Prop. NTB	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.51	0.55	
24	Prop. NTT*	0.31	0.36	0.38	0.36	0.34	0.33	0.33	
25	Prop. Maluku*	0.43	0.33	0.33	0.35	0.53	0.45	0.48	
26	Prop. Papua*	0.82	0.95	1.01	0.96	1.14	1.16	1.65	

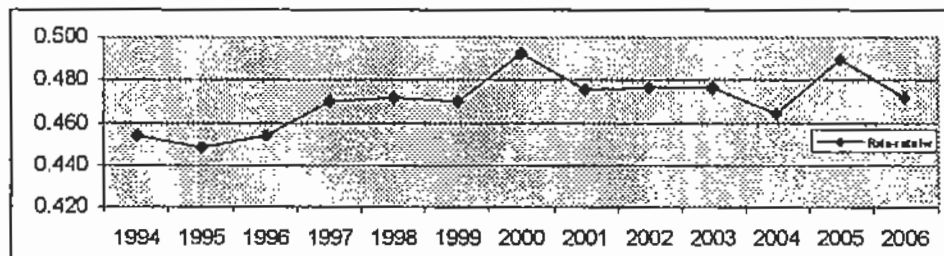
Sumber: hasil perhitungan

Keterangan: \* Propinsi yang memiliki kecenderungan peningkatan Iw

### 3.2 Periode Setelah Desentralisasi Fiskal (2001-2006)

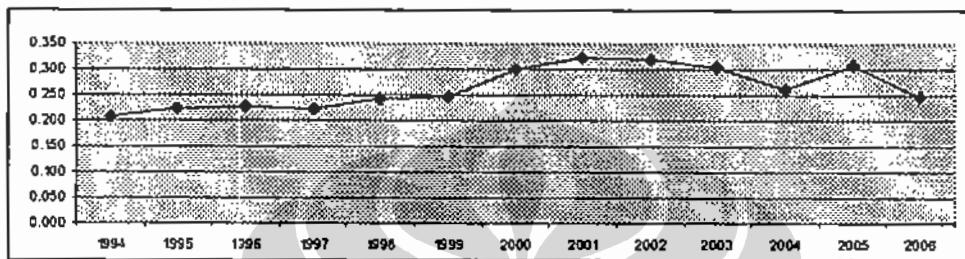
Dibandingkan dengan periode sebelumnya, rata-rata Iw di tiap propinsi pada periode setelah desentralisasi fiskal (2001-2006) mengalami peningkatan sebesar 0,01 yaitu menjadi 0,476. Sedangkan jika dilihat dari kisaran nilai rata-rata Iw pertahunnya antara 0,464 – 0,490. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada periode desentralisasi fiskal ini justru terjadi kecenderungan penurunan rata-rata tingkat kesenjangan wilayah, walaupun pada tahun 2005 rata-ratanya sempat naik menjadi 0,490.

**Gambar 3.1 Rata-rata Indeks Williamson (Iw) tahun 1994-2006**



Fenomena yang sama juga terjadi pada standar deviasi. Berbeda dengan periode sebelumnya dimana terjadi kecenderungan peningkatan standar deviasi, maka pada periode setelah desentralisasi fiskal ini yang terjadi sebaliknya, yaitu terjadi kecenderungan menurunnya standar deviasi nilai Iw dari 0,29 pada tahun 2001 menjadi 0,24 pada tahun 2006.

**Gambar 3.2 Standar Deviasi Indeks Williamson (Iw) tahun 1994-2006**



Seperti halnya periode sebelumnya, nilai kesenjangan tertinggi (max) pada periode ini masih terdapat di Propinsi Papua, yaitu sebesar 1,72. Nilai ini 0,07 lebih tinggi dari nilai tertinggi pada periode sebelumnya. Nilai kesenjangan tertinggi untuk tiap tahunnya (2001-2006) seluruhnya juga terdapat di Propinsi Papua, berkisar antara 1,18 sampai dengan 1,72. Selain Propinsi Papua, seperti halnya kondisi pada periode sebelumnya, nilai kesenjangan di Propinsi Jawa Timur juga masih relatif tinggi. Penyebab tingginya tingkat kesenjangan di kedua propinsi tersebut masih sama dengan periode sebelumnya. Tingkat kesenjangan wilayah terendah (minimum) masih terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah (2001,2002,2006). Propinsi Lampung yang memiliki tingkat kesenjangan terendah pada periode sebelumnya digantikan posisinya oleh Propinsi Kalimantan Barat (2003-2005).

**Tabel 3.3 Statistik Deskriptif dari Indeks Williamson periode 2001-2006**

TAHUN	STATISTIK DESKRIPTIF			
	Mean	Minimum	Maximum	Standar Deviasi
2001-2006	0.476	0.13	1.72	0.29
2001	0.476	0.15	1.72	0.32
2002	0.477	0.13	1.70	0.32
2003	0.476	0.19	1.66	0.30
2004	0.464	0.19	1.35	0.26
2005	0.490	0.18	1.60	0.31
2006	0.472	0.15	1.18	0.24

Sumber: hasil perhitungan

Dari tabel 3.4 terlihat bahwa jumlah propinsi yang memiliki kecenderungan (tren) peningkatan kesenjangan pada periode setelah desentralisasi fiskal sebanyak 12 (duabelas) propinsi, berkurang 4 propinsi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tren peningkatan yang terjadi berkisar antara 0,03 -0,29, berarti jauh lebih rendah dari periode sebelumnya. Peningkatan yang terbesar dialami oleh Propinsi Bali (0,29) dan Propinsi NAD (0,18). Propinsi lainnya yang nilai Iw-nya sama meliputi 3 propinsi yaitu Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan 11 (sebelas) propinsi lainnya memiliki kecenderungan (tren) penurunan kesenjangan, berkisar antara 0,01-0,54. Penurunan terbesar dialami oleh Propinsi Papua (sebesar 0,54) dan Propinsi Riau (sebesar 0,15).

**Tabel 3.4 Indeks Williamson (Iw) tiap Propinsi di Indonesia periode 2001-2006**

No.	Propinsi	TAHUN					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Prop. NAD*	0.22	0.40	0.26	0.22	0.57	0.40
2	Prop. Sumut*	0.41	0.40	0.40	0.41	0.42	0.48
3	Prop. Sumbar	0.38	0.38	0.39	0.40	0.37	0.36
4	Prop. Riau	0.54	0.44	0.43	0.43	0.41	0.39
5	Prop. Jambi*	0.32	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35
6	Prop. Sumsel	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38
7	Prop. Bngkl*	0.32	0.34	0.36	0.35	0.35	0.37
8	Prop. Lmpg*	0.20	0.19	0.21	0.21	0.22	0.23
9	Prop. DKI*	0.45	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49
10	Prop. Jabar*	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.68
11	Prop. Jateng	0.75	0.71	0.72	0.74	0.76	0.75
12	Prop. Yogya	0.39	0.40	0.41	0.41	0.39	0.38
13	Prop. Jatim	1.12	1.14	1.09	1.10	1.22	1.09
14	Prop. Kalbar	0.22	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17
15	Prop. Kalteng	0.33	0.31	0.30	0.22	0.23	0.23
16	Prop. Kalsel*	0.42	0.42	0.42	0.41	0.43	0.43
17	Prop. Kaltim	0.34	0.26	0.25	0.31	0.30	0.30
18	Prop. Sulut*	0.42	0.45	0.45	0.46	0.45	0.49
19	Prop. Sulteng	0.15	0.13	0.31	0.30	0.28	0.15
20	Prop. Sulsel*	0.59	0.57	0.61	0.59	0.60	0.62
21	Prop. Sultra*	0.28	0.33	0.36	0.41	0.41	0.42
22	Prop. Bali*	0.35	0.41	0.36	0.36	0.35	0.64
23	Prop. NTB	0.59	0.59	0.58	0.58	0.56	0.54
24	Prop. NTT	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
25	Prop. Maluku	0.45	0.40	0.41	0.42	0.43	0.42
26	Prop. Papua	1.72	1.70	1.66	1.35	1.60	1.18

Sumber: hasil perhitungan

Keterangan: \* Propinsi yang memiliki kecenderungan peningkatan Iw

Pada akhirnya, perubahan kondisi/profil tentang kesenjangan wilayah yang diuraikan diatas, baik dalam periode sebelum maupun

setelah kebijakan desentralisasi fiskal, belum dapat disimpulkan apakah disebabkan oleh kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri ataupun faktor-faktor lainnya. Untuk lebih jelasnya, perbandingan kondisi/profil kesenjangan wilayah di tiap propinsi tersebut dirangkum pada tabel berikut.

**Tabel 3.5 Perbandingan kondisi kesenjangan pada periode Sebelum dan Setelah Kebijakan Desentralisasi Fiskal**

No	Profil Kesenjangan Wilayah	Periode Sebelum DF (1999-2000)	Periode Setelah DF (2001-2006)
1.	Rata-rata Iw per periode	0,466	0,476
2.	Kisaran rata-rata indeks Iw per tahun	0,448 - 0,493	0,464 - 0,490
3.	Tren rata-rata Iw per tahun	Mengalami peningkatan	Mengalami penurunan
4.	Standar Deviasi per periode	0,237	0,290
5.	Kisaran Standar Deviasi pertahun	0,207 - 0,301	0,245 - 0,318
6.	Minimum	0,16 (Prop Lampung)	0,13 (Prop. Sulawesi Tengah)
7.	Maximum	1,65 (Prop Papua)	1,72 (Prop Papua)
8.	Tren peningkatan kesenjangan	Terjadi di 16 propinsi dengan interval kenaikan berkisar 0,01-0,83	Terjadi di 12 propinsi dengan interval kenaikan berkisar 0,03 - 0,29
9.	Tren turunnya kesenjangan	Terjadi di 10 propinsi dengan interval penurunan berkisar antara 0,01 - 0,27	Terjadi di 11 propinsi dengan interval penurunan berkisar antara 0,01 - 0,54

## **BAB IV**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesenjangan ekonomi wilayah propinsi di Indonesia ini, analisa dilakukan secara komprehensif yaitu secara ekonomi, ekonometrik dan statistik. Teori ekonomi yang relevan digunakan sebagai dasar untuk model yang akan digunakan serta untuk menganalisa hubungan dari masing-masing variabel dalam model. Untuk menganalisa efektivitas serta efisiensi model dilakukan secara ekonometrik. Sedangkan analisa statistik berupa deskripsi, digunakan dalam menggambarkan kondisi tiap-tiap variabel yang termasuk dalam jangka waktu penelitian.

#### **4.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, ruang lingkup pengamatan terhadap data statistik yang tersedia adalah sebagai berikut:

1. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 1994-2006. Dengan mempergunakan periode ini maka diharapkan akan terlihat kondisi pra desentralisasi fiskal (1994-2000) serta pasca desentralisasi fiskal (2001-2006).
2. Lingkup wilayah penelitian dibatasi pada seluruh propinsi yang terdapat di Indonesia berdasarkan kondisi tahun 1999, yaitu sebanyak 26 propinsi, yang meliputi: Propinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD), Propinsi Sumatera Utara (Sumut), Propinsi Sumatera Barat (Sumbar), Propinsi Riau, Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Propinsi Bengkulu, Propinsi Lampung, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat (Jabar), Propinsi Jawa Tengah (Jateng), Propinsi DI Yogyakarta, Propinsi Jawa Timur (Jatim), Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Propinsi Sulawesi Utara (Sulut), Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Propinsi Sulawesi Selatan

(Sulsel), Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Propinsi Maluku, dan Propinsi Papua. Sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, telah terjadi pemekaran di 7 propinsi, yaitu: Propinsi Banten (asalnyanya dari Propinsi Jawa Barat), Propinsi Bangka Belitung (asalnyanya dari Propinsi Sumatera Selatan), Propinsi Gorontalo (asalnyanya dari Propinsi Sulawesi Utara), Propinsi Maluku Utara (asalnyanya dari Propinsi Maluku), Propinsi Papua Barat (asalnyanya dari Propinsi Papua), Propinsi Kepulauan Riau (asalnyanya dari Propinsi Riau), dan Propinsi Sulawesi Barat (asalnyanya dari Propinsi Sulawesi Tengah). Setelah terjadi pemekaran, analisa dilakukan dengan cara menggabungkan propinsi hasil pemekaran tersebut dengan propinsi asalnyanya. Penggabungan propinsi tersebut dilakukan karena keterbatasan data yang tersedia. Untuk mengantisipasi dampak dari penggabungan tersebut, maka digunakan *dummy variabel* (variabel boneka) pemekaran.

#### 4.2 Spesifikasi Model

Dalam mengukur *hubungan keterkaitan* antara indikator-indikator desentralisasi fiskal dan variabel-variabel kontrol dengan kesenjangan ekonomi antar wilayah, akan mengacu pada model yang digunakan dalam penelitian Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2005). Pemilihan acuan model didasarkan pada pertimbangan bahwa dari berbagai penelitian terkait yang telah dilakukan, model yang digunakan dalam penelitian dari Nobuo Akai dan Masayo Sakata merupakan model yang paling sistematis, efektif dan komprehensif. Hal ini terlihat dari pemilihan indikator desentralisasi fiskalnya yang meliputi indikator penerimaan dan pengeluaran; keberagaman variabel kontrol yang digunakan; serta karakteristik data yang digunakan. Proses estimasi akan dilakukan dengan menggunakan program *Eviews*. Berikut model teoritik yang menyatakan hubungan keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan kesenjangan ekonomi antar propinsi:

$$I_w = (DF, VC)$$



dimana:

$I_w$  = Kesenjangan wilayah dalam propinsi diukur dengan *Indeks Williamson*

DF = Indikator Desentralisasi Fiskal

VC = Variabel Kontrol, yaitu variabel yang diduga mempengaruhi tingkat kesenjangan wilayah di dalam propinsi

**Desentralisasi Fiskal** dinyatakan dalam lima (4)<sup>1</sup> indikator berikut:

1. **Indikator AI (*Autonomy Indicator*)**, yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD propinsi (termasuk kabupaten/kota yang ada di wilayahnya) terhadap total penerimaan seluruh propinsi dan kabupaten/kota. Indikator ini dimaksudkan untuk melihat independensi fiskal Pemerintah Propinsi. Penerimaan pemerintah dari pinjaman tidak dimasukkan.
2. **Indikator RI (*Revenue Indicator*)**, yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total penerimaan setiap propinsi (termasuk penerimaan seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayahnya) terhadap total penerimaan seluruh propinsi, kabupaten/kota dan pusat. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kewenangan yang dimiliki pemerintah propinsi atas dasar total penerimaan yang diperoleh melalui berbagai sumber penerimaan.
3. **Indikator PI (*Expenditure/Production Indicator*)**, yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap propinsi (termasuk pengeluaran seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayahnya) terhadap total pengeluaran seluruh propinsi, kabupaten/kota, dan pusat. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar ukuran kewenangan pemerintah propinsi atas dasar alokasi pengeluaran yang digunakan.
4. **Indikator Belanja Pembangunan**, yakni mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total belanja pembangunan (termasuk belanja pembangunan kabupaten/kota di wilayahnya) terhadap total

<sup>1</sup> Indikator 1-3 diambil dari penelitian Nobuo Akai dan Masayo Sakata, di mana indikator 1-2 termasuk dalam pendekatan total penerimaan daerah, dan indikator 3 termasuk dalam pendekatan total pengeluaran daerah. Indikator 1 dimaksudkan sebagai proksi untuk mengukur *Autonomy Power*, sedangkan indikator 2 dan 3 untuk mengukur *Authority Power*. Sedangkan indikator ke-4, yang juga termasuk dalam pendekatan pengeluaran daerah, merupakan indikator tambahan yang dimaksudkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dilihat dari alokasi belanja pembangunan.

belanja/pengeluaran di tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang ada diwilayahnya. Indikator ini merupakan indikator tambahan yang dimaksudkan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota membelanjakan dana APBDnya. Asumsinya, semakin besar rasio belanja pembangunan terhadap total belanja, maka semakin besar perhatian ataupun komitmen pemerintah daerah terhadap kepentingan publik (masyarakat). Karena belanja pembangunan ini seringkali terlambat dalam hal pencairan serta penggunaannya, maka untuk indikator belanja pembangunan ini juga akan dilakukan dengan model lag satu tahun.

**Variabel Kontrol** adalah variabel yang diduga mempengaruhi kesenjangan ekonomi di tiap-tiap wilayah propinsi di Indonesia selain variabel Desentralisasi Fiskal. Dalam studi ini variabel kontrol yang digunakan mengacu pada studi Nobuo Akai dan Masayo Sakata:

1. PDRB per Kapita (berdasarkan harga konstan)

Secara teoretis variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menurunkan ataupun meningkatkan kesenjangan wilayah. Menurut Kuznet, perkembangan kondisi kesenjangan wilayah mengikuti bentuk kurva U terbalik (*inverted U*). Pada tahap awal pembangunan ketimpangan pendapatan antar wilayah akan meningkat, untuk kemudian makin stabil. Pada tahap selanjutnya, ketimpangan pendapatan antar wilayah tersebut akan menurun. Berbeda dengan hipotesa Kuznet, Amos (1988) menyatakan bahwa perkembangan ketimpangan antar wilayah tersebut dimulai dengan peningkatan tingkat kesenjangan, yang kemudian diikuti dengan menurunnya tingkatnya kesenjangan, dan pada akhirnya kesenjangan wilayah akan kembali meningkat.

2. Struktur Industri, diukur dari rasio PDRB sektor manufaktur (sektor konstruksi dan manufaktur) terhadap total PDRB. Menurut Kuznet (Borjas dan Ramey dalam Akai), koefisien rasio manufaktur akan memiliki tanda negatif. Ekonomi yang berbasis sektor pertanian akan memiliki kesenjangan yang lebih tinggi, sementara sektor

manufaktur akan memiliki hubungan dengan arah negatif (berbanding terbalik) dengan tingkat kesenjangan. Hal ini terjadi karena sektor manufaktur menyediakan kesempatan kepada tenaga kerja dengan keahlian rendah (*less-skilled workers*) untuk memperoleh upah lebih besar daripada di sektor pertanian.

3. Aglomerasi Penduduk, diukur dari rasio penduduk *urban* (perkotaan) terhadap total penduduk. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Partridge, Rickman dan Levernier (Akai:2006), terpusatnya kegiatan produksi dalam industri serta jasa di daerah perkotaan akan menyebabkan meningkatnya kesenjangan antar wilayah. Sementara itu, Kuznet mengemukakan bahwa urbanisasi sering dijadikan sebagai ukuran pembangunan ekonomi, makin besar persentase penduduk urban akan dapat mengurangi kesenjangan wilayah. Dengan demikian, koefisien rasio penduduk *urban* ini bisa negatif ataupun positif.
4. Faktor Mobilitas Penduduk berupa ketersediaan jalan, diukur dari rasio panjang jalan terhadap luas wilayah. Penambahan/pembangunan infrastruktur jalan akan semakin meningkatkan aksesibilitas, yang pada akhirnya akan menyebabkan turunnya biaya transportasi. Sehingga, timbul aglomerasi industri yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas dalam wilayah. Menurut Dunford (Akai:2005) kesenjangan regional dipengaruhi oleh produktivitas wilayah dan tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi struktur upah masyarakat setempat melalui perubahan dalam produktivitas regional. Dengan demikian, koefisien rasio panjang jalan ini bisa negatif ataupun positif.
5. Kepemilikan Modal/Kapital berupa investasi, diukur dari rasio PMTDB (Penanaman Modal Tetap Domestik Bruto) terhadap total PDRB. Seperti yang dikemukakan oleh Fujita, Krugman dan Venables (Akai:2005), pada saat ekonomi terbuka dari pasar dunia, kesenjangan regional akan terpengaruh. Globalisasi ekonomi akan mengubah *comparative advantage* dan pola lokasi. Karena dampak

dari globalisasi sangat bervariasi maka koefisien investasi ini bisa negatif ataupun positif.

6. Derajat Keterbukaan (*Openness*), diukur dari rasio net ekspor (nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor) terhadap total PDRB. Secara teoritis makin terbuka suatu daerah terhadap perdagangan dengan daerah lainnya, maka akan semakin memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh hasil studi dari Barro yang menunjukkan bahwa proteksi perdagangan justru akan mengurangi tingkat pertumbuhan wilayah. Karena besarnya rasio net ekspor ini sangat bervariasi antar wilayah, maka koefisiennya bisa negatif ataupun positif.

Seluruh indikator desentralisasi fiskal, variabel kontrol serta derajat kesenjangan tersebut kemudian dinyatakan dalam hubungan model matematis sebagai berikut:

**Model 1:**

$$I_w = \alpha_0 + \beta_1 LAI + \beta_2 LCAP + \beta_3 LMANUF + \beta_4 LURBAN + \beta_5 LROAD + \beta_6 LINVS + \beta_7 OPENNES + \beta_8 DUMMY\_K + \beta_9 DUMMY\_P + \epsilon_1$$

**Model 2:**

$$I_w = \alpha_0 + \beta_1 LRI + \beta_2 LCAP + \beta_3 LMANUF + \beta_4 LURBAN + \beta_5 LROAD + \beta_6 LINVS + \beta_7 OPENNES + \beta_8 DUMMY\_K + \beta_9 DUMMY\_P + \epsilon_1$$

**Model 3:**

$$I_w = \alpha_0 + \beta_1 LPI + \beta_2 LCAP + \beta_3 LMANUF + \beta_4 LURBAN + \beta_5 LROAD + \beta_6 LINVS + \beta_7 OPENNES + \beta_8 DUMMY\_K + \beta_9 DUMMY\_P + \epsilon_1$$

**Model 4:**

$$I_w = \alpha_0 + \beta_1 LDE + \beta_2 LCAP + \beta_3 LMANUF + \beta_4 LURBAN + \beta_5 LROAD + \beta_6 LINVS + \beta_7 OPENNES + \beta_8 DUMMY\_K + \beta_9 DUMMY\_P + \epsilon_1$$

**Model 5:**

$$I_w = \alpha_0 + (DE-1) + \beta_2 LCAP + \beta_3 LMANUF + \beta_4 LURBAN + \beta_5 LROAD + \beta_6 LINVS + \beta_7 OPENNES + \beta_8 DUMMY\_K + \beta_9 DUMMY\_P + \epsilon_1$$

**DIMANA:**

- $I_w$  : Logaritma natural dari derajat kesenjangan antar wilayah di tiap propinsi yg diukur dengan *Index Williamson* tertimbang tingkat propinsi
- $LAI$  : Logaritma natural (ln) *Autonomy Indicator*, yaitu logaritma natural dari indikator desentralisasi fiskal dari sisi otonomi yang diukur sebagai rasio penerimaan pemerintah propinsi (termasuk pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya) yang bersumber dr PAD terhadap total penerimaan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya
- $LRI$  : Logaritma natural (ln) *Revenue Indicator*, yaitu logaritma natural dari indikator desentralisasi fiskal dari sisi total penerimaan daerah yang diukur sebagai rasio

		<u>total penerimaan</u> pemerintah propinsi terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
LPI	:	Logaritma natural (ln) <i>Production Indicator</i> , yaitu logaritma natural dari indikator desentralisasi fiskal dari sisi total pengeluaran daerah yang diukur sebagai <u>rasio total pengeluaran</u> pemerintah propinsi (termasuk pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya
LDE	:	Logaritma natural (ln) <i>Development Expenditure</i> , yaitu logaritma natural dari Indikator desentralisasi fiskal yang diukur sebagai <u>rasio belanja pembangunan</u> setiap pemerintah propinsi (termasuk pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya) terhadap total seluruh belanja/pengeluaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya
(DE-1)	:	<i>Lag dari Development Expenditure</i>
LCAP	:	Logaritma Natural dari <u>PDRB perkapita propinsi (berdasarkan harga konstan)</u>
LMANUF	:	Logaritma Natural dari <u>struktur industri</u> , yang diukur dari rasio PDRB sektor manufaktur (sektor konstruksi dan manufaktur) terhadap total PDRB propinsi
LURBAN	:	Logaritma Natural dari <u>aglomerasi penduduk</u> , yang diukur dari rasio penduduk perkotaan ( <i>urban</i> )
LROAD	:	Logaritma Natural dari <u>faktor mobilitas penduduk</u> berupa ketersediaan Infrastruktur jalan yang diukur dengan rasio antara panjang jalan dengan luas wilayah propinsi
LINVS	:	Logaritma Natural dari <u>kepemilikan moda/kapital</u> berupa Investasi yang diukur dengan rasio PMTDB (Penanaman Modal Tetap Dalam Negeri) terhadap PDRB propinsi
LOPENNES	:	Logaritma Natural dari <u>derajat keterbukaan</u> yang diukur dengan rasio net ekspor terhadap total PDRB propinsi
DUMMY_K	:	<i>Dummy variabel</i> (variabel boneka) dari <u>variabel kebijakan</u> , dimana D = 1, sesudah kebijakan desentralisasi fiskal (2001-2006) D = 0, sebelum kebijakan desentralisasi fiskal (1994-2000)
DUMMY_P	:	<i>Dummy variabel</i> (variabel boneka) <u>variabel pemekaran</u> , untuk masing-masing propinsi yang memiliki pemekaran, dimana: D = 1, sesudah pemekaran D = 0, sebelum pemekaran

### 4.3 Sumber dan Jenis Data

Seluruh data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti BPS, Departemen Keuangan dan Bank Dunia. Disamping itu, bentuk data yang dipergunakan seluruhnya juga berbentuk data panel (*pooled data* atau *longitudinal data*) 26 propinsi tahun 1994-2006. Penggunaan data panel tingkat propinsi yang merupakan gabungan dari bentuk data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (silang) ini diharapkan bisa memperlihatkan hubungan antar variabel secara lebih baik dan menyeluruh. Data panel juga digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan jumlah observasi dalam analisis data *time series* dan/atau *cross section*.

**Tabel 4.1 Sumber dan Jenis Data**

Sumber Data	Jenis Data
Departemen Keuangan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota/propinsi
World Bank	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota/propinsi
BPS	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di tingkat propinsi berdasarkan harga konstan dan harga berlaku
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di tingkat kabupaten/kota berdasarkan harga konstan
	Jumlah Penduduk total tiap kabupaten/kota
	Jumlah Penduduk perkotaan tiap kabupaten/kota
	Panjang Jalan tiap propinsi
	Luas wilayah tiap propinsi
	PDRB berdasarkan sektor di tiap propinsi
	Penanaman Modal Tetap Dalam Negeri (PMTDB) tiap propinsi
	Nilai ekspor dan impor tiap propinsi

#### 4.4 Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, metode yang digunakan untuk menghitung kesenjangan ekonomi di tiap wilayah propinsi periode 1994-2006 dengan Indeks Williamson. Kedua, untuk melihat dampak dari desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan tersebut, yaitu menggunakan metode regresi data panel yang sesuai dengan karakteristik data.

##### 4.4.1 Penghitungan Kesenjangan Ekonomi Regional

Untuk mengukur kesenjangan ekonomi wilayah di tingkat propinsi akan digunakan metode *Indeks Williamson*. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan kemudahan serta kepraktisan dalam penggunaannya, disamping juga ketersediaan data untuk analisa. Berikut ini formula dari *Indeks Williamson* dalam menghitung kesenjangan ekonomi yang terjadi di tiap-tiap propinsi:

$$I_w = \frac{1}{Y} \sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 * f_i / N}$$

dimana:

- $I_w$  = Indeks Williamson tingkat propinsi
- $Y_i$  = Pendapatan perkapita kabupaten/kota i
- $Y$  = Rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota yang terdapat dalam suatu wilayah propinsi
- $f_i$  = Populasi kabupaten/kota i
- $N$  = Total populasi kabupaten/kota dalam suatu propinsi

#### 4.4.2 Penghitungan Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan Ekonomi Regional

Untuk menganalisa dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan ekonomi regional akan digunakan metode regresi data panel. Dengan metode tersebut maka akan diperoleh besarnya parameter ( $\alpha$  dan  $\beta$ ) serta arah keterkaitannya (negatif/positif). Dilihat dari asumsi yang mendasari serta faktor pembentuknya, metode estimasi regresi data panel terdiri dari:

**1). Metode *Common Effect* (atau *Pooled Least Square*)**, yaitu metode estimasi dimana besarnya parameter  $\alpha$  dan  $\beta$  adalah sama untuk setiap individu. Karena semua individu dianggap sama atau homogen, maka dalam metode ini akan sulit untuk melihat perubahan yang terjadi diantara para individu.

**2). Metode *Individual Effect***, yaitu metode estimasi parameter dengan memperhatikan sifat dari individu, namun tanpa memperhatikan struktur kovarian *error term* nya. Metode ini terbagi menjadi:

**a. *Fixed Effect* (Efek Tetap) atau *Covariance Model* atau *Least Square Dummy Variable***, yaitu metode estimasi dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variabel*). Adanya variabel boneka ini merupakan bentuk generalisasi yang sering dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam pendekatan metode kuadrat terkecil (OLS) biasa, yaitu berupa asumsi parameter (baik intersep maupun slope) dari persamaan regresi yang dianggap konstan. Sedangkan *Fixed Effect Model* mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diketahui melalui perbedaan dari nilai intersep. Kelemahan dari model ini terjadi pada saat data individu yang digunakan cukup banyak, yang akan menyebabkan variabel boneka juga akan semakin banyak. Penambahan variabel boneka ini akan mengurangi derajat kebebasan (*degree of freedom*), yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dari parameter yang diestimasi.

**b. *Random Effect* (Efek Acak) atau *Error Component Model***, yaitu dengan memasukkan parameter yang berbeda antar waktu/daerah ke dalam *error*. Asumsinya, baik *error* secara individual maupun *error*

kombinasinya tidak saling berkorelasi. Penggunaan model efek acak dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan, sehingga parameter yang merupakan hasil estimasi akan semakin efisien.

Untuk memilih metode estimasi data panel yang tepat digunakan, apakah *common effect*, *fixed effect* atau *random effect*, dapat dilakukan secara teoretis maupun perhitungan statistik. Secara teoretis, apabila dampak dari gangguan diasumsikan bersifat acak, maka yang dipilih adalah model *Random Effect*; sebaliknya, apabila dampak dari gangguan diasumsikan memiliki pengaruh yang tetap (yaitu dianggap sebagai bagian dari intersep), maka yang dipilih adalah model *Fixed Effect*. Jika dampak dari gangguan tidak dapat dapat ditentukan, dan data yang digunakan baik meliputi seluruh individu dalam populasi ataupun hanya berupa sampel namun *tidak diambil secara acak*, maka yang digunakan adalah model *Fixed Effect*. Juga sebaliknya, bila data yang digunakan tersebut diambil berdasarkan sampel secara acak dari populasi yang besar, maka yang digunakan adalah model *Random Effect*.

Pemilihan metode estimasi data panel yang tepat digunakan dapat dilakukan dengan cara melakukan uji statistik, yaitu:

**a). *Common Effect* dan *Fixed Effect***

Untuk memilih metode yang tepat diantara kedua metode tersebut dapat dilakukan dengan *Chow Test* ataupun Uji F. Dari hasil perhitungan (baik dengan menggunakan program komputer untuk *Chow Test* ataupun penghitungan secara manual untuk Uji F), jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka model yang digunakan adalah model *Fixed Effect*, dan sebaliknya.

**b). *Fixed Effect* dan *Random Effect***

Pengujian yang dilakukan untuk memilih metode yang tepat diantara kedua metode diatas adalah dengan *Hausman test* (dengan  $w$  merupakan nilai tes *Chi squared*). Dalam *Hausman Test* terkandung pengertian adanya hubungan berbanding terbalik antara model yang bias dan efisien. Dalam *Fixed Effect* model, hasil estimasi tidak bias sekaligus juga tidak efisien. Sedangkan pada *Random Effect* model,



hasil estimasi juga tidak bias, namun efisien. Apabila hasil perhitungannya adalah: nilai  $w >$  nilai *chi squared* tabel, maka *Random Effect* model yang tepat untuk digunakan. Sebaliknya, jika nilai  $w <$  nilai *chi squared* tabel, maka yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect* model.

#### 4.4.3 Uji Statistik Model

Secara garis besar ada dua macam uji statistik yang akan dilakukan terhadap model yang digunakan dalam studi ini, yaitu uji kesesuaian model serta uji terhadap asumsi OLS.

##### 4.4.3.1 Uji Kesesuaian Model

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode pendugaan OLS adalah bahwa model yang digunakan telah dispesifikasi dengan benar. Hal ini berarti bahwa variabel yang digunakan dalam model adalah merupakan variabel yang mampu menjelaskan fluktuasi yang terjadi dalam variabel terikatnya (*dependent variable*). Untuk itu maka perlu dilakukan uji kesesuaian terhadap model yang telah digunakan. Uji yang dimaksud meliputi uji kesesuaian ( $R^2$ ), Uji F dan Uji T

##### a). Uji Kesesuaian ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk mengukur kesesuaian suatu model persamaan regresi. Koefisien determinasi  $R^2$  diartikan sebagai bagian atau porsi dari variabel terikat (*dependent variable*) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (*independent variable*). Dengan demikian, semakin besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan fluktuasi yang terjadi pada variabel terikatnya, maka nilai  $R^2$  dari model yang dianalisa akan semakin besar juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut semakin baik/sesuai. Hal yang sebaliknya berlaku jika nilai  $R^2$  semakin kecil, maka model yang digunakan dapat dikatakan kurang sesuai dalam menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Secara sederhana, nilai  $R^2$  dapat diformulasikan:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

dimana:

SSR = *Sum of square Regression* (jumlah kuadrat regresi)

$SST = \text{sum of square Total}$  (total kuadrat error)

Nilai  $R^2$  berkisar terletak antara 0 dan 1. Jika  $R^2 = 1$  (100%) berarti variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model tersebut mampu menjelaskan semua fluktuasi atau perubahan yang terjadi dalam variabel terikat. Walaupun sampai saat ini tidak ada suatu angka patokan yang pasti untuk mengatakan seberapa besar nilai  $R^2$  minimal yang harus diperoleh agar suatu model dapat dikatakan cukup baik atau sesuai, namun untuk tujuan praktis, suatu model dengan  $R^2 = 0,5$  (50%) sudah dapat dikategorikan cukup baik.

#### **b). Uji Serempak (Uji F)**

Uji F yang merupakan uji signifikansi model dimaksudkan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Pada dasarnya prinsip dari Uji F ini hampir sama dengan koefisien determinasi  $R^2$ . Yaitu, jika jumlah kuadrat error (*Sum of Square Error, SSE*) memiliki nilai yang relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah kuadrat total (*Sum of Square Total, SST*) maupun jumlah kuadrat regresi (*Sum of Square Regression, SSR*), maka dapat dikatakan bahwa model yang dianalisa tersebut cukup baik/sesuai, dan berlaku juga sebaliknya. Dengan demikian, suatu model dapat dikatakan baik/sesuai jika rasio antara SSR dengan SSE cukup besar, yaitu dengan membandingkannya dengan tabel F (Fisher). Berikut formulanya:

$$F = \frac{SSR/k}{SSE/T-k-1} > F_{\alpha}(k, T-k-1), \text{ maka model dikatakan cukup baik}$$

#### **c). Uji Parsial (Uji T)**

Uji Parsial yang lebih dikenal dengan istilah Uji T, dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model yang digunakan. Uji T dapat dilakukan jika Uji F menunjukkan hasil yang signifikan. Suatu variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh yang cukup berarti atau signifikan terhadap variabel terikat, yaitu apabila rasio antara nilai dugaan koefisien regresi variabel bebas yang bersangkutan terhadap *standard error*-nya relatif besar. Hal ini berarti bahwa tingkat kesalahannya

harus relatif kecil. *Standar error* tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai tabel distribusi *t student* dengan *level of significance*  $\alpha$  dan dengan *degree of freedom*  $T-k-1$  atau dilambangkan dengan  $t_{\alpha(T-k-1)}$ . Berikut aturan penarikan kesimpulannya:

1. Jika  $t > t_{\alpha(T-k-1)}$  = signifikan, artinya variabel bebas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variabel terikat.
2. Jika  $t < t_{\alpha(T-k-1)}$  = tidak signifikan
3. Jika  $t = t_{\alpha(T-k-1)}$  = tidak dapat ditarik kesimpulan

#### 4.4.3.2 Uji Asumsi OLS

Untuk mendapatkan model yang konsisten serta efisien, maka perlu dilakukan pengujian apakah terjadi pelanggaran terhadap asumsi OLS. Pengujian yang dimaksud meliputi pelanggaran terhadap asumsi OLS yaitu autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Selain itu juga akan dibahas mengenai dampak dari tiap pelanggaran asumsi tersebut serta cara untuk menanggulangnya.

##### a). Autokorelasi

Autokorelasi atau *autocorrelated error* merupakan hubungan yang terjadi antara error dari suatu observasi dengan error dari observasi lainnya. Pada umumnya, masalah autokorelasi terjadi pada data *time series*. Penyebab masalah autokorelasi ini antara lain:

1. Adanya *shocks* yang pengaruhnya seringkali tetap muncul dalam suatu periode waktu yang cukup lama
2. Manipulasi data, seperti interpolasi/ekstrapolasi dan proses *smoothing data*
3. Salah spesifikasi, yaitu jika ada variabel bebas yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap variabel terikat tapi tidak disertakan dalam model. Disamping itu, spesifikasi model yang tidak tepat juga bisa menyebabkan autokorelasi.
4. *Spatial autocorrelation*, yaitu korelasi yang terjadi pada data *cross section*.

Adanya korelasi menyebabkan penduga *standard error* model maupun *standard error* koefisien regresi menjadi menyimpang/bias.

Penyimpangan ini dapat menyebabkan pengujian kesesuaian model yang dilakukan baik dengan Uji F maupun Uji t, menjadi tidak sah. Metode yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi adalah *Durbin Watson Test* (DW test), yang membandingkan nilai DW hitung dengan nilai batas bawah (dL) dan batas atas (du) dari tabel Durbin Watson berdasarkan jumlah observasi dan variabel bebas. Analisa autokorelasi dengan DW test adalah sebagai berikut:

1. Daerah A = korelasi positif, yaitu nilai uji DW < dL
2. Daerah B = tidak bisa disimpulkan, yaitu nilai uji DW < du
3. Daerah C = korelasi negatif, yaitu du < nilai uji DW < 4-du
4. Daerah D = tidak bisa disimpulkan, yaitu 4-du < nilai uji DW < 4-du
5. Daerah E = korelasi positif, yaitu 4-dL < DW < 4

Selain perhitungan diatas, ada semacam "cara cepat" untuk mendeteksi autokorelasi dari DW test ini, yaitu:

- Jika nilai DW berada dekat dengan nilai 2, maka dapat dikatakan **tidak terjadi** autokorelasi
- Jika nilai DW berada dekat nilai 0 dan 4, maka dapat dikatakan **terjadi** korelasi

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi autokorelasi tersebut, antara lain modifikasi terhadap model, *first difference method*, dan *cochrane-ortcutt iterative procedur*.

#### **b). Multikolinearitas**

Multikolinearitas didefinisikan sebagai adanya hubungan/korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas dalam model. Dengan adanya multikolinearitas maka *standard error* koefisien regresi akan meningkat sehingga t-rasio akan bernilai cukup rendah. Akibatnya variabel bebas yang saling berkorelasi menjadi "tidak signifikan", walaupun sebetulnya variabel bebas yang bersangkutan pengaruhnya "signifikan" terhadap variabel terikat. Selain itu, multikolinearitas juga dapat menyebabkan tanda (*sign*) dari koefisien regresi yang diperoleh

menjadi berlawanan dari yang semestinya. Berikut ini beberapa indikasi terjadinya multikolinieritas (Gujarati:2003):

1. Nilai  $R^2$  yang tinggi dan nilai F yang signifikan, tapi sebagian besar nilai statistik t tidak signifikan
2. Adanya korelasi sederhana yang relatif tinggi ( $\geq 0,8$ ) antara satu/ lebih pasang variabel bebas
3. Dengan menggunakan regresi bantuan (*Auxiliary Regression*), yaitu dengan melakukan regresi antar variabel bebas, jika ternyata nilai  $R^2$  nya tinggi, maka dapat dipastikan terjadi indikasi ketergantungan linier diantara variabel bebas tersebut

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan:

1. Menggabungkan data *crosssectional* dengan data *time series* menjadi data *panel*. Dengan demikian maka ukuran sampel semakin besar, sehingga koefisien korelasi antar variabel bebas diharapkan akan semakin mengecil. Dengan langkah ini, maka dapat dipastikan bahwa data panel telah terbebas dari multikolinearitas
2. Membuang penyebab multikolinearitas, yaitu dengan cara mengeluarkan variabel bebas yang diperkirakan memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan variabel yang lain.
3. Mengubah bentuk model

### c). Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam persamaan regresi adalah homoskedastisitas, yaitu varians dari tiap *disturbance* adalah suatu angka yang konstan. Jadi, heteroskedastisitas dapat diartikan sebagai nilai varians dari tiap *disturbance* tidak konstan untuk setiap nilai variabel bebas atau sepanjang periode observasi. Umumnya, heteroskedastisitas terjadi pada data *crosssection*, walaupun bisa saja terjadi pada data *time series*. Penyebabnya antara lain karena metode pengumpulan data yang semakin baik yang menyebabkan kesalahan/error dalam pengukuran nilai-nilai variabel semakin kecil. Adanya masalah heteroskedastisitas ini menyebabkan *standar error*

koefisien dengan metode pendugaan OLS menjadi cenderung lebih besar bila dibandingkan dengan metode pendugaan lainnya seperti GLS dan WLS. Sehingga hasil uji F serta uji t yang dilakukan terhadap model menjadi tidak signifikan. Akibatnya, model yang baik cenderung disimpulkan menjadi model yang kurang baik/sesuai. Selain itu, heteroskedastis juga dapat menyebabkan *confidence interval* untuk masing-masing koefisien cenderung makin melebar. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti metode grafik, *Spearman's correlation test*, *Goldfeld-Quand test*, *Breusch-Pagan Test* serta *White General test*. Dari seluruh metode pendeteksi tersebut, metode *Goldfeld-Quand test* adalah metode yang paling sering digunakan. Untuk menggunakan metode ini, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu hubungan atau korelasi antara error dengan salah satu variabel bebas yang ada dalam model bernilai positif. Artinya, nilai absolut cenderung makin besar seiring dengan makin meningkatnya nilai variabel bebas tersebut.

Masalah heteroskedastisitas dapat diatasi dengan cara:

1. Bila varian diketahui, maka model dapat diestimasi dengan menggunakan metode WLS (*Weighted Least Square*). Metode ini sangat jarang digunakan karena besarnya varian jarang diketahui (terutama pada data *time series*). Sedangkan pada data panel, masalah heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan metode pendugaan GLS.
2. Bila varian tidak diketahui, maka dapat dilakukan serangkaian transformasi nilai-nilai variabel bebas dan terikat. Bentuk fungsi transformasi yang akan digunakan tergantung pada asumsi yang dibuat terhadap hubungan antara varian tersebut dengan variabel bebas.

## BAB V

### DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESENJANGAN WILAYAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil pengolahan data serta analisisnya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Eviews. Analisis terhadap hasil pengolahan data berupa analisis inferensial, sedangkan gambaran mengenai statistik deskriptif dari data dapat dilihat pada lampiran 5.

#### 5.1 Hasil Estimasi

Untuk mengolah data panel dibutuhkan metode yang tepat, sesuai dengan spesifikasi datanya. Dalam tesis ini, penentuan metode pengolahan data yang tepat dilakukan dengan dua macam test. Pertama, *Chow Test*, yaitu untuk menentukan apakah data akan diolah dengan metode *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Kedua, *Hausman Test*, yaitu untuk menentukan apakah data akan diolah dengan metode *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Kedua test ini masing-masing dilakukan pada empat model yang digunakan dalam menganalisa dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan wilayah. Dari hasil kedua test tersebut, ternyata metode *Fixed Effect* lah yang tepat untuk mengestimasi koefisien dari ke-empat model tersebut. Hasil perhitungan kedua test tersebut terhadap masing-masing model, dapat dilihat di lampiran 2.

Langkah selanjutnya adalah menentukan estimator berdasarkan struktur varian/kovarian dari residual untuk kondisi homokedastik/heterokedastik. Jadi, apakah estimasi dengan metode *Fixed Effect* tersebut perlu dilakukan dengan pembobotan (*weighted*) atau tidak. Dari perbandingan nilai  $R^2$  seluruh model tersebut, ternyata nilai  $R^2$  dengan metode *Fixed Effect* dengan pembobotan lebih tinggi dari nilai  $R^2$  tanpa pembobotan (lihat lampiran 3). Hal ini berarti bahwa metode yang tepat untuk menganalisis seluruh model tersebut adalah metode *Fixed Effect* dengan pembobotan (*weighted*). Berikut hasil estimasi

regresi dengan menggunakan metode *Fixed Effect-Cross Sectional Weighted* terhadap ke-empat model dengan enam variabel kontrol.

**Tabel 5.1 HASIL ESTIMASI REGRESI (6 VARIABEL KONTROL)**

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4a	Model 4b
LAI	0,074939 <sup>a</sup>				
LRI		- 0,005138 <sup>c</sup>			
LPI			-0,074192 <sup>a</sup>		
LDE				0,057894 <sup>c</sup>	
Lag DE					0,164312 <sup>c</sup>
C	2,161 <sup>a</sup>	1,463521 <sup>b</sup>	-	1,832654 <sup>b</sup>	1,874801 <sup>a</sup>
LPDRBCAP	- 0,139288 <sup>a</sup>	- 0,111143 <sup>a</sup>	- 0,088309 <sup>b</sup>	- 0,129667 <sup>a</sup>	- 0,129385 <sup>a</sup>
LMANUF	- 0,127033 <sup>a</sup>	- 0,109171 <sup>a</sup>	- 0,098398 <sup>a</sup>	- 0,116128 <sup>a</sup>	- 0,11504 <sup>a</sup>
LROAD	0,175801 <sup>a</sup>	0,158742 <sup>a</sup>	Tdk Signifikan	0,162137 <sup>a</sup>	0,162693 <sup>a</sup>
LINVS	Tdk signifikan	Tdk signifikan	Tdk signifikan	Tdk signifikan	Tdk signifikan
LOPENNES	0,013510 <sup>b</sup>	0,015483 <sup>b</sup>	0,012107 <sup>c</sup>	0,017955 <sup>a</sup>	0,018416 <sup>a</sup>
LURBAN	Tdk signifikan	Tdk signifikan	- 0,096358 <sup>b</sup>	Tdk signifikan	Tdk signifikan
K_DUMMY	Tdk signifikan	Tdk signifikan	0,048378 <sup>a</sup>	Tdk signifikan	0,024541 <sup>c</sup>
P_DUMMY	0,098187	0,085506 <sup>a</sup>	0,080698 <sup>b</sup>	0,093883 <sup>a</sup>	0,095044 <sup>a</sup>
R <sup>2</sup>	0,975617	0,974334	0,966158	0,977510	0,977267
Adj R <sup>2</sup>	0,972881	0,971454	0,962361	0,974987	0,9744716
Prob (F stat)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DW	1,959312	1,954852	1,963429	1,959820	1,959037
N	338	338	338	338	338

Keterangan:

<sup>a</sup> koefisien signifikan pada tingkat kesalahan 1%

<sup>b</sup> koefisien signifikan pada tingkat kesalahan 5%

<sup>c</sup> koefisien signifikan pada tingkat kesalahan 10%

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh model memiliki nilai R<sup>2</sup> yang cukup baik, berkisar antara 0,966158– 0,977510. Artinya, model bisa menjelaskan keragaman variabel terikat sebesar 96,6% sampai dengan 97,7%. Demikian juga dengan nilai F statistik yang sangat kecil (0,00). Ini berarti bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen (bebas) dapat menjelaskan variabel dependen (terikat). Sedangkan dari uji t statistik, seluruh indikator desentralisasi fiskal di tiap model ternyata signifikan dengan nilai tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) beragam antara 1% - 10%.

Selain nilai-nilai tersebut diatas, untuk mendapatkan model yang konsisten serta efisien, maka perlu dilakukan uji pelanggaran terhadap asumsi OLS (*Ordinary Least Square*) yaitu autokorelasi/ korelasi serial, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Dengan



melihat nilai DW (*Durbin Watson Statistik*) sekitar 1,9, yang berarti nilainya mendekati 2, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh model tersebut tidak mengalami korelasi serial. Sedangkan untuk masalah multikolinearitas, jenis data yang digunakan yang berupa data panel merupakan salah satu cara untuk mengobati multikolinearitas. Sebab ukuran sampel pada data panel relatif jauh lebih besar daripada data *cross section* maupun *time series*, sehingga koefisien korelasi antar variabel bebas (=multikolinearitas) diharapkan akan semakin mengecil. Jadi dapat diasumsikan bahwa dalam pengolahan data panel tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, karena seluruh model diestimasi dengan metode *Fixed Effect* dengan pembobotan (*weighted*) atau disebut juga metode *GLS White Heteroskedasticity consistent standard errors* dan *covariance*, maka diasumsikan model sudah bersifat homoskedastis.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya seluruh model tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut karena sudah memenuhi segala persyaratan jika ditinjau dari analisa inferensial statistiknya. Namun, jika dilihat dari signifikansi variabel kontrolnya ternyata seluruh model mempunyai karakteristik yang hampir sama, yaitu hanya ada sekitar empat dari enam variabel kontrol yang signifikan. Variabel kontrol *Investasi* secara konsisten tidak signifikan di seluruh model. Sedangkan variabel persentase penduduk perkotaan (*Urban*) hanya signifikan di satu model saja (Model 3). Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi kembali terhadap model dengan cara mengurangi variabel kontrol yang tidak signifikan secara konsisten tersebut, dalam hal ini *investasi* dan *urban*, secara bergantian. Dengan langkah ini diharapkan hasil yang lebih baik, khususnya dilihat dari jumlah variabel kontrolnya yang signifikan. Dari hasil pengolahan ulang data ternyata hasil yang terbaik bagi masing-masing model tersebut adalah sebagai berikut:

- Model 1, Model 2 dan Model 4a lebih baik menggunakan 5 variabel kontrol tanpa variabel *urban*

- Model 3 dan Model 4b lebih baik menggunakan 5 variabel tanpa variabel *investasi*

**Tabel 5.2 HASIL ESTIMASI REGRESI (5 VARIABEL KONTROL)**

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4a	Model 4b
LAI	0,079479 <sup>a</sup>				
LRI		- 0,006752 <sup>c</sup>			
LPI			- 0,070391 <sup>a</sup>		
LDE				0,060203 <sup>c</sup>	
Lag DE					0,138574 <sup>c</sup>
C	2,262782 <sup>a</sup>	1,500435 <sup>b</sup>	-	1,915782 <sup>a</sup>	1,904222 <sup>a</sup>
LPDRBCAP	- 0,141379 <sup>a</sup>	- 0,112092 <sup>a</sup>	- 0,087664 <sup>b</sup>	- 0,132321 <sup>a</sup>	- 0,131118 <sup>a</sup>
LMANUF	- 0,117664 <sup>a</sup>	- 0,099267 <sup>a</sup>	- 0,088566 <sup>a</sup>	- 0,107928 <sup>a</sup>	- 0,135455 <sup>a</sup>
LROAD	0,173462 <sup>a</sup>	0,147417 <sup>b</sup>	0,101941 <sup>c</sup>	0,153979 <sup>a</sup>	0,163982 <sup>a</sup>
LINVS	Tdk signifikan	Tdk signifikan		Tdk signifikan	
LOPENNES	0,012417 <sup>c</sup>	0,013889 <sup>b</sup>	0,012240 <sup>c</sup>	0,016694 <sup>b</sup>	0,019573 <sup>a</sup>
LURBAN			- 0,092482 <sup>b</sup>		Tdk signifikan
K_DUMMY	Tdk signifikan	Tdk signifikan	0,045371 <sup>a</sup>	Tdk signifikan	0,028404 <sup>c</sup>
P_DUMMY	0,098072 <sup>a</sup>	0,085642 <sup>a</sup>	0,076560 <sup>b</sup>	0,094092	0,097832 <sup>a</sup>
R <sup>2</sup>	0,974873	0,973347	0,967426	0,976123	0,976918
Adj R <sup>2</sup>	0,972145	0,970454	0,963890	0,973531	0,974413
Prob (F stat)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DW	1,962013	1,947111	1,961725	1,952899	1,967625
N	338	338	338	338	338

Keterangan:

<sup>a</sup> koefisien signifikan pada tingkat kesalahan 1%

<sup>b</sup> koefisien signifikan pada tingkat kesalahan 5%

<sup>c</sup> koefisien signifikan pada tingkat kesalahan 10%

Perbedaan hasil estimasi regresi antara model pada tabel 5.1 dan 5.2, terletak pada jumlah variabel kontrol yang signifikan. Pada model dengan 5 variabel kontrol, hanya 1 variabel kontrol yang tidak signifikan di setiap modelnya. Bahkan untuk model 3, seluruh variabel kontrolnya signifikan.

Pengolahan data untuk model dengan 5 variabel kontrol juga dilakukan dengan cara yang sama. Dan hasilnya pun relatif sama dengan hasil yang diperoleh dari pengolahan data terhadap 6 variabel kontrol. Dari mulai model yang tepat untuk digunakan (yaitu model *Fixed Effect weighted*) sampai dengan hasil dari uji pelanggaran terhadap asumsi OLS juga memberikan kesimpulan yang sama. Dilihat dari nilai R<sup>2</sup> serta *F statistiknya*, model dengan 5 variabel kontrol ini secara keseluruhan juga memiliki nilai yang relatif sama dengan yang dimiliki oleh model dengan 6 variabel kontrol. Hal ini berarti bahwa

secara keseluruhan, seluruh variabel independen (bebas) dalam model dengan 5 variabel kontrol secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen atau terikatnya. Disamping itu juga dilihat dari arah hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikatnya, yang ditunjukkan oleh tanda positif/negatif pada koefisien hasil estimasi, tidak ada perbedaan antara model dengan 5 maupun 6 variabel kontrol

Berdasarkan uraian hasil estimasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa model dengan 5 variabel kontrol lebih efisien daripada model dengan 6 variabel kontrol, yaitu dilihat dari lebih proporsi variabel kontrol yang signifikan. Oleh karena itu, analisis selanjutnya akan didasarkan seluruhnya pada hasil estimasi pada model dengan menggunakan 5 variabel kontrol.

## **5.2 Analisis Hasil Estimasi**

### **5.2.1 Model 1: Variabel *Autonomy Indicator* (PAD)**

Model ini menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan di tiap propinsi (termasuk kabupaten/kota didalamnya) sebagai indikator Desentralisasi Fiskal (selanjutnya disingkat DF). Besarnya rasio tersebut dapat dilihat pada lampiran 4.

Dari hasil estimasi diperoleh koefisien sebesar 0,079479, artinya setiap kenaikan indikator DF sebesar 1% akan meningkatkan kesenjangan wilayah sebesar 0,079479%. Hasil ini menunjukkan bahwa DF dengan indikator rasio PAD mendukung teori konvensional. Hal ini dapat terjadi terutama disebabkan oleh rendahnya rasio PAD terhadap total penerimaan. Dari tahun 1994 sampai dengan 2006 rata-rata rasio PAD terhadap penerimaan tiap propinsi di Indonesia relatif sangat kecil, hanya sebesar 14,8%. Padahal, menurut Shah (dalam Jing dan Zou, 1994) desentralisasi fiskal seharusnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya dalam menstimulasi mobilisasi penerimaan dari sumber-sumber penerimaan di daerah (dalam hal ini PAD). Sehingga pada akhirnya dapat tercapai peningkatan posisi fiskal secara keseluruhan dari pemerintah daerah tersebut. Kondisi ini dapat terwujud jika pemerintah daerah

propinsi/kota/kabupaten berhasil menggali sumber penerimaan untuk daerahnya, seperti pungutan pajak dan retribusi daerah. Kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa pungutan pajak serta retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Hal ini disebabkan oleh (LPEM UI):

1. Basis pajak serta retribusi daerah yang relatif rendah dan terbatas. Berdasarkan UU No.34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diperkenankan untuk menggali dan menetapkan jenis pajak serta retribusi yang baru. Namun karena dalam UU perpajakan nasional yaitu UU No. 34/2000 porsi obyek pajak pusat masih sangat mendominasi, maka daerah mengalami kesulitan dalam menggali dan menetapkan jenis pajak yang baru. Di lain pihak, daerah juga memiliki basis pungutan yang terbatas. Sementara itu, penggalan dan penetapan jenis retribusi baru juga terganjal oleh UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Beberapa urusan yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah daerah, seperti ijin kerja tenaga kerja asing (*expatriat*), masih dilaksanakan oleh pusat.
2. Peran pajak dan retribusi daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penerimaan daerah secara keseluruhan. Sebagian besar penerimaan daerah masih berupa transfer dari pusat. Hal ini menciptakan "ketergantungan" daerah terhadap pusat, dan juga mengurangi usaha daerah dalam mengupayakan peningkatan PADnya.
3. Rendahnya kemampuan administrasi pemungutan di daerah. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya biaya pungut yang membebani pemungutan pajak. Selain itu juga, adanya sistem target dalam pungutan daerah menyebabkan pemerintah di beberapa daerah cenderung hanya untuk memenuhi target tersebut, walaupun sebenarnya pemasukan dari pajak dan retribusi daerah dapat lebih di tingkatkan lagi.
4. Adanya kebocoran di daerah yang disebabkan oleh lemahnya kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan.

Disamping pajak dan retribusi, komponen PAD lainnya adalah laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Walaupun banyak daerah yang antusias mendirikan BUMD, namun pada kenyataannya kontribusi BUMD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata tidak signifikan. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi BUMD terhadap APBD kabupaten/kota kurang dari 2,6% (Kertawacana: 2004). Bahkan belakangan ini justru banyak BUMD yang mengalami kerugian. Rendahnya kontribusi BUMD ini terutama disebabkan oleh dua faktor, yaitu masih terbatasnya jumlah BUMD serta Undang-Undang yang mengatur BUMD (UU. No.5 tahun 1962). Menurut Ismail (2007) karena usianya yang sudah terlalu "tua", undang-undang tersebut dirasakan sudah tidak relevan dan juga tidak sejalan dengan UU tentang otonomi daerah. Undang-undang tersebut juga dirasakan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD, bahkan dapat membuka celah salah kelola dan penyimpangan. Untuk itu, agar BUMD dapat memberikan kontribusi laba yang cukup bagi PAD, maka (Ismail:2007):

- 1) Diperlukan aturan.atau mekanisme mengenai kepemilikan BUMD
- 2) Diperlukan pengaturan lainnya yang sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat (dalam hal ini Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri) sebaiknya hanya berperan dalam pengawasan saja.

Dari ketiga komponen PAD tersebut, pajak daerah memiliki kontribusi yang tertinggi terhadap PAD yaitu sekitar 87,34% untuk tingkat propinsi dan 40,74% untuk tingkat kabupaten/kota. Posisi kedua diduduki oleh retribusi daerah yang memberikan kontribusi pada PAD sebesar 5,31% di tingkat propinsi dan 33,76% di tingkat kabupaten/kota. Kontribusi BUMD terhadap PAD merupakan yang terkecil jika dibandingkan dengan dua komponen lainnya yaitu hanya berkisar antara 10-20%. Menurut John, Waugh dan Mikesell, dalam suatu pemerintahan yang baik penerimaan retribusi seharusnya lebih tinggi daripada pajak daerah. Sebab, retribusi dirasakan lebih adil dan efisien diterapkan daripada pajak. Hal ini terkait dengan sifat pajak

yang memiliki unsur "paksaan" dan berlaku untuk semua wajib pajak, sedangkan retribusi hanya berlaku pada pengguna jasa saja. Dengan adanya pergeseran penerimaan dari pos pajak ke retribusi, maka diharapkan masyarakat akan membayar pungutan retribusi secara sukarela, karena secara langsung akan mendapatkan imbalan (kontraprestasi) baik dalam bentuk pelayanan ataupun jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Selain kondisi rendahnya rasio PAD terhadap penerimaan, faktor lain yang menyebabkan *Autonomy Indicator* ini meningkatkan kesenjangan wilayah adalah tingginya ketimpangan rasio PAD terhadap penerimaan diantara wilayah propinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh *Prudhome*, yaitu apabila tiap wilayah menerapkan tingkat pajak yang sama, maka wilayah yang relatif lebih kaya yang notabene memiliki basis pajak yang lebih besar daripada wilayah yang relatif miskin, akan lebih mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih banyak. Pada akhirnya, hal ini akan mengakibatkan kesenjangan antar wilayah semakin lebar.

Ketimpangan rasio PAD ditunjukkan oleh timpangnya nilai minimum dan maksimum rasio PAD tersebut selama kurun waktu 1994-2006. Rasio PAD maksimum adalah sebesar 63,6% (Prop. DKI Jakarta) dan nilai minimumnya adalah sebesar 2,6% (Prop. Papua). Rasio PAD tertinggi hampir di seluruh kurun waktu tersebut dimiliki oleh Propinsi DKI Jakarta, kecuali pada tahun 1999 dimiliki oleh propinsi Bali. Rasio terendah selama kurun waktu tersebut, selama 10 tahun (tahun 1994-1997, 1999-2001, 2003, 2005-2006) terdapat di Propinsi Papua. Sedangkan 1998, 2002 dan 2004 masing-masing dimiliki oleh Propinsi Kalimantan Selatan, Maluku dan NAD.

Dari 26 propinsi yang diamati, ada tujuh propinsi yang memiliki rata-rata rasio PAD diatas rata-rata PAD propinsi secara keseluruhan (diatas 14,8%). Rasio PAD yang relatif lebih tinggi ini dialami oleh propinsi yang memiliki perkembangan daerah relatif jauh lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lainnya, meliputi seluruh propinsi di

Seluruh propinsi yang memiliki rasio PAD relatif rendah ini ternyata tergolong sebagai propinsi yang memiliki perkembangan daerah relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya, meliputi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu, NAD, NTT, Maluku dan Papua.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketimpangan rasio PAD terutama disebabkan oleh perbedaan kemampuan tiap daerah kabupaten/kota/propinsi dalam menggali sumber penerimaan untuk daerahnya masing-masing. Kemampuan daerah yang relatif maju dalam memobilisasi penerimaan dari sumber-sumber penerimaan di daerahnya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, terutama daerah yang relatif tertinggal. Selain itu, menurut Sidik (2000) ketimpangan PAD antar wilayah juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan jumlah penduduk, keadaan geografi yang berdampak pada biaya yang relatif mahal, serta kemampuan masyarakatnya.

Jika dikaitkan dengan hasil estimasi variabel boneka (*dummy variabel*) kebijakan, ternyata hasilnya adalah tidak signifikan. Artinya, baik sebelum maupun sesudah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, indikator rasio PAD berpengaruh dalam meningkatkan kesenjangan wilayah. Dengan kata lain, tidak ada beda pengaruh dari rasio PAD terhadap tingkat kesenjangan baik sebelum maupun setelah kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta besarnya rata-rata rasio PAD terhadap kedua kurun waktu tersebut relatif sama. Pada periode sebelum desentralisasi fiskal (1994-2000) rata-rata adalah sebesar 14,83%. Sedangkan pada periode setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal (2001-2006) rata-rata rasio PAD tersebut adalah sebesar 14,80%. Berarti, penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilisasi penerimaan dari sumber-sumber penerimaan di daerahnya. Sehingga posisi fiskal tiap daerah yang diharapkan dari pemerintah daerah secara keseluruhan pun belum dapat tercapai.

### 5.2.2 Model 2: Variabel *Revenue Indicator*

Dalam model yang kedua ini DF direpresentasikan dengan rasio total penerimaan propinsi (termasuk kabupaten/kota di dalamnya) terhadap total penerimaan dari seluruh kabupaten/kota, propinsi dan pusat. Koefisien regresi hasil estimasi dari variabel ini bernilai  $-0,006752$ , artinya setiap kenaikan indikator DF sebesar 1% akan menurunkan kesenjangan wilayah sebesar  $0,006752\%$ . Hasil ini menunjukkan bahwa DF dengan indikator rasio total penerimaan mendukung teori baru yang menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal justru dapat menurunkan tingkat kesenjangan wilayah.

Seperti yang disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10, sumber-sumber penerimaan bagi daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Pendapatan Lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, dana perimbangan masih merupakan sumber utama penerimaan daerah dengan rata-rata kontribusi sekitar 80% terhadap total penerimaan. Dengan demikian, kemungkinan besar penyebab utama dari rasio total penerimaan daerah tersebut bisa menurunkan tingkat kesenjangan wilayah adalah karena keberhasilan dari dana perimbangan sebagai komponen terbesar dari penerimaan tiap daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2005) tentang dampak dana perimbangan terhadap perekonomian daerah dan pemerataan antarwilayah. Salah satu hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan berdampak pada perbaikan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pertanyaan selanjutnya adalah komponen apa dari dana perimbangan itu yang berperan dalam menurunkan tingkat kesenjangan wilayah. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika dilihat dari tujuan diterapkannya ketiga komponen dana perimbangan tersebut, yang ditunjukkan oleh formulasi dalam pengalokasiannya, maka patut diduga bahwa komponen DAU lah yang paling berperan dalam



menurunkan kesenjangan. Hal ini ternyata juga didukung oleh hasil penelitian Riyanto (2005) yang menunjukkan bahwa dari ketiga komponen dana perimbangan tersebut, DAU merupakan komponen yang pengaruhnya paling besar dalam mereduksi kesenjangan antar wilayah. Bahkan pengaruh dari DBH, khususnya dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang membuat kesenjangan antar wilayah makin meningkat, direduksi oleh DAU. Sedangkan DAK, apabila dilihat dari kriteria (umum/khusus) serta syarat pengalokasiannya, serharusnya juga dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah. Sebab, berdasarkan kriterianya dapat disimpulkan bahwa pengalokasian DAK sebenarnya diprioritaskan bagi daerah yang memiliki ciri-ciri sebagai daerah yang relatif terbelakang. Namun dalam kenyataannya pengalokasian DAK belum optimal. Pengalokasian DAK belum sepenuhnya mengikuti kriterianya, namun lebih pada hasil lobi politik (Asmoro: 2007).

Apabila dikaitkan dengan hasil estimasi variabel boneka (*dummy variabel*) kebijakan, ternyata hasilnya adalah tidak signifikan. Artinya, indikator rasio total penerimaan daerah ini telah berpengaruh dalam menurunkan kesenjangan wilayah sejak periode sebelum diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan kata lain, tidak ada beda pengaruh dari rasio total penerimaan daerah terhadap tingkat kesenjangan baik sebelum maupun setelah kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan. Pengaruh yang sama ini ditunjukkan oleh besarnya porsi rata-rata dana perimbangan pada periode sebelum dan setelah desentralisasi fiskal. Seperti halnya dana perimbangan pada periode setelah kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan, pada periode sebelumnya, proporsi dana perimbangan (yang terdiri dari komponen Inpres, Subsidi Daerah Otonom/SDO Bagi hasil pajak dan sumber daya alam) besarnya juga sekitar 80%. Jadi, di kedua periode tersebut dana perimbangan masih merupakan sumber utama dari penerimaan daerah.

### 5.2.3 Model 3: Variabel *Production Indicator*

Model ketiga ini menggunakan rasio total pengeluaran/belanja propinsi (termasuk kabupaten/kota didalamnya) terhadap total pengeluaran seluruh kabupaten/kota/ propinsi/pusat sebagai indikator pengukuran derajat DF.

Dari hasil estimasi diperoleh koefisien sebesar  $-0,070391$ . Artinya setiap kenaikan indikator DF sebesar 1% akan menurunkan kesenjangan wilayah sebesar  $0,070391\%$ . Hasil ini menunjukkan bahwa DF dengan indikator rasio total pengeluaran daerah mendukung pandangan kedua, yang menyatakan bahwa penerapan desentralisasi fiskal dapat menurunkan kesenjangan wilayah.

Dalam ekonomi publik, belanja publik (*public expenditure*) adalah instrumen dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pengadaan barang dan jasa publik. Menurut Stiglitz (2000), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan belanja publik yang berfungsi untuk mengatasi kegagalan pasar khususnya dalam penyediaan barang dan jasa publik. Pemerintah memang sudah seharusnya menyediakan barang publik sebab pihak swasta tidak akan cukup mendapat insentif dalam penyediaan barang publik tersebut. Menurut pernyataan Bank Dunia, meskipun menghasilkan dampak yang berbeda-beda, belanja publik ini sering digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen kunci dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dari hasil penelitian ini ternyata dapat dikatakan bahwa peran APBD (belanja publik) sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan wilayah cukup berhasil. Disamping itu juga, secara teoretis pengeluaran/belanja pemerintah (yang dinotasikan G) adalah salah satu komponen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*Growth*) selain investasi (I) dan konsumsi masyarakat/swasta (C). Hasil penelitian ini ternyata sesuai dengan teori tersebut, karena belanja/ pengeluaran pemerintah selama ini ternyata cukup efektif dalam menciptakan kondisi dan situasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah.

Berbeda dengan dua indikator desentralisasi fiskal sebelumnya, hasil estimasi variabel boneka (*dummy variabel*) kebijakan untuk indikator DF total pengeluaran daerah ini ternyata hasilnya adalah signifikan dan bernilai positif. Artinya, rasio total pengeluaran daerah (sebagai indikator DF) lebih berpengaruh dalam menurunkan kesenjangan wilayah pada periode setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

#### **5.2.4 Model 4a: Variabel *Development Expenditure***

Dalam model keempat DF diukur sebagai rasio total belanja pembangunan terhadap total belanja di tiap propinsi (termasuk kabupaten/kota didalamnya). Semakin besar rasio belanja pembangunan ini, maka diasumsikan semakin besar perhatian ataupun komitmen pemerintah daerah terhadap kepentingan publik/masyarakat. Selain itu juga belanja pembangunan tersebut juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kinerja perekonomian suatu daerah.

Di Indonesia, belanja publik yang tertuang dalam APBD dapat dibedakan menjadi dua macam belanja/pengeluaran, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan, belanja pemeliharaan dinas, belanja lain-lain angsuran hutang dan bunga, bantuan keuangan serta pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain. Sedangkan belanja pembangunan adalah belanja yang ditujukan untuk pembiayaan proses pembangunan dan sebagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa seperti penyediaan fasilitas publik. Seperti halnya struktur dalam APBN, sejak tahun 2005 struktur dalam APBD mengganti istilah belanja rutin maupun belanja pembangunan. Istilah yang digunakan untuk pembagian pos belanja adalah belanja barang dan belanja modal. Besarnya rasio belanja pembangunan tiap propinsi tahun 1994 - 2006 dapat dilihat di lampiran 4.

Dari hasil estimasi regresi data panel diperoleh koefisien sebesar 0,060203, artinya setiap kenaikan indikator DF sebesar 1% akan meningkatkan kesenjangan wilayah sebesar 0,060203%. Hasil ini menunjukkan bahwa DF dengan indikator rasio belanja pembangunan justru mendukung teori konvensional. Hal ini diduga karena adanya misalokasi dari penggunaan belanja pembangunan. Pihak pemerintah daerah menggunakan dana yang berasal dari belanja pembangunan lebih pada tujuan konsumsi ataupun pengembangan industri lokal yang tidak kompetitif dan manfaatnya tidak jelas bagi masyarakat. Akibatnya, dana pembangunan yang seharusnya berfungsi sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat terwujud. Seharusnya dana pembangunan digunakan untuk kepentingan yang lebih bersifat produktif dan bersifat investasi sehingga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan daerahnya.

Selain misalokasi belanja pembangunan, faktor lain yang diduga sebagai penyebab rasio belanja pembangunan meningkatkan kesenjangan wilayah adalah banyaknya dana pembangunan yang tidak (secara langsung) dimanfaatkan. Setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal telah terjadi *big bang* transfer dana pusat ke daerah. Sebagai ilustrasi, terjadi peningkatan dana perimbangan sebesar 65% dari tahun 2005 ke tahun 2006. Hal ini menyebabkan banyak pemerintah daerah yang kesulitan untuk membelanjakan anggaran tambahan yang mereka terima tersebut. Kesulitan ini diduga karena terbatasnya kapasitas dari pemerintah daerah itu sendiri. Banyak pemerintah daerah yang kemudian menyimpan dana tersebut dalam rekening bank setempat, kebanyakan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Berdasarkan data tahun 2006, jumlah simpanan dana semakin meningkat sehingga nilainya pada bulan November 2006 telah mencapai 3.1% dari PDB (*World Bank:2007*). Besarnya nilai simpanan dana ini juga disebabkan karena pemerintah daerah lebih berorientasi pada "*profit*", sebab keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan dana tersebut (misalnya berupa jasa giro) ternyata bagi pemerintah daerah dirasakan lebih menguntungkan jika dibandingkan

dengan digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur.

Jika dikaitkan dengan estimasi koefisien *dummy variabel* (variabel boneka) kebijakan, ternyata hasilnya tidak signifikan. Berarti bahwa baik sebelum maupun sesudah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, indikator rasio belanja pembangunan terhadap total belanja mempunyai pengaruh yang sama dalam meningkatkan kesenjangan wilayah. Padahal berdasarkan fakta yang terjadi seharusnya diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal berbeda pengaruhnya dalam penggunaan belanja pembangunan. Penentuan penggunaan belanja untuk pembangunan pada saat sebelum diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal lebih banyak ditentukan ataupun merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Hal ini terutama terlihat dari adanya bantuan berupa Inpres (instruksi presiden) yang alokasi penggunaannya ditentukan oleh pusat. Sedangkan setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, penentuan alokasi penggunaan belanja pembangunan menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah daerah itu sendiri. Dengan demikian, perbedaan dalam hal kewenangan untuk menentukan penggunaan dana belanja pembangunan tersebut seharusnya terlihat dari signifikannya variabel boneka berupa kebijakan desentralisasi fiskal. Tidak signifikannya variabel boneka dari kebijakan desentralisasi fiskal ini kemungkinan besar disebabkan oleh sering terlambatnya penggunaan/pemanfaatan dari dana belanja pembangunan dalam APBD. Keterlambatan penggunaan dana ini terutama disebabkan oleh keterlambatan dalam proses turunnya dana APBD ke pihak pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan itulah maka dibuat model selanjutnya (Model 4b), dimana indikator fiskal di representasikan sebagai *lag satu tahun* dari belanja pembangunan.

#### **5.2.5 Model 4b: Variabel lag *Development Expenditure***

Dalam model ini, indikator DF berupa *lag satu tahun* dari indikator rasio belanja pembangunan terhadap total belanja. Dari hasil

estimasi regresi diperoleh koefisien sebesar 0,138574, artinya setiap kenaikan indikator DF sebesar 1% akan meningkatkan kesenjangan wilayah sebesar 0,13574%. Dilihat dari arah keterkaitannya yang diperlihatkan oleh tanda positif dari koefisiennya, ternyata seperti halnya rasio belanja pembangunan tanpa lag (model 4a), rasio belanja pembangunan dengan lag satu tahun ini juga ternyata mendukung teori konvensional.

Perbedaan dari hasil estimasi kedua indikator dalam model 4a dan 4b ini ternyata terletak pada signifikansi variabel boneka (*dummy* variabel) kebijakan. Dengan menggunakan indikator belanja pembangunan dengan lag satu tahun, ternyata variabel boneka berupa diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal menjadi signifikan. Artinya, pengaruh indikator rasio pembangunan dengan lag satu tahun dalam meningkatkan kesenjangan wilayah, lebih besar pada periode setelah diterapkannya desentralisasi fiskal (2001-2006), dibandingkan dengan periode sebelumnya (1994-2000). Hal ini didukung oleh fakta turunnya rasio belanja pembangunan terhadap total belanja, dari 43,79% pada periode sebelum desentralisasi fiskal, menjadi 36,26% pada periode setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal. Terjadinya perbedaan signifikansi variabel boneka dari kedua model ini kemungkinan besar disebabkan oleh sering terlambatnya penggunaan/pemanfaatan dari dana belanja pembangunan dalam APBD oleh pemerintah daerah. Menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (2007) beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah:

1. Keterlambatan dalam pencairan APBD. Pada umumnya APBD baru bisa disetujui pencairannya setelah melalui penundaan berkali-kali, bahkan kadang-kadang sampai menjelang berakhirnya tahun fiskal. Kondisi ini diperburuk oleh aturan mengenai otorisasi proses anggaran yang baru, dimana Departemen Dalam Negeri berhak untuk memberikan persetujuan pada APBD pemerintah provinsi, dan pejabat pemerintah provinsi berhak untuk memberikan persetujuan terhadap APBD kabupaten/kota.

2. Penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam, biasanya baru dilakukan oleh pemerintah pusat saat menjelang akhir tahun fiskal
3. Terjadinya *crowding out effect*, sebagai akibat dari pengeluaran pemerintah pusat di daerah yang justru mengurangi pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah terpaksa meninjau kembali rencana belanja/pengeluarannya.
4. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya (dalam hal ini dana perimbangan) yang diberikan, terutama saat sumber daya tersebut tiba-tiba mengalami peningkatan yang cukup tajam

Pada akhirnya, seluruh faktor-faktor diatas menyulitkan Pemerintah Daerah untuk langsung memanfaatkan dana/belanja pembangunannya. Akibatnya, pemanfaatan APBD sebagai "barang publik" yang sering digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen kunci dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah ini menjadi tertunda. Sehingga yang terjadi justru kesenjangan antar wilayah semakin meningkat.

Terkait dengan rasio belanja pembangunan sebagai salah satu indikator DF, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah untuk memastikan agar pemerintah daerah dapat menggunakan/menzalurkan dana/belanja pembangunan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya bisa mencapai tujuan desentralisasi fiskal, khususnya dalam menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan belanja pembangunan dengan tepat guna sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Dari seluruh model diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dari indikator rasio PAD dan rasio belanja pembangunan desentralisasi justru meningkatkan kesenjangan wilayah, namun jika dilihat dengan menggunakan indikator rasio total penerimaan daerah dan total pengeluaran daerah, kebijakan desentralisasi fiskal justru dapat

menurunkan tingkat kesenjangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya keberhasilan kebijakan perimbangan keuangan (terutama dari komponen DAU) dan efektifnya pengalokasian total belanja/pengeluaran pemerintah. Namun, jika dilihat dari rasio belanja pembangunan, kebijakan desentralisasi fiskal justru makin meningkatkan kesenjangan wilayah. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa dari pendekatan total pengeluaran daerah, belanja rutinlah yang berkontribusi dalam menurunkan kesenjangan wilayah. Hal ini terlihat dari besarnya persentase belanja rutin terhadap total belanja pada periode setelah desentralisasi fiskal (64%), yang berakibat lebih kuatnya efek dari belanja rutin tersebut daripada belanja pembangunan. Fakta ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil dalam menurunkan kesenjangan wilayah, karena pada intinya keberhasilan desentralisasi fiskal dapat terwujud apabila pemerintah daerah memiliki kemandirian fiskal yang direfleksikan oleh besarnya rasio PAD terhadap total penerimaannya.

#### **5.2.6 Variabel PDRB Perkapita**

Variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan wilayah di seluruh model. Artinya, kenaikan PDRB perkapita sebesar 1% akan menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah sebesar 0,087664% – 0,141379%.

#### **5.2.7 Variabel *Share* Sektor Manufaktur**

Dari hasil estimasi regresi, variabel manufaktur di seluruh model berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan wilayah. Artinya, kenaikan *share* sektor manufaktur sebesar 1% akan menurunkan kesenjangan wilayah sebesar 0,088566% – 0,135455%.

#### **5.2.8 Variabel Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah**

Di seluruh model, variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan wilayah. Artinya, kenaikan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah (di tiap propinsi) sebesar 1% akan



meningkatkan kesenjangan wilayah sebesar 0,101941% - 0,173462%. Arah pengaruh variabel ini terhadap kesenjangan wilayah akan berbeda jika ukuran yang digunakan berada di tingkat kabupaten/kota. Secara teoritis, kenaikan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di tingkat kabupaten/kota justru akan menurunkan kesenjangan wilayah. Sebab, dengan penambahan infrastruktur jalan akan semakin meningkatkan aksesibilitas yang berakibat pada menurunnya biaya transportasi. Dengan kondisi ini, akan terjadi aglomerasi industri yang bisa meningkatkan produktivitas yang berakibat pada peningkatan pertumbuhan tiap wilayah kabupaten/kota, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah tiap kabupaten/kota tersebut. Namun, karena rasio yang digunakan adalah di tingkat propinsi, yang berarti merupakan agregasi dari kabupaten/kota didalamnya, maka arah pengaruhnya terhadap tingkat kesenjangan wilayah menjadi sebaliknya.

#### **5.2.9 Variabel Derajat Keterbukaan (*Openness*)**

Variabel ini berpengaruh positif dan seperti halnya ketiga variabel kontrol di atas variabel ini juga signifikan di seluruh model. Kenaikan derajat keterbukaan sebesar 1% akan meningkatkan kesenjangan wilayah sebesar 0,012240% - 0,19573%.

#### **5.2.10 Variabel Investasi**

Variabel Investasi yang diproksikan oleh rasio PMTDB (Penanaman Modal Tetap dalam Negeri) terhadap total PDRB digunakan terbatas hanya pada model 1, 2 dan 4a. Ternyata, variabel investasi dalam ketiga model tersebut hasilnya tidak signifikan dalam mempengaruhi kesenjangan wilayah.

#### **5.2.11 Variabel Persentase Penduduk Perkotaan (*Urban*)**

Variabel *urban* hanya digunakan di model 3 dan 4b, signifikan pada model 3 saja. Variabel ini berpengaruh secara negatif terhadap

kesenjangan wilayah, artinya setiap kenaikan variabel *urban* sebesar 1% akan menurunkan kesenjangan wilayah sebesar 0,092482%.

#### **5.2.12 Variabel *Dummy* Kebijakan**

Dari seluruh model yang digunakan, ternyata variabel *dummy* kebijakan hanya signifikan pada dua model saja, yaitu model 3 (dengan indikator DF berupa rasio total pengeluaran daerah) dan model 4b (dengan indikator DF berupa *lag* satu tahun dari rasio belanja pembangunan). Sedangkan di model lainnya, variabel ini tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan pengaruh dari kondisi rasio PAD, rasio Penerimaan serta rasio belanja pembangunan (tanpa *lag*), terhadap tingkat kesenjangan wilayah baik sebelum maupun setelah kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan. Sedangkan pengaruh dari rasio total pengeluaran daerah dalam menurunkan tingkat kesenjangan wilayah, lebih besar pada periode setelah kebijakan desentralisasi fiskal dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku pada besarnya pengaruh dari rasio belanja pembangunan (di *lag* kan satu tahun) dalam meningkatkan kesenjangan wilayah.

#### **5.2.13 Variabel *Dummy* Pemekaran**

Dari hasil estimasi diketahui bahwa di seluruh model variabel *dummy* pemekaran signifikan berpengaruh pada kesenjangan wilayah dengan tanda positif. Berarti setelah propinsi-propinsi tersebut mengalami pemekaran, pengaruhnya dalam meningkatkan kesenjangan antar kabupaten/kota yang termasuk didalam wilayahnya menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum dimekarkan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, hasil dari studi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan Indeks Wiliamson (Iw) dapat disimpulkan terjadi peningkatan rata-rata kesenjangan dalam propinsi (*within province*) antara periode pre desentralisasi (0,466) dibanding dengan pasca desentralisasi (0,476). Jumlah propinsi yang mengalami kenaikan kesenjangan dalam wilayah (*within province inequality*) menunjukkan penurunan, yaitu 16 propinsi (pre desentralisasi) menjadi 12 propinsi (pasca desentralisasi). Sebaliknya yang terjadi pada jumlah propinsi yang mengalami penurunan kesenjangan, yaitu 10 propinsi (pre desentralisasi) menjadi 11 propinsi (pasca desentralisasi).
2. Analisis kuantitatif menunjukkan hasil sebagai berikut:
  - a) Kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi rasio PAD cenderung meningkatkan kesenjangan wilayah. Hal ini disebabkan oleh relatif kecilnya rasio PAD terhadap pendapatan (rata-rata 14,8%) serta timpangnya rasio PAD antar propinsi. Rendahnya rasio PAD disebabkan oleh relatif rendah dan terbatasnya basis pajak dan retribusi daerah, rendahnya kemampuan administrasi pemungutan di daerah, serta adanya kebocoran di daerah. Timpangnya rasio PAD terutama disebabkan oleh timpangnya kemampuan daerah yang relatif maju dengan daerah yang relatif tertinggal dalam memobilisasi/menggali sumber-sumber penerimaan bagi daerahnya.
  - b) Kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi total penerimaan daerah cenderung menurunkan kesenjangan wilayah. Hal ini berarti bahwa kebijakan dana perimbangan, khususnya dari komponen DAU, cukup berhasil menurunkan kesenjangan wilayah.

- c) Kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi total pengeluaran daerah cenderung menurunkan kesenjangan wilayah.
- d) Kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi rasio belanja pembangunan (dengan ataupun tanpa *lag* satu tahun) cenderung meningkatkan kesenjangan wilayah. Hal ini disebabkan telah terjadinya misalokasi dari penggunaan belanja pembangunan tersebut. Jika dihubungkan dengan hasil estimasi dari rasio total pengeluaran daerah yang justru berdampak dalam menurunkan tingkat kesenjangan, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan.
- e) Hasil ini bisa saja berubah karena beberapa variabel kontrol seperti rasio jalan terhadap luas wilayah dan derajat keterbukaan (*openness*), hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan (*counter intuitif*). Besar kemungkinan disebabkan karena persoalan pemilihan proksi data. Misalnya, dalam model ini data jalan merupakan agregasi di tingkat propinsi. Padahal, ada kemungkinan terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam stok jalan antar kabupaten/kota. Diharapkan studi selanjutnya dapat mengatasi hal ini.

## 6.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan diatas maka untuk meningkatkan keberhasilan pengaruh penerapan kebijakan desentralisasi fiskal dalam menurunkan kesenjangan antar wilayah direkomendasikan beberapa kebijakan berikut:

### 1. Di tingkat Pusat:

- a) Memperbaiki formula DAU dengan mempercepat proses penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) untuk tiap sektor sebagai basis pembagian DAU kepada daerah. Dengan adanya SPM, diharapkan agar alokasi DAU dapat lebih tepat sasaran sehingga dapat makin memperkecil kesenjangan antar wilayah.

- b) Meningkatkan peran DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan cara memastikan alokasinya ke wilayah yang membutuhkan sesuai dengan kriteria umum/khusus yang ditetapkan, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan kesenjangan wilayah.
2. Di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota:
- a) Mengalokasikan dana pembangunan untuk pengeluaran yang bersifat produktif dan investasi, sehingga dapat menstimulasi proses pembangunan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan cara:
- Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan
  - Melibatkan pemerintah pusat dalam memantau/kontrol terhadap proses perencanaan maupun pembangunan
  - Insentif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik dalam alokasi belanja pembangunan
- b) Meningkatkan kemampuan pihak pemerintah daerah dalam menggali/memobilisasi pendapatan daerahnya (PAD) sehingga bisa mewujudkan kemandirian fiskal yang pada akhirnya dapat menurunkan kesenjangan wilayah, dengan cara:
- Bantuan pemerintah pusat berupa bantuan teknis bagi daerah dengan SDM terbatas serta insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD nya secara signifikan
  - Menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah

### **6.3 Keterbatasan studi**

Keterbatasan studi ini terutama ditunjukkan oleh ruang lingkup wilayah penelitiannya yaitu pada tingkat propinsi. Padahal pelaksanaan desentralisasi fiskal utamanya terjadi di tingkat kabupaten dan kota, sesuai dengan dasar pemikiran bahwa desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, dari pusat ke kabupaten/kota.

#### 6.4 Usulan Studi Lanjutan

Beberapa studi lanjutan yang dapat dilakukan terkait dengan tema studi ini adalah:

1. Mengukur dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan wilayah, dengan analisa data panel tingkat kabupaten/kota.
2. Mengukur dampak DAU terhadap kesenjangan wilayah
3. Mengkaji hubungan antara rasio PAD dengan besarnya alokasi DAU terhadap kabupaten/kota. PAD dan DAU diduga saling mensubstitusi, artinya makin besar alokasi DAU disinyalir justru dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan PAD.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achjar Nuzul (2007), *"Disparitas Regional,"* Bahan Perkuliahan Perencanaan Ekonomi Regional, MPKP Universitas Indonesia
- Akai, Nobuo dan Sakata, Masayo (2005), *"Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: evidence from state Level Cross-sectional data for the United States",* CIRJE Discussion Papers
- Akita, T., and R.A Lukman (1995), *"Interregional Inequalities in Indonesia: A Sectoral Decomposition Analysis for 1975-1992,"* Bulletin of Indonesian Economic Studies, 31 (2), pp 61-81
- Akita, T., and R.A Lukman (2003), *"Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia using two-stage nested Theil Decomposition Method,"* Bulletin of Indonesian Economic Studies vol XX 2003
- Alisjahbana, Armida (2005), *"Kesenjangan Regional di Indonesia,"* Newsletter SMERU no.16
- Asmoro, Andry (2007), *"Desentralisasi Fiskal di Indonesia"* Bahan Perkuliahan Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah, MPKP Universitas Indonesia
- Astuti, Esther Sri, dan Joko T.H. (2007), *"Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Daerah di Indonesia,"* Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia No. 02 TH XXXVI Febuari 2003
- Baltagi, Badi H (2001), *"Econometric Analysis of Panel Data,"* John Wiley & Sons, LTD, England
- Bhakti, Achmad Sofie Adi Samabta (2004), *"Kesenjangan antar Daerah di Pulau Jawa ditinjau dari perspektif sektoral dan regional",:* Thesis MPKP, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi UI
- Badan Pusat Statistik (BPS); *Statistik Indonesia*, terbitan tahun 1995 - 2006, BPS, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ ; *Statistik Perhubungan*, terbitan tahun 1995 - 2006, BPS, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ ; *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kotamadya di Indonesia*, terbitan tahun 1994-1997, 1997-2000; 2000-2004; dan 2002-2006, BPS, Jakarta.

---

\_\_\_\_\_ ; *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi-Propinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha*, terbitan tahun 1993-1996, 1995-1998; 1997-2000 1999-2002; 2000-2003; dan 2002-2006, BPS, Jakarta.

---

\_\_\_\_\_ ; *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi-Propinsi di Indonesia menurut Penggunaan*, terbitan tahun 1994-1997; 1995-1998; 1997-2000; 2000-2003; dan 2002-2006, BPS, Jakarta.

Budiono (2002), "*Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal*," Makalah dalam Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional 11 Febuari 2002, Jakarta

Canaleta, Carlos G, Pedro P. Arzo, Manuel R. Garate and Roberto E. Orayen (2002), "*Decentralization and Regional Economic Disparities*," Departamento de Economia, Campus de Arrosadia, Universidad Publica de Navarra, Pamplona, Spain

Davoodi, Hamid R (2001), "*Fiscal Decentralization: Rasearch Summary*," IMF Research Bulletin

Devas, Nick (1989), "*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*," Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta

Elmi, Bachrul (2002), "*Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*," Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta

Esmara, Hendra (1987), "*Ketimpangan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan*," dalam Prijono Tjiptoherijanto (ed), *Perspektif Daerah dalam Pembangunan*, LPFE UI Jakarta

Etharina (2004), "*Ketimpangan antar Daerah di Indonesia: Dimensi Spasial dan Sektoral*," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, vol 1, Agustus 2005.

Etharina (2005), "*Disparitas Pendapatan antar Daerah di Indonesia*," :Tesis MPKP, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi UI

Gujarati, Damodar (1988), "*Basic Econometrics*" Second Edition. NewYork McGraw\_Hill

Hill, Hal (1989), "*The Economic and Social Dimensions of Regional Development in Indonesia*," *Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia* Vol. XXXVII No. 2 Tahun 1989

Hadi, Suprayoga (2007), "*Bahan Perkuliahan Perencanaan Ekonomi Kota: Urban Local Governance, Local Revenue*" MPKP UI



- Ismail, Tjip (2005), "*Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*", Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Ismail, Tjip (2007), "*Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*", Bahan Perkuliahan Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (MPKP UI)
- Kanbur, Ravi and Xiaobo Zhang (2004), "*Fifty Years of Regional Inequality in China: A Journey through Central Planning, Reform and Openness*", Research Paper No 2004/50, United Nations University-World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER)
- Kertawacana, Sulistiono (2004), "*Urgensi Perubahan Undang-undang BUMD*", Sinar Harapan 3 Desember 2004
- Khusaini, Mohammad (2006), "*Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*", BPFU Universitas Brawijaya, Malang
- Kim, Euijune, Sung Woong Hong and Soo Jung Ha (2003), "*Impacts of National Development and Decentralization Policies on Regional Income Disparity in Korea*", The Annals of Regional Science No. 37 2003
- Lincoln, Arsyad (1996), "*Ekonomi Pembangunan*" STIE YKPN, Yogyakarta.
- LPEM FEUI, MPKP FE UI (2002), "*Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Kompas
- Makmun, Purwiyanto (2005), "*Potret perekonomian daerah sebelum dan pada era desentralisasi fiskal*", dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 8, Nomor 4
- Martinez-Vazquez, Jorge and Robert M. Nab (2001), "*Fiscal Decentralization and Economic Growth*", Working paper 01-1, International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta
- Mudrajad Kuncoro (2000), "*Spasial dan Regional*" UPP AMP, YKPN Yogyakarta.
- Nugrahanto, Antonius Sriandwi (2007), "*Fiscal Decentralization and Regional Inequality in Indonesia 2001-2004*", Tesis Ilmu Ekonomi, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi UI

- Oates, Wallace E (1999), "*Essay on Fiscal Federalism*", Journal of Economic Literature Vol 37 No 3 1999
- Pusporini, Dewi (2006), "*Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Daerah di Indonesia Tahun 2001-2003*", Tesis MPKP, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi UI
- Prud'homme, Remy (1995), "*Dangers of Decentralization*", The World Bank Research Observer Vol 10. No 2, Washington
- Riyanto (2000), "*Makalah Pelatihan Ekonometrika*", LPEM Universitas Indonesia, Jakarta
- Riyanto (2005), "*Dampak Dana Perimbangan terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan antarwilayah*", Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1 No. 1 Agustus 2005
- Rodden, Jonathan (2002), "*The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance Around the World*", American Journal of Political Science, Massachusetts Institute of Technology, Vol 46 No 3.
- Samhadi, Sri Hartati (2005), "*Menakar Efektivitas DAU*", Kompas 15 Oktober 2005
- Saragih, Juli Panglima (2003), "*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*", Ghalia Indonesia
- Sidik, Mahfud (2002) "*Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*" Bahan Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta 2002
- Susanti, Hera, dan Ikhsan, Moh. (2000), "*Indikator-Indikator Makroekonomi*", Edisi ke-2. LP FEUI
- Susilo, Sri (2005), "*Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Perekonomian*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.5 No.2, Agustus 2005
- Tambunan, Tulus (2001), "*Perekonomian Indonesia*", Penerbit PT Ghalia Indonesia
- Tiebout, Charles M., (1956), "*A Pure Theory of Local Expenditures*", The Journal of Political Economy Vol. 64 No.5 1956
- Weingast, Barry R. and Yingyi Qian (1997), "*Federalism a Commitment to Preserving Market Incentives*", Journal of Economic Perspectives Vol 11 No.4 1997

- Wibisono, Yusuf (2003) "*Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Pengalaman Terkini dan Prospek ke Depan*," Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi
- Widhiyanto, Iman (2007), "*The Role of Fiscal Decentralization Policy Toward Regional Development and Regional Income Disparity in Indonesia 1994-2004*," :Tesis Ilmu Ekonomi, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Widodo, Nyoto (2006), "*Disparitas Regional Tenaga Kerja Terdidik dan Implikasinya terhadap Perekonomian Regional di Indonesia Tahun 1995-2003*," : Tesis MPKP, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi UI
- Wijayanti, Sri Wahyu (2006), "*Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kesenjangan Regional di Indonesia, Analisis data Panel Provinsi tahun 2001-2004*" : Tesis Ilmu Ekonomi, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi UI
- Williamson, JG (1965), "*Regional Inequality and the Process of National Development*", A Description of the Patterns, IBD.
- \_\_\_\_\_, "*Regional Income Inequality in Indonesia and the initial Impact of the economics crisis*", BIES vol II 2000.
- Winarno, Wing Wahyu (2007), "*Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*," UPP TIM YKPN, Yogyakarta
- World Bank (1993), "*The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*", Oxford University Press
- World Bank (2003), "*Decentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review Overview Report*", East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit, Jakarta
- Yuwono, Prpto (2004), "*Pengantar Ekonometrika*," Penerbit Andi, Yogyakarta

# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1: METODE PENGHITUNGAN KESENJANGAN WILAYAH

### 1. INDEKS WILIAMSON

Formulasinya:

$$I_w = \frac{1}{Y} \sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 * f_i / N}$$

dimana:

- $I_w$  = Indeks Williamson
- $Y_i$  = pendapatan perkapita wilayah i
- $Y$  = pendapatan per kapita nasional
- $f_i$  = jumlah penduduk di wilayah ke-i
- $N$  = jumlah penduduk nasional

Nilai Indeks Williamson ( $I_w$ ) antara nol dan satu ( $0 \leq I_w \leq 1$ ). Bila nilainya semakin mendekati nol, dapat diartikan sebagai disparitas (kesenjangan) rendah dan sebaliknya (*Williamson, 1965*).

### 2. INDEKS THEIL

Formulasinya:

$$I_T = I_{TW} + I_{TB}$$

$$I_{TB} = \sum_i \sum_j [Y_{ij}/Y] \log ([Y_{ij}/Y] / [n_{ij}/n])$$

$$I_{TW} = \sum_i [Y_i/Y] * T_i$$

$$T_i = \sum_j [Y_{ij}/Y_i] \log ([Y_{ij}/Y_i] / [n_{ij}/n_i])$$

dimana:

- $I_T$  = Indeks Theil (total) kesenjangan ekonomi regional
- $I_{TW}$  = Indeks Theil Within.
- $I_{TB}$  = Indeks Theil Between.
- $T_i$  = Sub Indeks Theil Within
- $Y_{ij}$  = PDRB propinsi j di wilayah i
- $Y$  = PDRB total diseluruh propinsi
- $Y_i$  = PDRB wilayah i
- $n_{ij}$  = Jumlah penduduk propinsi j di wilayah i
- $n$  = Jumlah penduduk total di seluruh propinsi
- $n_i$  = Jumlah penduduk wilayah i

Nilai koefisien  $I_T$  berada diantara nol dan satu ( $0 \leq I_T \leq 1$ ). Semakin tinggi nilai koefisien  $I_T$  berarti memberikan gambaran adanya kesenjangan (disparitas) perekonomian regional yang semakin

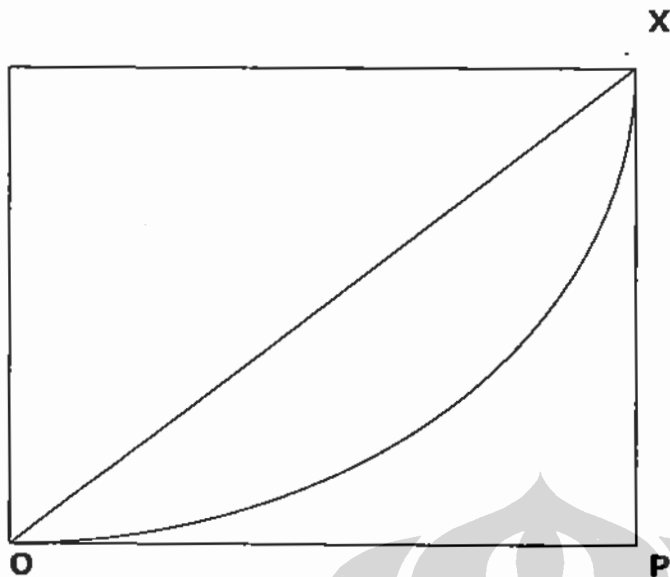
besar/tinggi, dan sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien  $I_T$  (mendekati nol) memberikan gambaran adanya kesenjangan perekonomian regional yang relatif kecil/rendah (Akita, 2001).

### 3. KURVA LORENZ

Langkah-langkah membuat kurva Lorenz:

1. Mengurutkan penduduk/individu berdasarkan tingkat pendapatannya dari mulai penduduk yang mempunyai pendapatan yang terkecil sampai dengan yang terbesar
2. Memplot data yang telah diurutkan tersebut:
  - a. Jumlah penerima pendapatan (penduduk/individu) digambarkan pada sumbu Y (horisontal), dalam persentase kumulatifnya. Misalnya, titik 20 menunjukkan 20% penduduk termiskin (paling rendah pendapatannya), dan pada titik 60 menunjukkan 60% penduduk terbawah pendapatannya, dan pada ujung sumbu horisontal menunjukkan jumlah 100% penduduk yang dihitung pendapatannya
  - b. Pangsa pendapatan yang diterima masing-masing persentase jumlah penduduk digambarkan pada sumbu X (vertikal). Jumlah ini juga kumulatif sampai 100%. Dengan demikian kedua sumbu tersebut sama panjangnya dan membentuk bujur sangkar
  - c. Gambarkan garis diagonal melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang diterima sama persis dengan persentase penerima pendapatan tersebut.

Kurva Lorenz menggambarkan proporsi dari total pendapatan yang dikuasai penduduk. Pada prinsipnya, semakin besar/luas kurva maka semakin tinggi derajat ketimpangan. Dari gambar berikut ini terlihat bahwa bentuk kurva Lorenz adalah luas dari daerah A. Jadi dapat disimpulkan, semakin luas daerah A berarti menunjukkan semakin tingginya derajat ketimpangan. Hal ini berlaku sebaliknya.



**Gambar 2.1 Kurva Lorenz**

#### 4. INDEKS GINI

Koefisien Gini diperoleh dari perbandingan (rasio) antara luas daerah/bidang A dengan luas segitiga OPX (lihat gambar 2.1). Nilai dari rasio tersebut berkisar antara 0 dan 1. Bila distribusi pendapatan merata secara sempurna maka semua titik akan terletak pada garis diagonal, sehingga luas kurva Lorenz akan sama dengan nol. Dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan dikatakan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol, dan berlaku sebaliknya. Nilai patokan:

- < 0,4 : tingkat ketimpangan rendah
- 0,4 - 0,5 : tingkat ketimpangan moderat
- > 0,5 : tingkat ketimpangan tinggi

Formulasi perhitungan:  $IG = 1 - \sum f_i (Y_i - Y_{i+1})$

dimana:

IG = Indeks atau koefisien Gini

$Y_i$  = proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas ke -i

$f_i$  = proporsi rumah tangga dalam kelas ke -i

## LAMPIRAN 2: HASIL UJI CHOW TEST DAN HAUSMAN TEST

### MODEL 1: RANDOM EFFECT

#### A. 6 VARIABEL KONTROL

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common

Intercept atau Fixed Effect

H0: Common Intercept

H1: Fix Effect

F hitung	df1(25)	df2(303) =	80.840808
		P-Value =	0.0000000

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

#### **Hausman Test**

(fixed versus random effects)

H0: random effects

Chi-square (9 d.f.)	9.3344419
p-value	0.0039925

#### B. 5 VARIABEL KONTROL

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common

Intercept atau Fixed Effect

H0: Common Intercept

H1: Fix Effect

F hitung	df1(25)	df2(304) =	85.210968
		P-Value =	0.0000000

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

#### **Hausman Test**

(fixed versus random effects)

H0: random effects

Chi-square (8 d.f.)	8.5804187
p-value	0.0389169

### MODEL 2: FIXED EFFECT\_WEIGHTED

#### A. 6 VARIABEL KONTROL

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common

Intercept atau Fixed Effect

H0: Common Intercept

H1: Fix Effect

F hitung	df1(25)	df2(304) =	21.298674
		P-Value =	0.0000000

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

#### **Hausman Test**

(fixed versus random effects)

H0: random effects

Chi-square (9 d.f.)	45.398012
p-value	0.0057902



**B. 5 VARIABEL KONTROL**

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common Intercept atau Fixed Effect  
H0: Common Intercept  
H1: Fix Effect

---

F hitung	df1(25)	df2(305) =	20.907640
		P-Value =	0.0000000

---

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

**Hausman Test**

(fixed versus random effects)  
H0: random effects

---

Chi-square (8 d.f.)	31.190872
p-value	0.0210983

---

**MODEL 3: FIXED EFFECT\_WEIGHTED**

**A. 6 VARIABEL KONTROL**

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common Intercept atau Fixed Effect  
H0: Common Intercept  
H1: Fix Effect

---

F hitung	df1(25)	df2(303) =	51.140980
		P-Value =	0.0000000

---

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

**Hausman Test**

(fixed versus random effects)  
H0: random effects

---

Chi-square (9 d.f.)	45.190324
p-value	1.307E-04

---

**B. 5 VARIABEL KONTROL**

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common Intercept atau Fixed Effect  
H0: Common Intercept  
H1: Fix Effect

---

F hitung	df1(25)	df2(303) =	85.876541
		P-Value =	0.0000000

---

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

**Hausman Test**

(fixed versus random effects)  
H0: random effects

---

Chi-square (8 d.f.)	23.872303
p-value	0.0005312

---

**MODEL 4A: FIXED EFFECT\_WEIGHTED**

**A. 6 VARIABEL KONTROL**

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common Intercept atau Fixed Effect  
H0: Common Intercept  
H1: Fix Effect

---

F hitung	df1(25)	df2(304) =	9.4451012
		P-Value =	0.0000000

---

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

**Hausman Test**  
(fixed versus random effects)  
H0: random effects

Chi-square (8 d.f.)	96.581987
p-value	0.0000000

**B. 5 VARIABEL KONTROL**

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common Intercept atau Fixed Effect  
H0: Common Intercept  
H1: Fix Effect

F hitung	df1(25)	df2(305) =	9.3679994
		P-Value =	0.0000000

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

**Hausman Test**  
(fixed versus random effects)  
H0: random effects

Chi-square (8 d.f.)	96.581987
p-value	0.0000000

**MODEL 4B: FXED EFFECT\_WEIGHTED**

**A. 6 VARIABEL KONTROL**

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common Intercept atau Fixed Effect  
H0: Common Intercept  
H1: Fix Effect

F hitung	df1(25)	df2(305) =	96.298341
		P-Value =	0.0000000

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

**Hausman Test**  
(fixed versus random effects)  
H0: random effects

Chi-square (10 d.f.)	3.1928424
p-value	0.0000000

**MODEL 4B: 5 VARIABEL KONTROL**

**Uji Chow** Untuk Menentukan Common Intercept atau Fixed Effect  
H0: Common Intercept  
H1: Fix Effect

F hitung	df1(25)	df2(305) =	86.424733
		P-Value =	0.0000000

Tolak H0 Jika P-Value < Alpha

**Hausman Test**  
(fixed versus random effects)  
H0: random effects

Chi-square (8 d.f.)	96.581987
p-value	0.0000000

### LAMPIRAN 3: HASIL PENGOLAHAN DATA (REGRESI DATA PANEL)

#### MODEL 1:

$$I_w = \alpha_0 + \beta_1 LAI + \beta_2 LCAP + \beta_3 LMANUF + \beta_4 LURBAN + \beta_5 LROAD + \beta_6 LINV + \beta_7 LOPENNES + \beta_8 DUMMY\_K + \beta_9 DUMMY\_P + \epsilon_1$$

#### a. 6 VARIABEL KONTROL

Dependent Variable: LOG(IW?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 06/17/08 Time: 10:06  
 Sample: 1994 2006  
 Included observations: 13  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 338

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.161288	0.708379	3.051033	0.0025
LOG(LAI?)	0.074939	0.025798	2.904832	0.0039
LOG(CAP?)	-0.139288	0.034063	-4.089100	0.0001
LOG(MANUF?)	-0.127033	0.038643	-3.287392	0.0011
LOG(ROAD?)	0.175801	0.056471	3.113121	0.0020
LOG(INVS?)	-0.017358	0.021572	-0.804638	0.4217
LOG(OPENNES?)	0.013510	0.006714	2.012270	0.0451
K_DUMMY?	0.008489	0.015854	0.535423	0.5928
LOG(URBAN?)	-0.050336	0.045348	-1.109998	0.2679
P_DUMMY?	0.098187	0.029305	3.350494	0.0009
Fixed Effects (Cross)				
_NAD--C	-0.056997			
_SUMUT--C	0.052344			
_SUMBAR--C	0.095214			
_RIAU--C	0.485851			
_JAMBI--C	-0.238053			
_SUMSEL--C	-0.043188			
_BNGKL--C	-0.321098			
_LMPG--C	-0.619759			
_DKI--C	-0.219031			
_JABAR--C	0.199309			
_JATENG--C	0.438688			
_YOGYA--C	-0.427890			
_JATIM--C	0.967600			
_KALBAR--C	-0.315936			
_KALTENG--C	-0.494221			
_KALSEL--C	0.054525			
_KALTIM--C	0.530923			
_SULUT--C	-0.210606			
_SULTENG--C	-0.638490			
_SULSEL--C	0.121920			
_SULTRA--C	-0.142211			
_BALI--C	-0.438873			
_NTB--C	0.109580			
_NTT--C	-0.426345			
_MALUKU--C	0.031834			
_PAPUA--C	1.504910			
Weighted Statistics				
R-squared	0.975617	Mean dependent var		-1.264655
Adjusted R-squared	0.972881	S.D. dependent var		0.937678
S.E. of regression	0.154416	Sum squared resid		7.224867
F-statistic	356.5748	Durbin-Watson stat		1.959312
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.883015	Mean dependent var		-0.868762
Sum squared resid	8.276972	Durbin-Watson stat		1.946563

**b. 5 VARIABEL KONTROL (Tanpa Variabel Kontrol "Urban")**

Dependent Variable: LOG(IW?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 06/17/08 Time: 10:15  
 Sample: 1994 2006  
 Included observations: 13  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 338

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.262782	0.714684	3.166130	0.0017
LOG(LAI?)	0.079479	0.025440	3.124207	0.0020
LOG(CAP?)	-0.141379	0.034309	-4.120791	0.0000
LOG(MANUF?)	-0.117664	0.036798	-3.197513	0.0015
LOG(ROAD?)	0.173462	0.057208	3.032142	0.0026
LOG(INVS?)	-0.016905	0.021142	-0.799599	0.4246
LOG(OPENNES?)	0.012417	0.006617	1.876625	0.0615
K_DUMMY?	0.003817	0.015029	0.253954	0.7997
P_DUMMY?	0.098072	0.029512	3.323141	0.0010

Fixed Effects (Cross)

_NAD--C	-0.042003
_SUMUT--C	0.032680
_SUMBAR--C	0.101488
_RIAU--C	0.472482
_JAMBI--C	-0.234411
_SUMSEL--C	-0.050027
_BNGKL--C	-0.304492
_LMPG--C	-0.595112
_DKI--C	-0.275983
_JABAR--C	0.167924
_JATENG--C	0.425322
_YOGYA--C	-0.457918
_JATIM--C	0.952190
_KALBAR--C	-0.302033
_KALTENG--C	-0.477051
_KALSEL--C	0.050349
_KALTIM--C	0.496746
_SULUT--C	-0.208800
_SULTENG--C	-0.616351
_SULSEL--C	0.126132
_SULTRA--C	-0.123062
_BALI--C	-0.450968
_NTB--C	0.124616
_NTT--C	-0.380790
_MALUKU--C	0.043552
_PAPUA--C	1.525519

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

<b>R-squared</b>	<b>0.974873</b>	Mean dependent var	-1.255269
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.972145</b>	S.D. dependent var	0.922595
S.E. of regression	0.153979	Sum squared resid	7.207716
F-statistic	357.4063	<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>1.962013</b>
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>		

Unweighted Statistics

R-squared	0.882423	Mean dependent var	-0.868762
Sum squared resid	8.318870	Durbin-Watson stat	1.936666

**MODEL 2:**

$$I_w = \alpha_1 + \beta_1 LRI + \beta_2 LCAP + \beta_3 LMANUF + \beta_4 LURBAN + \beta_5 LROAD + \beta_6 LINV + \beta_7 LOPENNES + \beta_8 DUMMY_K + \beta_9 DUMMY_P + \epsilon_1$$

**a. 6 VARIABEL KONTROL**

Dependent Variable: LOG(IW?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 07/29/08 Time: 22:38  
 Sample: 1994 2006  
 Included observations: 13  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 338

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.463521	0.736829	1.986243	0.0479
LOG(LRI?)	-0.005138	0.007844	-0.655052	0.0952
LOG(INVS?)	-0.013558	0.021138	-0.641398	0.5217
LOG(PDRBPERCAP?)	-0.111143	0.035895	-3.096339	0.0021
LOG(JALAN?)	0.158742	0.059588	2.663980	0.0081
LOG(OPENNES?)	0.015483	0.006829	2.267440	0.0241
LOG(MANUF?)	-0.109171	0.037142	-2.939294	0.0035
LOG(URBAN?)	-0.068092	0.044201	-1.540495	0.1245
K_DUMMY?	0.020112	0.017130	1.174052	0.2413
P_DUMMY?	0.085506	0.030526	2.801068	0.0054
Fixed Effects (Cross)				
_NAD--C	-0.114845			
_SUMUT--C	0.074074			
_SUMBAR--C	0.093639			
_RIAU--C	0.475436			
_JAMBI--C	-0.244771			
_SUMSEL--C	-0.034746			
_BNGKL--C	-0.331164			
_LMPG--C	-0.626268			
_DKI--C	-0.088683			
_JABAR--C	0.279592			
_JATENG--C	0.488338			
_YOGYA--C	-0.355912			
_JATIM--C	1.019532			
_KALBAR--C	-0.379413			
_KALTENG--C	-0.538502			
_KALSEL--C	0.038987			
_KALTIM--C	0.468271			
_SULUT--C	-0.184643			
_SULTENG--C	-0.690990			
_SULSEL--C	0.143779			
_SULTRA--C	-0.190981			
_BALI--C	-0.334173			
_NTB--C	0.119240			
_NTT--C	-0.454690			
_MALUKU--C	-0.006526			
_PAPUA--C	1.375418			
R-squared	0.974334	Mean dependent var	-1.235853	
Adjusted R-squared	0.971454	S.D. dependent var	0.914765	
S.E. of regression	0.154555	Sum squared resid	7.237865	
F-statistic	338.3065	Durbin-Watson stat	1.954852	
Prob(F-statistic)	0.000000	Unweighted Statistics		
R-squared	0.879355	Mean dependent var	-0.868762	
Sum squared resid	8.535915	Durbin-Watson stat	1.920573	

**b. 5 VARIABEL KONTROL (Tanpa Variabel Kontrol "Urban")**

Dependent Variable: LOG(IW?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 07/29/08 Time: 22:03  
 Sample: 1994 2006  
 Included observations: 13  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 338

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.500435	0.746180	2.010822	0.0452
LOG(LRI?)	-0.006752	0.007782	-0.867681	0.0863
LOG(INVS?)	-0.011754	0.020562	-0.571671	0.5680
LOG(PDRBPERCAP?)	-0.112092	0.036140	-3.101599	0.0021
LOG(JALAN?)	0.147417	0.060479	2.437492	0.0154
LOG(OPENNES?)	0.013889	0.006728	2.064474	0.0398
LOG(MANUF?)	-0.099267	0.034877	-2.846201	0.0047
K_DUMMY?	0.015861	0.016727	0.948208	0.3438
P_DUMMY?	0.085642	0.030732	2.786742	0.0057

Fixed Effects (Cross)

_NAD--C	-0.098272
_SUMUT--C	0.053088
_SUMBAR--C	0.102085
_RIAU--C	0.451766
_JAMBI--C	-0.244646
_SUMSEL--C	-0.044156
_BNGKL--C	-0.315187
_LMPG--C	-0.593499
_DKI--C	-0.130586
_JABAR--C	0.250969
_JATENG--C	0.484120
_YOGYA--C	-0.379036
_JATIM--C	1.011197
_KALBAR--C	-0.373993
_KALTENG--C	-0.517072
_KALSEL--C	0.029979
_KALTIM--C	0.406848
_SULUT--C	-0.175719
_SULTENG--C	-0.673133
_SULSEL--C	0.152976
_SULTRA--C	-0.174480
_BALI--C	-0.334619
_NTB--C	0.137694
_NTT--C	-0.396990
_MALUKU--C	-0.004755
_PAPUA--C	1.375421

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.973347	Mean dependent var	-1.224492
Adjusted R-squared	0.970454	S.D. dependent var	0.896949
S.E. of regression	0.154177	Sum squared resid	7.226229
F-statistic	336.4196	Durbin-Watson stat	1.947111
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.878427	Mean dependent var	-0.868762
Sum squared resid	8.601562	Durbin-Watson stat	1.905658

**MODEL 3:**

$$I_W = \alpha_0 + \beta_1 LPI + \beta_2 LCAP + \beta_3 LMANUF + \beta_4 LURBAN + \beta_5 LROAD + \beta_6 LINV + \beta_7 LOPENNES + \beta_8 DUMMY\_K + \beta_9 DUMMY\_P + \epsilon_1$$

**a. 6 VARIABEL KONTROL**

Dependent Variable: LOG(IW7)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/29/08 Time: 20:03

Sample: 1994 2006

Included observations: 13

Cross-sections Included: 26

Total pool (balanced) observations: 338

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.398618	0.819148	0.486625	0.6269
LOG(LPI?)	<b>-0.074192</b>	<b>0.022407</b>	<b>-3.311109</b>	<b>0.0010</b>
LOG(URBAN?)	<b>-0.096358</b>	<b>0.046139</b>	<b>-2.088435</b>	<b>0.0376</b>
LOG(PDRBPERCAP?)	<b>-0.088309</b>	<b>0.038365</b>	<b>-2.301823</b>	<b>0.0220</b>
LOG(JALAN?)	0.091914	0.062155	1.478788	0.1402
LOG(OPENNES?)	<b>0.012107</b>	<b>0.006971</b>	<b>1.736581</b>	<b>0.0835</b>
LOG(MANUF?)	<b>-0.098398</b>	<b>0.035275</b>	<b>-2.789419</b>	<b>0.0056</b>
LOG(INVS?)	0.006179	0.023258	0.265647	0.7907
K_DUMMY?	<b>0.048378</b>	<b>0.017332</b>	<b>2.791163</b>	<b>0.0056</b>
P_DUMMY?	<b>0.080698</b>	<b>0.032035</b>	<b>2.519085</b>	<b>0.0123</b>
Fixed Effects (Cross)				
_NAD--C	-0.126244			
_SUMUT--C	0.124559			
_SUMBAR--C	0.069686			
_RIAU--C	0.438323			
_JAMBI--C	-0.322515			
_SUMSEL--C	-0.038980			
_BNGKL--C	-0.403579			
_LMPG--C	-0.656430			
_DKI--C	0.175319			
_JABAR--C	0.428321			
_JATENG--C	0.635609			
_YOGYA--C	-0.268151			
_JATIM--C	1.146897			
_KALBAR--C	-0.519124			
_KALTENG--C	-0.555659			
_KALSEL--C	-0.015129			
_KALTIM--C	0.354055			
_SULUT--C	-0.148914			
_SULTENG--C	-0.733442			
_SULSEL--C	0.189024			
_SULTRA--C	-0.299871			
_BALI--C	-0.245886			
_NTB--C	0.100503			
_NTT--C	-0.462690			
_MALUKU--C	-0.100023			
_PAPUA--C	1.234342			
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	<b>0.966158</b>	Mean dependent var	-1.184557	
Adjusted R-squared	<b>0.962361</b>	S.D. dependent var	0.785238	
S.E. of regression	0.152342	Sum squared resid	7.032076	
F-statistic	254.4256	<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>1.963429</b>	
Prob(F-statistic)	<b>0.000000</b>	Unweighted Statistics		
R-squared	0.882246	Mean dependent var	-0.868762	
Sum squared resid	8.331398	Durbin-Watson stat	1.931128	

**b. 5 VARIABEL KONTROL (Tanpa Variabel Kontrol "Investasi")**

Dependent Variable: LOG(IW?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 07/29/08 Time: 19:41  
 Sample: 1994 2006

Included observations: 13  
 Cross-sections Included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 338

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.476805	0.816614	0.583881	0.5597
LOG(LPI?)	-0.070391	0.020949	-3.360121	0.0009
LOG(URBAN?)	-0.092482	0.044848	-2.062149	0.0400
LOG(PDRBPERCAP?)	-0.087664	0.038147	-2.298053	0.0222
LOG(JALAN?)	0.101941	0.061547	1.656299	0.0987
LOG(OPENNES?)	0.012240	0.006835	1.790806	0.0743
LOG(MANUF?)	-0.088566	0.031435	-2.817440	0.0052
K_DUMMY?	0.045371	0.015901	2.853372	0.0046
P_DUMMY?	0.076560	0.031583	2.424058	0.0159

**Fixed Effects (Cross)**

_NAD--C	-0.130361
_SUMUT--C	0.113527
_SUMBAR--C	0.070835
_RIAU--C	0.445489
_JAMBI--C	-0.314989
_SUMSEL--C	-0.037752
_BNGKL--C	-0.390470
_LMPG--C	-0.652939
_DKI--C	0.131665
_JABAR--C	0.409759
_JATENG--C	0.615022
_YOGYA--C	-0.287230
_JATIM--C	1.128651
_KALBAR--C	-0.503970
_KALTENG--C	-0.552319
_KALSEL--C	-0.013082
_KALTIM--C	0.362241
_SULUT--C	-0.153817
_SULTENG--C	-0.721484
_SULSEL--C	0.186412
_SULTRA--C	-0.286696
_BALI--C	-0.257793
_NTB--C	0.109987
_NTT--C	-0.452530
_MALUKU--C	-0.083606
_PAPUA--C	1.265451

**Effects Specification**

Cross-section fixed (dummy variables)

	Weighted Statistics		
<b>R-squared</b>	<b>0.967426</b>	Mean dependent var	-1.195878
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.963890</b>	S.D. dependent var	0.802143
S.E. of regression	0.152427	Sum squared resid	7.063173
F-statistic	273.5968	<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>1.961725</b>
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>		
		Unweighted Statistics	
R-squared	0.881890	Mean dependent var	-0.868762
Sum squared resid	8.356557	Durbin-Watson stat	1.925864



#### MODEL 4:

$$I_w = \alpha_0 + \beta_1 I_{DE} + \beta_2 LCAP + \beta_3 LMANUF + \beta_4 LURBAN + \beta_5 LROAD + \beta_6 LINV + \beta_7 LOPENNES + \beta_8 DUMMY_K + \beta_9 DUMMY_P + \epsilon_1$$

#### a. 6 VARIABEL KONTROL

Dependent Variable: LOG(IW?)  
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 06/21/08 Time: 12:08  
Sample: 1994 2006  
Included observations: 13  
Cross-sections Included: 26  
Total pool (balanced) observations: 338  
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.832654	0.725716	2.525305	0.0121
LOG(DE?)	0.057894	0.033119	1.748031	0.0815
LOG(CAP?)	-0.129667	0.035571	-3.645254	0.0003
LOG(URBAN?)	-0.063281	0.043900	-1.441502	0.1505
LOG(MANUF?)	-0.116128	0.037848	-3.068313	0.0023
LOG(ROAD?)	0.162137	0.057555	2.817062	0.0052
LOG(INVS?)	-0.020742	0.021251	-0.976040	0.3298
LOG(OPENNES?)	0.017955	0.006754	2.658384	0.0083
K_DUMMY?	0.025831	0.016343	1.580571	0.1150
P_DUMMY?	0.093883	0.029487	3.183834	0.0016
Fixed Effects (Cross)				
_NAD--C	-0.132438			
_SUMUT--C	0.081292			
_SUMBAR--C	0.105141			
_RIAU--C	0.461930			
_JAMBI--C	-0.244512			
_SUMSEL--C	-0.044074			
_BNGKL--C	-0.333941			
_LMPG--C	-0.615812			
_DKI--C	-0.075406			
_JABAR--C	0.269297			
_JATENG--C	0.497891			
_YOGYA--C	-0.333297			
_JATIM--C	1.028443			
_KALBAR--C	-0.360597			
_KALTENG--C	-0.542702			
_KALSEL--C	0.040053			
_KALTIM--C	0.468127			
_SULUT--C	-0.190161			
_SULTENG--C	-0.688884			
_SULSEL--C	0.142613			
_SULTRA--C	-0.182432			
_BALI--C	-0.341299			
_NTB--C	0.114273			
_NTT--C	-0.470349			
_MALUKU--C	-0.034321			
_PAPUA--C	1.381166			

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

	Weighted Statistics		
R-squared	0.977510	Mean dependent var	-1.268222
Adjusted R-squared	0.974987	S.D. dependent var	0.982850
S.E. of regression	0.155443	Sum squared resid	7.321256
F-statistic	387.3500	Durbin-Watson stat	1.959820
Prob(F-statistic)	0.000000		
	Unweighted Statistics		
R-squared	0.879946	Mean dependent var	-0.868762
Sum squared resid	8.494082	Durbin-Watson stat	1.917686

**b. 5 VARIABEL KONTROL (Tanpa Variabel Kontrol "Urban")**

Dependent Variable: LOG(IW?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 06/21/08 Time: 12:19  
 Sample: 1994 2006  
 Included observations: 13  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 338  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.915782	0.731943	2.617392	0.0093
LOG(DE?)	0.060203	0.033247	1.810800	0.0712
LOG(CAP?)	-0.132321	0.035752	-3.701071	0.0003
LOG(MANUF?)	-0.107928	0.035919	-3.004763	0.0029
LOG(ROAD?)	0.153979	0.058458	2.634023	0.0089
LOG(INVS?)	-0.019524	0.020932	-0.932751	0.3517
LOG(OPENNES?)	0.016694	0.006709	2.488108	0.0134
K_DUMMY?	0.021393	0.016054	1.332619	0.1837
P_DUMMY?	0.094092	0.029671	3.171238	0.0017

**Fixed Effects (Cross)**

_NAD--C	-0.117490
_SUMUT--C	0.061518
_SUMBAR--C	0.113802
_RIAU--C	0.441095
_JAMBI--C	-0.242662
_SUMSEL--C	-0.052810
_BNGKL--C	-0.318423
_LMPG--C	-0.584911
_DKI--C	-0.120179
_JABAR--C	0.239699
_JATENG--C	0.490986
_YOGYA--C	-0.356968
_JATIM--C	1.018535
_KALBAR--C	-0.350899
_KALTENG--C	-0.523503
_KALSEL--C	0.033312
_KALTIM--C	0.416101
_SULUT--C	-0.183782
_SULTENG--C	-0.669561
_SULSEL--C	0.149764
_SULTRA--C	-0.164792
_BALI--C	-0.344990
_NTB--C	0.130520
_NTT--C	-0.418843
_MALUKU--C	-0.031356
_PAPUA--C	1.385837

**Effects Specification**

Cross-section fixed (dummy variables)

	Weighted Statistics		
<b>R-squared</b>	<b>0.976123</b>	Mean dependent var	-1.253287
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.973531</b>	S.D. dependent var	0.953131
S.E. of regression	0.155067	Sum squared resid	7.309912
F-statistic	376.6060	<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>1.952899</b>
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>		
		Unweighted Statistics	
R-squared	0.879085	Mean dependent var	-0.868762
Sum squared resid	8.555024	Durbin-Watson stat	1.902260

**MODEL 4B:**

$$I_W = \alpha_1 + (\text{DE}-1) + \beta_2 \text{LCAP} + \beta_3 \text{LMANUF} + \beta_4 \text{LURBAN} + \beta_5 \text{LROAD} + \beta_6 \text{LINV} + \beta_7 \text{LOPENNES} + \beta_8 \text{DUMMY}_K + \beta_9 \text{DUMMY}_P + \varepsilon_1$$

**a. 6 VARIABEL KONTROL**

Dependent Variable: LOG(IW?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 06/17/08 Time: 11:19  
 Sample: 1994 2006  
 Included observations: 13  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 338  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.874801	0.723291	2.592042	0.0100
LOG(CAP?)	-0.129385	0.034994	-3.697314	0.0003
LOG(MANUF?)	-0.115014	0.037790	-3.043497	0.0025
LOG(ROAD?)	0.162693	0.057447	2.832054	0.0049
LOG(INVS?)	-0.023402	0.021529	-1.086999	0.2779
LOG(OPENNES?)	0.018416	0.006778	2.716848	0.0070
LOG(URBAN?)	-0.063029	0.043750	-1.440658	0.1507
DE7-1	0.164312	0.086064	1.909188	0.0572
K_DUMMY?	0.024541	0.015904	1.543064	0.0939
P_DUMMY?	0.095044	0.029354	3.237804	0.0013
Fixed Effects (Cross)				
_NAD--C	-0.136782			
_SUMUT--C	0.081727			
_SUMBAR--C	0.106932			
_RIAU--C	0.458422			
_JAMBI--C	-0.243845			
_SUMSEL--C	-0.043538			
_BNGKL--C	-0.333543			
_LMPG--C	-0.613870			
_DKI--C	-0.078344			
_JABAR--C	0.268901			
_JATENG--C	0.496944			
_YOGYA--C	-0.334072			
_JATIM--C	1.030289			
_KALBAR--C	-0.358339			
_KALTENG--C	-0.543933			
_KALSEL--C	0.039491			
_KALTIM--C	0.464259			
_SULUT--C	-0.189557			
_SULTENG--C	-0.687878			
_SULSEL--C	0.144377			
_SULTRA--C	-0.180939			
_BALI--C	-0.342158			
_NTB--C	0.116906			
_NTT--C	-0.468324			
_MALUKU--C	-0.036591			
_PAPUA--C	1.383464			

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

	Weighted Statistics		
R-squared	0.977267	Mean dependent var	-1.268607
Adjusted R-squared	0.974716	S.D. dependent var	0.977724
S.E. of regression	0.155468	Sum squared resid	7.323589
F-statistic	383.1030	Durbin-Watson stat	1.959037
Prob(F-statistic)	0.000000		
	Unweighted Statistics		
R-squared	0.880059	Mean dependent var	-0.868762
Sum squared resid	8.486095	Durbin-Watson stat	1.915280

**b. 5 VARIABEL KONTROL (Tanpa Variabel Kontrol "Investasi")**

Dependent Variable: LOG(IW?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 06/21/08 Time: 17:31  
 Sample: 1994 2006  
 Included observations: 13  
 Cross-sections Included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 338  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

<b>C</b>	<b>1.904222</b>	<b>0.723450</b>	<b>2.632139</b>	<b>0.0089</b>
<b>LOG(PDRBPERCAP?)</b>	<b>-0.131118</b>	<b>0.034996</b>	<b>-3.746672</b>	<b>0.0002</b>
<b>LOG(MANUF?)</b>	<b>-0.135455</b>	<b>0.033530</b>	<b>-4.039879</b>	<b>0.0001</b>
<b>LOG(JALAN?)</b>	<b>0.163982</b>	<b>0.057523</b>	<b>2.850736</b>	<b>0.0047</b>
<b>LOG(URBAN?)</b>	<b>-0.058319</b>	<b>0.047647</b>	<b>-1.336130</b>	<b>0.1825</b>
<b>LOG(OPENNES?)</b>	<b>0.019573</b>	<b>0.006699</b>	<b>2.921798</b>	<b>0.0037</b>
<b>DE7-1</b>	<b>0.138574</b>	<b>0.082874</b>	<b>1.672107</b>	<b>0.0955</b>
<b>K_DUMMY?</b>	<b>0.028404</b>	<b>0.015546</b>	<b>1.827050</b>	<b>0.0687</b>
<b>P_DUMMY?</b>	<b>0.097832</b>	<b>0.029292</b>	<b>3.339906</b>	<b>0.0009</b>

Fixed Effects (Cross)

_NAD--C	-0.111365
_SUMUT--C	0.091842
_SUMBAR--C	0.105745
_RIAU--C	0.454932
_JAMBI--C	-0.239422
_SUMSEL--C	-0.040897
_BNGKL--C	-0.344360
_LMPG--C	-0.613812
_DKI--C	-0.089458
_JABAR--C	0.281691
_JATENG--C	0.505608
_YOGYA--C	-0.344460
_JATIM--C	1.039708
_KALBAR--C	-0.355538
_KALTENG--C	-0.561041
_KALSEL--C	0.047843
_KALTIM--C	0.484703
_SULUT--C	-0.191606
_SULTENG--C	-0.688220
_SULSEL--C	0.142381
_SULTRA--C	-0.186204
_BALI--C	-0.348146
_NTB--C	0.096302
_NTT--C	-0.482648
_MALUKU--C	-0.020542
_PAPUA--C	1.366962

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

	Weighted Statistics		
<b>R-squared</b>	<b>0.976918</b>	Mean dependent var	-1.266224
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.974413</b>	S.D. dependent var	0.971521
S.E. of regression	0.155404	Sum squared resid	7.341744
F-statistic	389.8997	<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>1.967625</b>
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>		
	Unweighted Statistics		
R-squared	0.879961	Mean dependent var	-0.868762
Sum squared resid	8.493019	Durbin-Watson stat	1.917722

LAMPIRAN 4: DATA

INDIKATOR DESENTRALISASI FISKAL: LAI (LOGARITMA NATURAL DARI AUTONOMY INDICATOR)

NO.	PROPINSI	TAHUN													
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Prop.NAD	0.108	0.111	0.112	0.102	0.103	0.079	0.054	0.030	0.041	0.039	0.057	0.049	0.066	
2	Prop.Sumut	0.193	0.205	0.203	0.200	0.134	0.139	0.168	0.133	0.161	0.190	0.240	0.231	0.168	
3	Prop.Sumbar	0.161	0.174	0.165	0.155	0.113	0.110	0.099	0.103	0.126	0.138	0.158	0.167	0.120	
4	Prop.Riau	0.168	0.171	0.175	0.202	0.206	0.174	0.158	0.083	0.122	0.122	0.126	0.104	0.107	
5	Prop.Jambi	0.104	0.115	0.118	0.111	0.079	0.097	0.118	0.109	0.140	0.146	0.171	0.169	0.119	
6	Prop.Sumsel	0.120	0.142	0.140	0.141	0.098	0.106	0.133	0.103	0.135	0.141	0.152	0.152	0.121	
7	Prop.Bngkl	0.097	0.115	0.108	0.094	0.080	0.071	0.063	0.074	0.074	0.079	0.127	0.136	0.076	
8	Prop.Lmpg	0.115	0.140	0.145	0.131	0.089	0.081	0.083	0.088	0.107	0.131	0.153	0.166	0.122	
9	Prop.DKI	0.615	0.624	0.600	0.636	0.494	0.405	0.464	0.497	0.532	0.527	0.557	0.564	0.545	
10	Prop.Jabar	0.254	0.267	0.284	0.271	0.212	0.204	0.226	0.185	0.224	0.240	0.264	0.295	0.430	
11	Prop.Jateng	0.191	0.207	0.208	0.212	0.176	0.160	0.161	0.139	0.186	0.179	0.196	0.226	0.189	
12	Prop.Yogya	0.198	0.208	0.214	0.211	0.178	0.183	0.142	0.158	0.201	0.197	0.222	0.241	0.199	
13	Prop.Jatim	0.233	0.263	0.265	0.266	0.209	0.202	0.186	0.168	0.205	0.212	0.246	0.261	0.213	
14	Prop.Kalbar	0.097	0.095	0.096	0.097	0.085	0.082	0.079	0.101	0.120	0.094	0.085	0.116	0.086	
15	Prop.Kalteng	0.047	0.050	0.055	0.062	0.040	0.044	0.061	0.100	0.104	0.183	0.092	0.089	0.069	
16	Prop.Kalsel	0.112	0.126	0.138	0.130	0.093	0.107	0.113	0.124	0.144	0.153	0.175	0.189	0.152	
17	Prop.Kaltim	0.149	0.147	0.146	0.154	0.113	0.097	0.134	0.052	0.093	0.101	0.164	0.134	0.089	
18	Prop.Sulut	0.114	0.116	0.112	0.104	0.101	0.092	0.109	0.093	0.105	0.109	0.133	0.124	0.082	
19	Prop.Sulteng	0.067	0.066	0.076	0.074	0.078	0.080	0.095	0.067	0.087	0.083	0.092	0.089	0.067	
20	Prop.Sulse	0.137	0.159	0.160	0.153	0.118	0.109	0.099	0.110	0.131	0.136	0.146	0.146	0.117	
21	Prop.Sultra	0.067	0.066	0.067	0.072	0.051	0.055	0.059	0.059	0.090	0.088	0.101	0.101	0.065	
22	Prop.Bali	0.342	0.358	0.361	0.363	0.434	0.416	0.382	0.285	0.334	0.266	0.325	0.340	0.277	
23	Prop.NTB	0.103	0.113	0.124	0.123	0.123	0.086	0.089	0.077	0.108	0.105	0.114	0.114	0.106	
24	Prop.NTT	0.055	0.065	0.068	0.061	0.061	0.049	0.046	0.045	0.074	0.075	0.092	0.083	0.072	
25	Prop.Maluku	0.067	0.069	0.069	0.061	0.067	0.067	0.052	0.118	0.035	0.047	0.069	0.054	0.046	
26	Prop.Papua	0.037	0.041	0.042	0.052	0.077	0.041	0.026	0.027	0.037	0.034	0.058	0.047	0.027	

INDIKATOR DESENTRALISASI FISKAL: LRI (LOGARITMA NATURAL DARI REVENUE INDICATOR )

NO.	PROPINSI	TAHUN													
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Prop.NAD	0.006	0.0064	0.0061	0.005754	0.000417	0.0049	0.0066	0.01040	0.0100	0.01202	0.0111	0.0141	0.0161	
2	Prop.Sumut	0.014	0.0148	0.0141	0.013957	0.001055	0.0106	0.0104	0.01522	0.0182	0.01934	0.0148	0.0153	0.0181	
3	Prop.Sumbar	0.006	0.0065	0.0063	0.005863	0.000488	0.0050	0.0047	0.00732	0.0092	0.00995	0.0085	0.0078	0.0099	
4	Prop.Riau	0.008	0.0077	0.0076	0.007435	0.000644	0.0060	0.0086	0.02353	0.0242	0.02242	0.0202	0.0233	0.0288	
5	Prop.Jambi	0.004	0.0045	0.0043	0.003972	0.000311	0.0029	0.0030	0.00453	0.0062	0.00681	0.0053	0.0051	0.0063	
6	Prop.Sumsel	0.010	0.0097	0.0094	0.008371	0.000692	0.0065	0.0064	0.01029	0.0132	0.01294	0.0123	0.0130	0.0162	
7	Prop.Bngkl	0.002	0.0026	0.0026	0.002556	0.000208	0.0020	0.0018	0.00256	0.0030	0.00336	0.0023	0.0020	0.0042	
8	Prop.Lmpg	0.006	0.0065	0.0062	0.005928	0.000509	0.0051	0.0039	0.00738	0.0091	0.00817	0.0074	0.0074	0.0090	
9	Prop.DKI	0.031	0.0341	0.0313	0.024764	0.001560	0.0197	0.0263	0.02297	0.0261	0.02653	0.0256	0.0246	0.0197	
10	Prop.Jabar	0.032	0.0393	0.0361	0.033776	0.002400	0.0245	0.0247	0.03785	0.0474	0.04869	0.0474	0.0436	0.0187	
11	Prop.Jateng	0.020	0.0300	0.0285	0.025390	0.002025	0.0206	0.0196	0.03386	0.0360	0.03879	0.0355	0.0322	0.0331	
12	Prop.Yogya	0.004	0.0045	0.0043	0.004087	0.000311	0.0031	0.0033	0.00485	0.0047	0.00619	0.0056	0.0050	0.0051	
13	Prop.Jatim	0.033	0.0328	0.0321	0.029470	0.002213	0.0238	0.0217	0.03955	0.0448	0.04597	0.0398	0.0376	0.0380	
14	Prop.Kalbar	0.006	0.0058	0.0056	0.005266	0.000413	0.0044	0.0041	0.00635	0.0074	0.00791	0.0073	0.0065	0.0085	
15	Prop.Kalteng	0.005	0.0053	0.0050	0.004324	0.000385	0.0038	0.0036	0.00526	0.0056	0.00665	0.0061	0.0063	0.0082	
16	Prop.Kalsel	0.006	0.0059	0.0058	0.005512	0.000458	0.0046	0.0050	0.00577	0.0071	0.00682	0.0067	0.0071	0.0083	
17	Prop.Kaltim	0.009	0.0089	0.0081	0.007391	0.000617	0.0070	0.0051	0.02203	0.0254	0.02441	0.0135	0.0168	0.0282	
18	Prop.Sulut	0.005	0.0048	0.0046	0.004394	0.000353	0.0032	0.0024	0.00485	0.0065	0.00628	0.0048	0.0055	0.0076	
19	Prop.Sulteng	0.004	0.0046	0.0039	0.003749	0.000260	0.0029	0.0032	0.00404	0.0043	0.00529	0.0045	0.0042	0.0058	
20	Prop.Sulsel	0.011	0.0107	0.0108	0.010697	0.000784	0.0081	0.0085	0.01170	0.0147	0.01477	0.0140	0.0135	0.0160	
21	Prop.Sultra	0.003	0.0031	0.0028	0.002899	0.000255	0.0026	0.0026	0.00341	0.0041	0.00458	0.0036	0.0031	0.0052	
22	Prop.Bali	0.006	0.0069	0.0068	0.006224	0.000583	0.0069	0.0068	0.00829	0.0095	0.00831	0.0078	0.0073	0.0071	
23	Prop.NTB	0.004	0.0042	0.0041	0.004049	0.000317	0.0039	0.0039	0.00561	0.0062	0.00636	0.0057	0.0053	0.0058	
24	Prop.NTT	0.006	0.0060	0.0058	0.005457	0.000385	0.0042	0.0045	0.00789	0.0084	0.00843	0.0072	0.0065	0.0081	
25	Prop.Maluku	0.004	0.0042	0.0037	0.003926	0.000345	0.0028	0.0024	0.00358	0.0056	0.00577	0.0060	0.0082	0.0080	
26	Prop.Papua	0.009	0.0089	0.0089	0.007645	0.000628	0.0063	0.0080	0.01069	0.0145	0.01524	0.0120	0.0123	0.0258	

**INDIKATOR DESENTRALISASI FISKAL: LPI (LOGARITMA NATURAL DARI PRODUCTION INDICATOR)**

NO.	PROPINSI	TAHUN													
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Prop.NAD	0.008	0.0085	0.0081	0.006903	0.003972	0.005498	0.006036	0.00867	0.00865	0.0089	0.0097	0.0098	0.0128	
2	Prop.Sumut	0.019	0.0193	0.0187	0.017133	0.010695	0.011922	0.008436	0.01308	0.01667	0.0178	0.0133	0.0148	0.0164	
3	Prop.Sumbar	0.009	0.0082	0.0080	0.006972	0.004236	0.005599	0.004046	0.00634	0.00817	0.0088	0.0080	0.0076	0.0087	
4	Prop.Riau	0.010	0.0097	0.0097	0.008280	0.006115	0.005950	0.006651	0.01608	0.02288	0.0208	0.0165	0.0179	0.0219	
5	Prop.Jambi	0.006	0.0058	0.0057	0.004696	0.003074	0.003301	0.002727	0.00378	0.00553	0.0061	0.0048	0.0047	0.0056	
6	Prop.Sumsel	0.013	0.0117	0.0119	0.009460	0.006134	0.006756	0.004867	0.00921	0.01224	0.0120	0.0112	0.0108	0.0147	
7	Prop.Bngkl	0.004	0.0034	0.0035	0.003194	0.001986	0.002296	0.001558	0.00218	0.00279	0.0031	0.0024	0.0020	0.0038	
8	Prop.Lmpg	0.009	0.0083	0.0082	0.007218	0.005229	0.005984	0.003549	0.00617	0.00815	0.0075	0.0068	0.0069	0.0087	
9	Prop.DKI	0.037	0.0385	0.0386	0.029225	0.010049	0.015460	0.020368	0.01891	0.02458	0.0252	0.0243	0.0230	0.0212	
10	Prop.Jabar	0.049	0.0532	0.0497	0.043010	0.023676	0.026875	0.018931	0.05202	0.04339	0.0437	0.0419	0.0411	0.0188	
11	Prop.Jateng	0.040	0.0380	0.0369	0.029777	0.019509	0.023376	0.016939	0.02632	0.03263	0.0365	0.0329	0.0301	0.0307	
12	Prop.Yogya	0.006	0.0057	0.0055	0.004810	0.003015	0.003433	0.002989	0.00405	0.00407	0.0056	0.0054	0.0049	0.0048	
13	Prop.Jatim	0.045	0.0417	0.0419	0.035703	0.021564	0.026944	0.017989	0.03102	0.04126	0.0432	0.0371	0.0352	0.0357	
14	Prop.Kalbar	0.008	0.0077	0.0072	0.006408	0.004012	0.005009	0.006495	0.00529	0.00698	0.0072	0.0064	0.0063	0.0080	
15	Prop.Kalteng	0.007	0.0069	0.0064	0.005095	0.003532	0.004214	0.003039	0.00451	0.00487	0.0058	0.0062	0.0060	0.0076	
16	Prop.Kalsel	0.008	0.0075	0.0071	0.006396	0.004273	0.004864	0.003750	0.00522	0.00639	0.0061	0.0061	0.0058	0.0073	
17	Prop.Kaltim	0.011	0.0103	0.0096	0.008196	0.004861	0.006235	0.010094	0.01520	0.02355	0.0224	0.0135	0.0117	0.0222	
18	Prop.Sulut	0.007	0.0064	0.0061	0.005359	0.003584	0.003830	0.002585	0.00429	0.00595	0.0056	0.0045	0.0056	0.0072	
19	Prop.Sulteng	0.006	0.0062	0.0051	0.004599	0.002568	0.003394	0.002832	0.00354	0.00390	0.0047	0.0045	0.0043	0.0053	
20	Prop.Suisel	0.016	0.0142	0.0141	0.013227	0.007617	0.009307	0.007249	0.00965	0.01336	0.0131	0.0129	0.0133	0.0148	
21	Prop.Sultra	0.004	0.0040	0.0038	0.003527	0.002523	0.002946	0.002275	0.00298	0.00339	0.0042	0.0032	0.0029	0.0047	
22	Prop.Bali	0.008	0.0082	0.0083	0.007185	0.004715	0.006451	0.004509	0.00715	0.00769	0.0078	0.0072	0.0070	0.0071	
23	Prop.NTB	0.006	0.0056	0.0053	0.004868	0.003062	0.004517	0.003318	0.00472	0.00516	0.0059	0.0053	0.0050	0.0055	
24	Prop.NTT	0.009	0.0081	0.0076	0.006634	0.003737	0.004872	0.003939	0.00618	0.00675	0.0074	0.0065	0.0063	0.0071	
25	Prop.Maluku	0.006	0.0055	0.0048	0.004731	0.003030	0.003285	0.001974	0.00295	0.00523	0.0052	0.0055	0.0078	0.0075	
26	Prop.Papua	0.012	0.0105	0.0107	0.008640	0.005499	0.006839	0.006956	0.00912	0.01375	0.0138	0.0114	0.0124	0.0216	

INDIKATOR DESENTRALISASI FISKAL: LDE (LOGARITMA NATURAL DARI DEVELOPMENT INDICATOR)

NO.	PROPINSI	TAHUN													
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Prop.NAD	0.44	0.45	0.47	0.47	0.43	0.50	0.62	0.50	0.65	0.48	0.42	0.42	0.35	
2	Prop.Sumut	0.38	0.40	0.40	0.41	0.37	0.37	0.35	0.28	0.30	0.37	0.30	0.30	0.38	
3	Prop.Sumbang	0.40	0.40	0.41	0.41	0.42	0.37	0.40	0.26	0.29	0.35	0.29	0.32	0.36	
4	Prop.Riau	0.58	0.59	0.59	0.57	0.54	0.46	0.52	0.57	0.57	0.54	0.45	0.44	0.44	
5	Prop.Jambi	0.53	0.53	0.51	0.50	0.46	0.40	0.41	0.26	0.35	0.40	0.42	0.46	0.49	
6	Prop.Sumsel	0.50	0.48	0.49	0.46	0.41	0.40	0.36	0.32	0.37	0.42	0.43	0.41	0.39	
7	Prop.Bngkl	0.58	0.48	0.49	0.51	0.43	0.44	0.39	0.23	0.27	0.31	0.34	0.32	0.29	
8	Prop.Lmpg	0.42	0.40	0.41	0.40	0.41	0.37	0.36	0.25	0.26	0.28	0.25	0.30	0.35	
9	Prop.DKI	0.45	0.43	0.47	0.42	0.36	0.32	0.32	0.32	0.37	0.64	0.59	0.59	0.60	
10	Prop.Jabar	0.43	0.47	0.48	0.45	0.36	0.32	0.34	0.29	0.31	0.35	0.31	0.32	0.33	
11	Prop.Jateng	0.33	0.33	0.35	0.34	0.25	0.26	0.26	0.21	0.30	0.34	0.26	0.25	0.24	
12	Prop.Yogya	0.34	0.34	0.34	0.33	0.28	0.28	0.30	0.16	0.20	0.24	0.28	0.25	0.22	
13	Prop.Jatim	0.37	0.39	0.42	0.41	0.37	0.33	0.33	0.31	0.38	0.40	0.32	0.35	0.37	
14	Prop.Kalbar	0.49	0.48	0.47	0.48	0.41	0.44	0.24	0.31	0.31	0.36	0.32	0.33	0.35	
15	Prop.Kalteng	0.59	0.58	0.56	0.58	0.48	0.50	0.47	0.40	0.39	0.46	0.48	0.55	0.62	
16	Prop.Kalsel	0.48	0.48	0.47	0.50	0.46	0.46	0.42	0.30	0.34	0.39	0.37	0.40	0.44	
17	Prop.Kaltim	0.54	0.55	0.55	0.53	0.47	0.48	0.55	0.52	0.58	0.56	0.48	0.42	0.35	
18	Prop.Sulut	0.37	0.37	0.38	0.39	0.39	0.42	0.35	0.24	0.26	0.33	0.32	0.30	0.28	
19	Prop.Suiteng	0.52	0.56	0.51	0.53	0.38	0.46	0.48	0.36	0.29	0.37	0.36	0.41	0.46	
20	Prop.Sulsei	0.44	0.41	0.42	0.46	0.34	0.35	0.41	0.25	0.32	0.38	0.33	0.35	0.37	
21	Prop.Sultra	0.45	0.46	0.48	0.45	0.46	0.44	0.46	0.22	0.18	0.35	0.35	0.38	0.41	
22	Prop.Bali	0.44	0.44	0.46	0.46	0.41	0.50	0.52	0.32	0.28	0.30	0.27	0.36	0.45	
23	Prop.NTB	0.41	0.41	0.40	0.41	0.34	0.46	0.44	0.30	0.27	0.34	0.27	0.33	0.40	
24	Prop.NTT	0.49	0.47	0.47	0.46	0.34	0.38	0.40	0.33	0.25	0.38	0.40	0.39	0.38	
25	Prop.Maluku	0.49	0.49	0.49	0.53	0.54	0.56	0.53	0.28	0.32	0.37	0.37	0.43	0.49	
26	Prop.Papua	0.46	0.45	0.47	0.45	0.40	0.45	0.57	0.38	0.48	0.45	0.42	0.35	0.29	



VARIABEL KONTROL 1: PERSENTASE PENDUDUK PERKOTAAN (URBAN) DI TIAP PROPINSI DI INDONESIA

NO.	PROPINSI	TAHUN													
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Prop.NAD	0.19	0.20	0.21	0.22	0.21	0.25	0.28	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.29	
2	Prop.Sumut	0.39	0.40	0.41	0.43	0.43	0.45	0.43	0.44	0.43	0.43	0.44	0.46	0.47	
3	Prop.Sumbang	0.23	0.25	0.25	0.26	0.26	0.29	0.29	0.28	0.30	0.29	0.30	0.30	0.31	
4	Prop.Riau	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.37	0.43	0.42	0.45	0.43	0.44	0.46	0.47	
5	Prop.Jambi	0.25	0.26	0.27	0.29	0.29	0.31	0.28	0.29	0.29	0.28	0.29	0.27	0.27	
6	Prop.Sumsel	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	
7	Prop.Bngkl	0.24	0.25	0.26	0.27	0.20	0.29	0.29	0.29	0.31	0.28	0.29	0.28	0.29	
8	Prop.Lmpg	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	
9	Prop.DKI	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	
10	Prop.Jabar	0.40	0.42	0.43	0.44	0.45	0.48	0.51	0.52	0.53	0.51	0.52	0.52	0.53	
11	Prop.Jateng	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.35	0.40	0.41	0.43	0.40	0.41	0.40	0.42	
12	Prop.Yogya	0.54	0.54	0.50	0.52	0.52	0.67	0.58	0.59	0.59	0.58	0.59	0.59	0.60	
13	Prop.Jatim	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.35	0.41	0.42	0.43	0.41	0.42	0.41	0.42	
14	Prop.Kalbar	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.03	0.26	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.45	
15	Prop.Kalteng	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24	0.27	0.28	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	0.30	
16	Prop.Kalsel	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.36	0.36	0.38	0.37	0.38	0.38	0.39	
17	Prop.Kaltim	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.58	0.57	0.57	0.55	0.55	0.56	0.57	
18	Prop.Sulut	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27	0.30	0.33	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	
19	Prop.Sulteng	0.20	0.21	0.22	0.23	0.23	0.26	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	
20	Prop.Sulse	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	
21	Prop.Sultra	0.20	0.22	0.23	0.24	0.24	0.26	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	
22	Prop.Bali	0.32	0.33	0.35	0.36	0.37	0.40	0.50	0.49	0.54	0.48	0.51	0.51	0.53	
23	Prop.NTB	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.35	0.37	0.38	0.35	0.37	0.35	0.38	
24	Prop.NTT	0.13	0.14	0.14	0.15	0.17	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	
25	Prop.Maluku	0.23	0.24	0.25	0.26	0.26	0.28	0.27	0.24	0.25	0.26	0.24	0.27	0.27	
26	Prop.Papua	0.25	0.23	0.26	0.26	0.27	0.26	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.26	0.26	

VARIABEL KONTROL 2: PDRB PERKAPITA BERDASARKAN HARGA KONSTAN TAHUN 2000 DI TIAP PROPINSI DI INDONESIA

NO.	PROPINSI	TAHUN												
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Prop. NAD	3.293,913.07	3.430,905.22	3.622,342.86	3.903,229.64	3.617,044.46	3.510,480.60	3.457,852.74	3.536,210.99	5.220,473.18	5.159,392.05	5.443,931.53	5.589,811.89	5.958,579.29
2	Prop. Sumut	5.166,425.91	5.568,375.61	6.012,842.30	6.526,751.75	5.742,498.74	5.829,896.73	6.028,381.66	6.092,630.13	6.286,245.54	6.609,291.97	6.873,420.29	7.059,546.98	7.381,670.62
3	Prop. Sumbar	4.485,277.95	4.794,493.05	5.096,436.87	5.639,846.03	5.227,732.15	5.280,859.72	5.435,044.19	5.372,633.07	5.779,743.59	5.840,923.18	6.080,565.34	6.386,043.78	6.681,547.82
4	Prop. Riau	3.715,612.01	3.931,357.25	4.140,243.29	4.250,796.47	4.021,501.14	4.035,791.95	4.289,399.50	4.136,683.23	9.203,357.26	13.827,664.03	14.603,331.38	14.868,754.95	15.268,838.13
5	Prop. Jambi	3.320,997.74	3.497,869.06	3.666,236.76	4.062,410.09	3.633,699.75	3.655,094.39	3.638,706.34	3.767,557.53	4.331,562.35	4.391,901.24	4.553,309.53	4.787,604.47	4.980,313.61
6	Prop. Sumsel	2.080,824.33	2.237,094.17	2.383,357.99	2.559,489.92	2.285,141.35	2.271,184.27	2.284,394.35	2.717,142.16	6.052,320.49	6.476,625.69	6.476,625.69	6.696,957.81	6.903,786.53
7	Prop. Bengkulu	3.104,349.63	3.246,692.75	3.363,932.34	3.694,371.02	3.364,577.91	3.433,197.78	3.480,849.33	3.162,467.30	3.205,840.95	3.668,459.96	3.806,127.84	4.027,285.28	4.215,753.26
8	Prop. Lampung	2.905,676.44	3.149,089.81	3.335,007.36	3.653,665.89	3.364,577.91	3.415,679.74	3.454,607.20	3.517,955.00	3.691,887.34	3.863,240.00	4.001,030.69	4.131,045.14	4.277,425.66
9	Prop. DKI	24.310,308.53	26.016,917.90	27.843,578.68	32.656,755.28	26.902,150.70	26.781,803.58	27.606,179.98	28.752,596.10	29.863,632.94	30.511,415.25	31.832,208.61	33.324,813.42	34.897,057.63
10	Prop. Jabar	2.185,127.73	2.329,575.28	2.473,653.84	2.530,610.15	2.012,740.32	2.042,033.14	2.102,390.83	2.709,044.11	5.690,998.38	5.764,781.86	5.916,611.91	6.335,177.17	6.571,585.68
11	Prop. Jateng	3.289,358.51	3.512,867.69	3.761,301.79	3.848,339.45	3.304,232.52	3.389,654.05	3.481,672.19	3.518,959.63	3.870,892.17	4.014,452.75	4.172,656.65	4.763,430.39	4.682,581.97
12	Prop. Yogyakarta	4.092,731.07	4.424,968.13	4.772,700.88	4.803,983.55	4.238,075.26	4.251,033.70	4.393,837.92	4.493,677.63	4.643,127.34	4.783,049.29	5.008,951.03	5.057,608.25	5.174,604.77
13	Prop. Jatim	5.656,346.64	6.072,795.27	6.529,724.11	6.878,631.39	5.726,361.82	5.793,532.81	5.983,021.80	6.029,337.82	6.201,689.78	6.310,582.50	6.639,717.13	7.063,777.63	7.412,421.74
14	Prop. Kaltab	4.315,410.52	4.620,190.55	5.004,134.12	5.561,045.10	5.219,013.26	5.279,867.43	5.354,338.02	4.966,821.76	4.956,213.77	5.405,620.03	5.574,438.62	5.808,575.14	6.014,624.22
15	Prop. Kalteng	5.826,805.36	6.165,868.42	6.696,178.71	7.123,403.05	6.457,852.93	6.373,016.18	6.325,204.37	6.067,242.78	6.087,046.75	6.832,395.64	7.084,992.75	7.329,172.36	7.665,434.00
16	Prop. Sulsel	5.104,687.48	5.456,536.19	5.851,016.22	6.337,012.74	5.841,581.68	5.909,327.20	6.097,608.04	6.321,277.84	6.587,557.08	6.588,028.49	6.835,345.25	7.060,530.37	7.255,293.50
17	Prop. Kaltim	5.712,774.73	6.077,941.99	6.474,649.68	7.193,941.71	6.807,281.14	6.898,101.38	6.647,630.94	7.203,902.64	13.424,984.11	13.450,818.01	14.212,678.04	14.910,854.30	16.026,926.43
18	Prop. Sulut	1.466,080.81	1.590,249.53	1.715,294.77	1.780,205.53	1.714,933.57	1.789,523.89	1.876,066.67	1.793,528.97	3.713,892.37	4.571,580.83	3.868,354.50	4.092,815.78	4.286,505.62
19	Prop. Sulteng	3.663,568.24	3.657,560.24	4.074,929.07	4.326,091.86	4.074,547.69	4.107,600.88	4.189,938.95	4.082,603.90	4.196,067.81	4.591,602.11	4.850,069.18	5.121,154.66	5.400,766.37
20	Prop. Sulsel	3.313,153.26	3.527,048.52	3.750,279.94	3.987,789.86	3.715,648.32	3.782,978.52	3.920,338.33	3.924,166.01	4.081,474.25	4.290,796.49	4.455,838.02	4.034,570.94	4.230,671.31
21	Prop. Sultra	3.099,471.42	3.225,781.15	3.316,111.94	3.475,010.08	3.183,166.17	3.173,437.51	3.245,069.36	3.236,282.26	3.342,933.67	3.686,467.84	3.890,488.68	4.089,023.94	4.317,740.20
22	Prop. Bali	4.899,252.46	5.245,565.10	5.630,100.44	5.760,646.08	5.461,061.07	5.431,292.74	5.528,856.88	5.599,284.79	5.703,390.11	5.674,053.94	5.876,282.32	6.227,869.48	6.464,849.12
23	Prop. NTB	2.093,920.90	2.228,672.81	2.374,605.71	2.508,085.50	2.399,643.26	2.442,840.69	3.228,793.18	3.199,151.37	3.262,467.48	3.496,606.22	3.655,516.35	3.631,266.65	3.647,087.92
24	Prop. NTT	1.708,488.70	1.824,152.87	1.945,227.21	2.002,677.72	1.911,313.39	1.926,494.88	1.968,930.79	2.095,193.32	2.185,443.11	2.202,471.35	2.273,117.50	2.293,162.78	2.357,281.58
25	Prop. Maluku	1.400,984.16	1.457,894.95	1.521,615.83	1.739,492.96	1.625,314.02	1.220,756.58	1.141,320.40	1.241,398.49	2.546,922.69	2.397,738.81	2.466,069.14	2.567,051.84	2.481,622.39
26	Prop. Papua	6.011,157.97	7.207,194.63	7.912,400.19	8.700,690.56	9.567,908.60	9.069,385.71	9.077,557.79	8.181,041.49	8.822,040.80	8.802,609.35	7.197,642.26	8.966,212.52	7.712,601.69

VARIABEL KONTROL 3: RASIO PANJANG JALAN TERHADAP LUAS WILAYAH PROPINSI DI INDONESIA

NO.	PROPINSI	TAHUN													
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Prop.NAD	0.0022	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0027	0.0028
2	Prop.Sumut	0.0033	0.0034	0.0036	0.0036	0.0036	0.0037	0.0037	0.0038	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0048	0.0048
3	Prop.Sumbang	0.0027	0.0028	0.0029	0.0029	0.0032	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0038	0.0040
4	Prop.Riau	0.0013	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0016	0.0016
5	Prop.Jambi	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0017	0.0018	0.0018	0.0019	0.0022	0.0024	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031
6	Prop.Sumsel	0.0021	0.0021	0.0024	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026	0.0024	0.0033	0.0033	0.0033
7	Prop.Bngkl	0.0026	0.0026	0.0026	0.0027	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
8	Prop.Lmpg	0.0022	0.0026	0.0028	0.0029	0.0030	0.0034	0.0034	0.0034	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035
9	Prop.DKI	0.0811	0.0865	0.0865	0.0866	0.0866	0.0867	0.0867	0.1272	0.0882	0.0887	0.0887	0.0963	0.0963	0.0963
10	Prop.Jabar	0.0048	0.0048	0.0051	0.0052	0.0054	0.0054	0.0054	0.0054	0.0056	0.0056	0.0062	0.0067	0.0067	0.0067
11	Prop.Jateng	0.0073	0.0073	0.0074	0.0075	0.0075	0.0077	0.0077	0.0077	0.0078	0.0081	0.0081	0.0089	0.0090	0.0090
12	Prop.Yogya	0.0166	0.0166	0.0166	0.0166	0.0244	0.0249	0.0249	0.0251	0.0251	0.0251	0.0252	0.0252	0.0252	0.0252
13	Prop.Jatim	0.0060	0.0061	0.0063	0.0064	0.0065	0.0068	0.0068	0.0068	0.0069	0.0069	0.0069	0.0075	0.0078	0.0078
14	Prop.Kalbar	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0008	0.0008	0.0009	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010
15	Prop.Kalteng	0.0054	0.0055	0.0055	0.0056	0.0057	0.0057	0.0057	0.0057	0.0057	0.0057	0.0058	0.0069	0.0069	0.0069
16	Prop.Kalsel	0.0018	0.0018	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0023	0.0023
17	Prop.Kaltim	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
18	Prop.Sulut	0.0061	0.0069	0.0069	0.0070	0.0070	0.0071	0.0071	0.0071	0.0071	0.0091	0.0093	0.0092	0.0112	0.0112
19	Prop.Sulteng	0.0010	0.0010	0.0011	0.0011	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0017	0.0017	0.0017
20	Prop.Sulse	0.0040	0.0040	0.0041	0.0042	0.0044	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0047	0.0048	0.0059	0.0059
21	Prop.Sultra	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0020	0.0021	0.0022	0.0024	0.0024
22	Prop.Bali	0.0116	0.0116	0.0120	0.0122	0.0123	0.0124	0.0124	0.0124	0.0127	0.0127	0.0127	0.0128	0.0129	0.0129
23	Prop.NTB	0.0030	0.0034	0.0035	0.0036	0.0037	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
24	Prop.NTT	0.0034	0.0034	0.0034	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0037	0.0041	0.0041	0.0041	0.0041
25	Prop.Maluku	0.0009	0.0010	0.0010	0.0010	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0009	0.0009	0.0011	0.0011
26	Prop.Papua	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005

VARIABEL KONTROL 4: PERSENTASE PDRB SEKTOR MANUFAKTUR (SEKTOR 3+5) TERHADAP TOTAL PDRB DI TIAP PROPINSI DI INDONESIA

NO.	PROPINSI	TAHUN													
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Prop.NAD	0.32	0.31	0.33	0.34	0.26	0.24	0.23	0.25	0.25	0.24	0.24	0.21	0.22	
2	Prop.Sumut	0.30	0.31	0.32	0.31	0.35	0.31	0.31	0.31	0.29	0.31	0.31	0.31	0.32	
3	Prop.Sumbar	0.26	0.27	0.27	0.22	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	
4	Prop.Riau	0.19	0.20	0.22	0.21	0.18	0.18	0.18	0.19	0.32	0.33	0.34	0.32	0.31	
5	Prop.Jambi	0.23	0.24	0.24	0.23	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	
6	Prop.Sumsel	0.28	0.29	0.30	0.29	0.26	0.26	0.27	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	
7	Prop.Bngkl	0.10	0.10	0.10	0.11	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
8	Prop.Lmpg	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	
9	Prop.DKI	0.35	0.35	0.36	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	
10	Prop.Jabar	0.39	0.41	0.42	0.43	0.40	0.38	0.44	0.44	0.48	0.48	0.46	0.48	0.49	
11	Prop.Jateng	0.36	0.36	0.37	0.36	0.31	0.33	0.33	0.33	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	
12	Prop.Yogya	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	
13	Prop.Jatim	0.34	0.35	0.36	0.36	0.33	0.31	0.32	0.31	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	
14	Prop.Kalbar	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	
15	Prop.Kalteng	0.18	0.18	0.18	0.14	0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	
16	Prop.Kalsel	0.26	0.27	0.26	0.27	0.26	0.25	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.20	0.19	
17	Prop.Katim	0.35	0.33	0.39	0.37	0.45	0.45	0.46	0.47	0.43	0.40	0.39	0.39	0.39	
18	Prop.Sulut	0.19	0.20	0.20	0.20	0.25	0.23	0.20	0.21	0.19	0.21	0.21	0.20	0.20	
19	Prop.Sulteng	0.17	0.17	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
20	Prop.Sulsel	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.15	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	
21	Prop.Sultra	0.20	0.22	0.20	0.19	0.16	0.16	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	
22	Prop.Bali	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
23	Prop.NTB	0.13	0.01	0.14	0.15	0.13	0.14	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	
24	Prop.NTT	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	
25	Prop.Maluku	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.13	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	
26	Prop.Papua	0.13	0.13	0.13	0.12	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	

VARIABEL KONTROL 5: RASIO PMTDB TERHADAP TOTAL PDRB (INVESTASI) PROPINSI DI INDONESIA

NO.	PROPINSI	TAHUN													
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Prop.NAD	0.13	0.11	0.11	0.11	0.07	0.06	0.07	0.07	0.12	0.07	0.07	0.12	0.14	
2	Prop.Sumut	0.27	0.28	0.28	0.18	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	
3	Prop.Sumbar	0.25	0.25	0.26	0.27	0.22	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	
4	Prop.Riau	0.23	0.24	0.24	0.26	0.27	0.28	0.28	0.30	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	
5	Prop.Jambi	0.32	0.31	0.30	0.32	0.19	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
6	Prop.Sumsel	0.33	0.32	0.33	0.31	0.26	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.21	
7	Prop.Bngkl	0.28	0.29	0.31	0.31	0.20	0.15	0.15	0.15	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
8	Prop.Lmpg	0.30	0.32	0.36	0.33	0.19	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.18	0.17	
9	Prop.DKI	0.47	0.48	0.48	0.45	0.32	0.36	0.37	0.37	0.35	0.33	0.36	0.37	0.36	
10	Prop.Jabar	0.23	0.24	0.27	0.22	0.20	0.16	0.17	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	
11	Prop.Jateng	0.23	0.22	0.23	0.21	0.22	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	
12	Prop.Yogya	0.27	0.27	0.28	0.27	0.25	0.23	0.25	0.25	0.26	0.27	0.29	0.30	0.35	
13	Prop.Jatim	0.28	0.28	0.29	0.29	0.22	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	
14	Prop.Kalbar	0.26	0.29	0.31	0.30	0.32	0.31	0.32	0.29	0.26	0.26	0.24	0.25	0.25	
15	Prop.Kalteng	0.41	0.38	0.38	0.35	0.31	0.35	0.39	0.36	0.34	0.34	0.34	0.36	0.41	
16	Prop.Kalsel	0.24	0.23	0.24	0.23	0.17	0.18	0.21	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
17	Prop.Kaltim	0.27	0.30	0.28	0.26	0.15	0.15	0.12	0.14	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	
18	Prop.Sulut	0.19	0.23	0.27	0.28	0.10	0.14	0.19	0.20	0.17	0.18	0.18	0.18	0.20	
19	Prop.Sulteng	0.28	0.27	0.27	0.18	0.15	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	
20	Prop.Sulse	0.22	0.22	0.26	0.25	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	
21	Prop.Sultra	0.33	0.31	0.30	0.28	0.20	0.21	0.22	0.19	0.21	0.22	0.24	0.23	0.24	
22	Prop.Bali	0.26	0.27	0.27	0.14	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	
23	Prop.NTB	0.28	0.29	0.30	0.20	0.23	0.35	0.25	0.22	0.23	0.23	0.21	0.20	0.21	
24	Prop.NTT	0.27	0.25	0.26	0.26	0.20	0.22	0.22	0.21	0.18	0.18	0.19	0.16	0.16	
25	Prop.Maluku	0.22	0.28	0.28	0.92	0.20	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	
26	Prop.Papua	0.37	0.37	0.37	0.24	0.16	0.19	0.20	0.23	0.23	0.25	0.29	0.20	0.22	

VARIABEL KONTROL 6: DERAJAT KETERBUKAAN (OPENNES) TIAP PROPINSI DI INDONESIA

NO.	PROPINSI	TAHUN													
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Prop.NAD	0.412	0.430	0.436	0.448	0.465	0.479	0.460	0.433	0.585	0.570	0.537	0.382	0.343	
2	Prop.Sumut	0.099	0.094	0.092	0.153	0.309	0.184	0.165	0.162	0.168	0.147	0.201	0.174	0.181	
3	Prop.Sumbar	0.055	0.052	0.064	0.064	0.166	0.067	0.055	0.051	0.073	0.083	0.115	0.132	0.134	
4	Prop.Riau	0.508	0.492	0.496	0.504	0.444	0.413	0.429	0.409	0.474	0.442	0.417	0.446	0.394	
5	Prop.Jambi	0.007	0.003	0.015	0.007	0.051	0.036	0.041	0.025	0.041	0.005	0.119	0.044	0.006	
6	Prop.Sumsel	0.023	0.033	0.033	0.035	0.089	0.088	0.120	0.107	0.099	0.128	0.130	0.133	0.167	
7	Prop.Bngkl	0.030	0.033	0.050	0.046	0.033	0.041	0.040	0.028	0.164	0.172	0.181	0.177	0.177	
8	Prop.Lmpg	0.057	0.019	0.004	0.030	0.173	0.042	0.078	0.003	0.024	0.063	0.100	0.133	0.107	
9	Prop.DKI	0.033	0.033	0.029	0.100	0.224	0.136	0.146	0.142	0.190	0.104	0.122	0.097	0.096	
10	Prop.Jabar	0.027	0.019	0.004	0.047	0.120	0.119	0.096	0.087	0.086	0.092	0.084	0.070	0.088	
11	Prop.Jateng	0.099	0.078	0.069	0.076	0.092	0.111	0.143	0.234	0.081	0.104	0.091	0.040	0.037	
12	Prop.Yogya	0.025	0.036	0.052	0.050	0.031	0.009	0.007	0.011	0.016	0.025	0.029	0.045	0.095	
13	Prop.Jatim	0.024	0.021	0.006	0.029	0.092	0.031	0.030	0.058	0.001	0.010	0.011	0.003	0.009	
14	Prop.Kalbar	0.511	0.038	0.049	0.042	0.095	0.044	0.035	0.041	0.066	0.072	0.103	0.085	0.093	
15	Prop.Kalteng	0.032	0.018	0.047	0.021	0.024	0.133	0.140	0.145	0.112	0.114	0.085	0.083	0.199	
16	Prop.Kalsel	0.272	0.282	0.302	0.309	0.388	0.292	0.311	0.356	0.283	0.288	0.298	0.321	0.230	
17	Prop.Kaltim	0.432	0.395	0.398	0.405	0.583	0.583	0.673	0.671	0.628	0.620	0.664	0.710	0.703	
18	Prop.Sulut	0.452	0.005	0.018	0.051	0.160	0.053	0.008	0.006	0.094	0.099	0.107	0.093	0.060	
19	Prop.Sulteng	0.039	0.010	0.023	0.065	0.099	0.081	0.069	0.080	0.040	0.036	0.036	0.036	0.036	
20	Prop.Suisel	0.000	0.035	0.005	0.022	0.109	0.109	0.101	0.094	0.023	0.022	0.058	0.052	0.054	
21	Prop.Sultra	0.009	0.059	0.068	0.056	0.044	0.075	0.002	0.016	0.017	0.021	0.048	0.056	0.010	
22	Prop.Bali	0.037	0.037	0.056	0.117	0.232	0.235	0.243	0.251	0.251	0.253	0.267	0.235	0.282	
23	Prop.NTB	0.064	0.079	0.075	0.093	0.009	0.132	0.167	0.207	0.221	0.180	0.275	0.312	0.252	
24	Prop.NTT	0.124	0.097	0.128	0.080	0.132	0.293	0.266	0.289	0.165	0.152	0.169	0.175	0.161	
25	Prop.Maluku	0.201	0.159	0.178	0.135	0.130	0.037	0.053	0.028	0.039	0.010	0.021	0.022	0.011	
26	Prop.Papua	0.007	0.060	0.058	0.023	0.331	0.238	0.234	0.223	0.150	0.118	0.036	0.168	0.275	

### LAMPIRAN 5: STATISTIK DESKRIPTIF DARI DATA

INDIKATOR		STATISTIK DESKRIPTIF				
		MEAN	MEDIAN	MIN	MAX	STAT DEV
DESENTR ALISASI FISKAL	AI	0.148	0.117	0.026	0.636	0.108
	RI	0.013	0.006	0.002	0.176	0.019
	PI	0.009	0.006	0.001	0.042	0.008
	DE	0.403	0.401	0.161	0.652	0.093
VARIABEL KONTROL (VK)	VK1_URBAN	0.3470	0.2981	0.0287	0.9900	0.1692
	VK2_PDRBPERKAP	5,753,563.84	4,409,403.03	1,141,320.40	34,887,057.63	5,303,281.51
	VK3_JLN	0.0077	0.0033	0.0003	0.1272	0.0175
	VK4_MANUF	0.2227	0.2072	0.0128	0.4901	0.1000
	VK5_INVS	0.2208	0.2070	0.0147	0.9178	0.0914
	VK6_OPENNES	0.1469	0.0926	0.0003	0.7098	0.1551
INDEKS WILIAMSON						

**Keterangan:**

**AI:** *Autonomy Indicator*, yaitu rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan di tiap Propinsi di Indonesia

**RI:** *Revenue Indicator*, yaitu rasio pendapatan tiap propinsi (termasuk pendapatan kabupaten/kota yang ada di propinsi tersebut) terhadap total seluruh pendapatan baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota

**PI:** *Production Indicator*, yaitu rasio pengeluaran tiap propinsi (termasuk pengeluaran kabupaten/kota yang ada di propinsi tersebut) terhadap total seluruh pendapatan baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten/kota

**DE:** *Development Expenditure*, yaitu rasio belanja pembangunan tiap propinsi (termasuk kabupaten/kota yang ada didalamnya) terhadap total belanja/pengeluaran

**VK1\_URBAN:** Persentase penduduk perkotaan (*urban*) tiap propinsi di Indonesia

**VK2\_PDRB PERKAP:** PDRB perkapita berdasarkan harga konstan tahun 2000 di tiap propinsi di Indonesia

**VK3\_JLN:** Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah propinsi di Indonesia

**VK4\_MANUF:** Persentase PDRB sektor manufaktur (sektor 3+5) terhadap total PDRB di tiap propinsi di Indonesia

**VK5\_INVS:** Rasio PMTDB terhadap total PDRB propinsi di Indonesia

**VK6\_OPENNES:** Atau derajat keterbukaan yaitu rasio net ekspor terhadap total PDRB di tiap propinsi di Indonesia